PENGANTAR
ILMU EKONOMI:
KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI KONTEMPORER

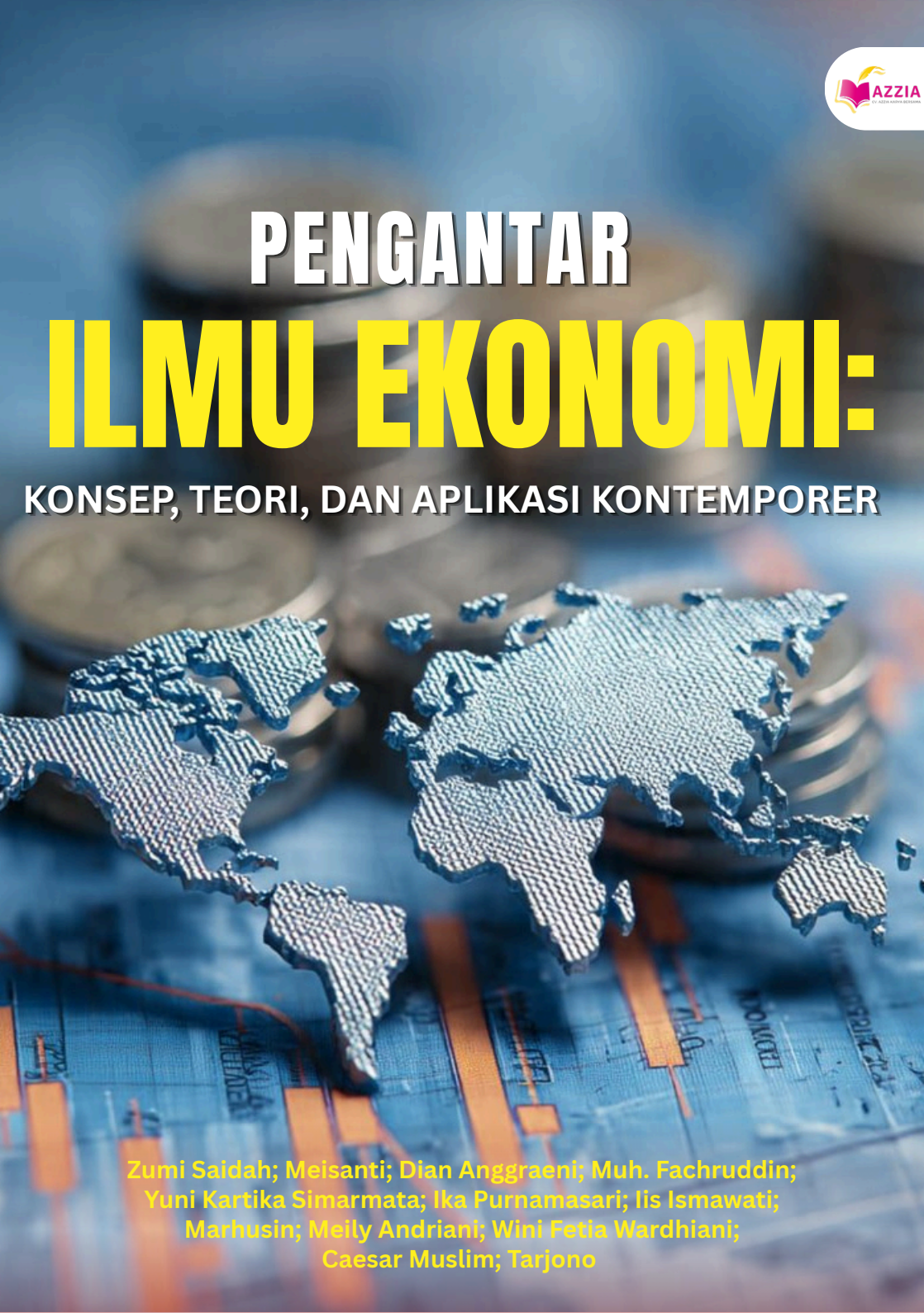

Zumi Saidah; Meisanti; Dian Anggraeni; Muh. Fachruddin;
Yuni Kartika Simarmata; Ika Purnamasari; Iis Ismawati;
Marhusin; Meily Andriani; Wini Fetia Wardhiani;
Caesar Muslim; Tarjono

PENGANTAR ILMU EKONOMI: KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI KONTEMPORER

Penulis:
Zumi Saidah
Meisanti
Dian Anggraeni
Muh. Fachruddin
Yuni Kartika Simarmata
Ika Purnamasari
Iis Ismawati
Marhusin
Meily Andriani
Wini Fetia Wardhiani
Caesar Muslim
Tarjono

Azzia Karya Bersama

Pengantar Ilmu Ekonomi:
Konsep, Teori, dan Aplikasi Kontemporer

Penulis:
Zumi Saidah; Meisanti; Dian Anggraeni; Muh. Fachruddin; Yuni Kartika Simarmata; Ika Purnamasari; Iis Ismawati; Marhusin; Meily Andriani; Wini Fetia Wardhiani; Caesar Muslim;Tarjono

---

Editor: Muhammad Ikhlas Al Kutsi, S.Kom, S.Pd, MM.
Penyunting: Sonya Scodia Wulandari, S.Tr.Ak., M.M
Desain Sampul dan Tata Letak: Muhammad Hidayat, S.Ikom.

Diterbitkan oleh:
Azzia Karya Bersama
Anggota IKAPI No. 051/SBA/2024
Perumahan Griya Anak Air Permai Blok B19, Batipuh Panjang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: penerbitazzia@gmail.com
Website: www.azzia.id

ISBN: 978-634-7617-77-4

Cetakan pertama, Juni 2026

© Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, dan mendistribusikan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji beserta syukur kami sampaikan ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul **"Pengantar Ilmu Ekonomi: Konsep, Teori, dan Aplikasi Kontemporer"** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk menyediakan sumber belajar yang komprehensif, sistematis, dan relevan bagi mahasiswa, dosen, praktisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami ilmu ekonomi secara lebih mendalam.

Ilmu ekonomi merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran penting dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi, globalisasi, transformasi digital, perubahan pola konsumsi, serta berbagai tantangan ekonomi global menuntut pemahaman ekonomi yang tidak hanya berlandaskan teori klasik, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menghubungkan konsep-konsep dasar ekonomi dengan berbagai aplikasi nyata yang berkembang pada era modern.

Materi yang disajikan dalam buku ini mencakup konsep dasar ilmu ekonomi, sistem ekonomi dan mekanisme pasar, permintaan, penawaran, dan keseimbangan, elastisitas dan aplikasinya, teori perilaku konsumen, hingga ekonomi internasional dan globalisasi. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Padang, Juni 2026
Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
BAB 1 RUANG LINGKUP DAN KONSEP DASAR ILMU EKONOMI **1**
1.1 Hakikat Ilmu Ekonomi dan Perkembangannya 1
1.2 Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi: Mikro, Makro, dan Internasional 9
1.3 Prinsip Dasar dan Cara Berpikir Ekonomi 16
1.4 Ilmu Ekonomi dalam Konteks Kontemporer 19
BAB 2 SISTEM EKONOMI DAN MEKANISME PASAR **25**
2.1 Pengertian dan Hakikat Mekanisme Pasar 25
2.2 Mekanisme Pasar dalam Berbagai Sistem Ekonomi 30
2.3 Peran Harga sebagai Sinyal dan Insentif 34
BAB 3 PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN KESEIMBANGAN **41**
3.1 Permintaan 41
3.2 Penawaran 49
3.3 Keseimbangan Pasar 57
BAB 4 ELASTISITAS DAN APLIKASINYA **65**
4.1 Pengertian Elastisitas 65
4.2 Jenis-Jenis Elastisitas 67
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Elastisitas 77
BAB 5 TEORI PERILAKU KONSUMEN **87**
5.1 Konsep Perilaku Konsumen 88
5.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen 91
5.3 Model Perilaku Konsumen 97
5.4 Proses Pengambilan Keputusan 99

BAB 6 TEORI PRODUKSI DAN BIAYA 103
6.1 Konsep Dasar Teori Produksi 104
6.2 Fungsi Produksi 105
6.3 Produk Total, Produk Rata-rata, dan Produk Marginal 107
6.4 Kurva *Isoquant* dan *Isocost* 111
6.5 Skala Hasil (*Returns to scale*) 115
6.6 Teori Biaya Produksi 116
6.7 Hubungan Biaya dan Fungsi Produksi 122
6.8 Aplikasi Teori Produksi dan Biaya di Sektor Agribisnis 124
6.9 Contoh Soal dan Pembahasan 126
BAB 7 STRUKTUR PASAR DAN PENENTUAN HARGA . 133
7.1 Struktur Pasar 133
7.2 Struktur Pasar Persaingan Sempurna 134
7.3 Struktur Pasar Monopoli 141
7.4 Struktur Pasar Monopolistik 146
7.5 Struktur Pasar Oligopoli 151
BAB 8 PASAR FAKTOR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 159
8.1 Pasar Faktor Produksi 159
8.2 Distribusi Pendapatan 169
8.3 Upaya Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan 174
8.4 Hubungan Pasar Faktor Produksi dengan Distribusi Pendapatan 177
BAB 9 KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO 181
9.1 Ruang Lingkup Ekonomi Makro 181
9.2 PDB, Inflasi, Pengangguran 182
9.3 Pendapatan Nasional 186
9.4 Pertumbuhan Ekonomi 188
9.5 Kebijakan Makroekonomi : Fiskal, Moneter, AD-AS 190
9.6 Contoh Kasus: Dari Ekonomi Umum ke Sektor Pertanian Indonesia 193

BAB 10 INFLASI, PENGANGGURAN, DAN STABILITAS EKONOMI 197
10.1 Inflasi 197
10.2 Pengangguran 214
10.3 Stabilitas Ekonomi 227
10.4 Inflasi, Pengangguran, dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia 230
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER 235
11.1 Konsep Dasar Kebijakan Fiskal dan Moneter 235
11.2 Landasan Teori Kebijakan Fiskal dan Moneter 239
11.3 Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter 243
11.4 Mekanisme Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter 248
11.5 Isu Kontemporer Kebijakan Fiskal dan Moneter di Negara Berkembang 252
BAB 12 EKONOMI INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI 257
12.1 Ekonomi Internasional: Konsep dan Ruang Lingkup 258
12.2 Teori Perdagangan Internasional 259
12.3 Kebijakan Perdagangan Internasional: Perspektif Empiris 261
12.4 Kesimpulan 273
BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Formalisasi Ilmu Ekonomi (logika sebab-akibat) 4
Gambar 1.2 Rantai Kausal Pembangunan Ekonomi 6
Gambar 1.3 Rantai Kausal Pembangunan Ekonomi 8
Gambar 1.4 Peta Besar Cabang Ilmu Ekonomi 10
Gambar 1.5 Peta Arsitektur Ilmu Ekonomi 13
Gambar 6.1 Kurva *Total Product (TP), Average Product (AP), dan Marginal Product (MP)* 108
Gambar 6.2 Kurva *isoquant dan isocost* 113
Gambar 6.3 Kurva Biaya Jangka Pendek 118
Gambar 6.4 Kurva Biaya Jangka Panjang 121
Gambar 7.1 (a) Kurva Permintaan Industri (b) Kurva Permintaan Perusahaan 137
Gambar 7.2 Kurva Maksimisasi *Profit* Pasar Persaingan Sempurna 138
Gambar 7.3 Perusahaan Pada Posisi *Shut Down Point* 139
Gambar 7.4 Grafik Keseimbangan Pasar Monopolistik..... 150
Gambar 12.1 Alur Perdagangan Internasional 259
Gambar 12.2 Dampak Globalisasi 264
Gambar 12.3 Peran Lembaga Internasional 265
Gambar 12.4 Neraca Pembayaran 267
Gambar 12.5 Dampak Pelemahan Rupiah 270

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan sistem ekonomi dapat dilihat dari tingkat kebebasan mekanisme pasar yang diberikan..... 34
Tabel 6.1 Konsep-Konsep Dasar Produksi (TP, AP, dan MP) . 111
Tabel 7.1 Zona Keputusan Perusahaan Pada Berbagai Kondisi Harga dan Biaya Variabel Rata-Rata 140
Tabel 12.1 Perbandingan Teori Perdagangan Internasional.... 260
Tabel 12.2 Bentuk Kebijakan Perdagangan Internasional..... 261

BAB 1
RUANG LINGKUP DAN KONSEP DASAR ILMU EKONOMI

Dr. Zumi Saidah, S.P., M.Si.

1.1 Hakikat Ilmu Ekonomi dan Perkembangannya

Secara sederhana pada bagian ini ingin menjelaskan mengapa ekonomi munscul sebagai ilmu. Jika kita telususru lebih jauh maka ilmu ekonomi muncul sebagai suatu disiplin ilmu didasarkan pada kebutuhan manusia untuk memecahkan masalah kesenjangan antara keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas

Sebagai disiplin ilmu, ekonomi berkembang untuk mempelajari tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas (*scarcity*) tersebut agar tercapai kemakmuran. Formalisasi ekonomi sebagai ilmu sering dikaitkan dengan penerbitan buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* oleh Adam Smith pada tahun 1776. Karya ini meletakkan dasar analisis sistematis mengenai pasar, pembagian kerja, produktivitas, dan perdagangan bebas.

Secara historis, pemikiran ekonomi telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno, abad pertengahan, hingga era Merkantilis dan Fisiokrat. Aristotle (Yunani Kuno) membahas ilai guna (kegunaan suatu barang) dan nilai tukar

(kemampuan barang untuk ditukarkan dengan barang lain), Thomas Aquinas (abad pertengahan) mengemukakan konsep harga yang adil ((*just price*), François Quesnay (Era Fisiokrat, Abad ke-18) menjelaskan aliran pendapatan ekonomi. Pemikiran-pemikiran ekonomi ini lah yang emnjadi pondasi yang disempurnakan oleh Adam Smith dan para ekonom klasik hingga menjadi ekonomi modern.

Jauh sebelum tahun 1776, berbagai tokoh telah membahas persoalan ekonomi seperti perdagangan, harga, kekayaan, dan distribusi. Namun pembahasannya masih tersebar dalam filsafat, etika, atau kebijakan kerajaan, belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Adam Smith bukan yang pertama berbicara soal ekonomi, tetapi ia yang pertama menyusun ekonomi sebagai sistem ilmu yang terstruktur. Adam Smith disebut sebagai Bapak Ekonomi karena ia berhasil mengubah ekonomi dari cabang filsafat menjadi ilmu pengetahuan empiris yang berdiri sendiri.

Adapun gagasan dan kontribusi utamanya dalam ilmu ekonomi antara lain:

1. **Konsep tangan gaib (*invisible hand*).** Smith meyakini pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri secara efisien melalui penawaran dan permintaan tanpa perlu campur tangan berlebihan dari pemerintah. Namun perlu di pahami bahwa Adam Smith tidak mendukung pasar tanpa aturan sepenuhnya. Smith tetap mengakui peran negara dalam hukum, pertahanan, dan infrastruktur.

2. **Pembagian kerja (*division of labor*).** Smith memperkenalkan gagasan bahwa spesialisasi tugas dalam produksi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara drastis. Maknanya spesialisasi dianggap mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya produksi, dan dasar industrialisasi modern.
3. **Mendefinisikan kekayaan negara.** Pada masa itu berkembang paham Merkantilisme, yang menganggap kekayaan negara diukur dari cadangan emas dan surplus perdagangan. Adam Smith menolak gagasan ini. Menurutnya, kekayaan suatu negara berasal dari kemampuan memproduksi barang dan jasa, produktivitas tenaga kerja, efisiensi pembagian kerja, dan perdagangan yang bebas.

Spesialisasi kerja merupakan pemusatan keterampilan, sumber daya, atau tugas individu pada satu bidang tertentu guna mencapai efisiensi maksimal. Dalam ekonomi suatu negara, ini mendorong skala ekonomi, memungkinkan produksi massal yang lebih murah, dan mendorong inovasi. Dalam teori organisasi, spesialisasi kerja menuntut adanya formalisasi yang tinggi untuk menyatukan berbagai tugas. Dalam ilmu ekonomi, seiring berkembangnya spesialisasi (misalnya munculnya ekonometrika atau ekonomi perilaku), fenomena yang diteliti menjadi sangat kompleks. Untuk menghindari ambiguitas, para ekonom melakukan formalisasi menggunakan perangkat matematis dan statistika agar

berbagai bidang yang spesifik tersebut tetap memiliki bahasa baku yang terukur seperti yang terlihat pada gambar berikut.

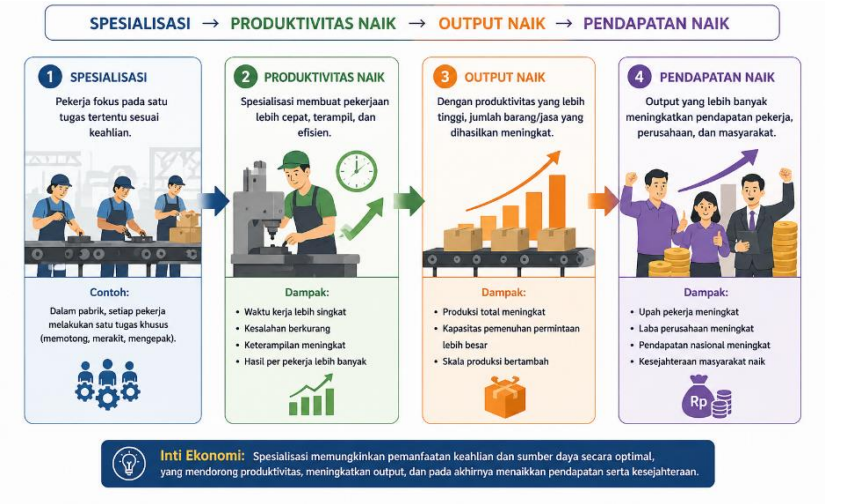

Gambar 1.1 Formalisasi Ilmu Ekonomi (logika sebab-akibat)

Gambar 1.1 menjelaskan rantai sebab-akibat ekonomi yang menunjukkan bagaimana spesialisasi kerja dapat mendorong peningkatan kesejahteraan. Di mana spesialisasi kerja meningkatkan produktivitas melalui efisiensi dan peningkatan keterampilan. Produktivitas yang lebih tinggi mendorong kenaikan *output*, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan pekerja, perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhan. Spesialisasi memungkinkan tenaga kerja dan sumber daya digunakan lebih efisien. Efisiensi tersebut menaikkan produktivitas, meningkatkan *output*, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan serta kesejahteraan.

Bagian pertama (spesialisasi) menunjukkan bahwa perkeja fokus pada satu tugas tertentu sesuai dengan keahliannya. Mengapa ini penting? Jika setiap orang mengerjakan semua proses sendiri, pekerjaan akan lambat. Namun bila dibagi sesuai keahlian, pekerjaan menjadi lebih cepat dan teratur. Maknanya secara ekonomi spesialisasi berarti pembagian kerja (*division of labor*).

Karena perkerja mengerjakan tugas yang sama secara berulang maka pekerja akan semakin terampil, waktu kerja lebih efisien, kesalahan berkurang, penggunaan alat lebih otimal akibatnya hasil per pekerja meningkat. Contoh jika sebelum spesialisasi 1 pekerja menghasilkan 5 unit per hari, maka sesudah spesialisasi 1 pekerja menghasilkan 15 unit per hari. Artinya produktivitas sama dengan ouput per unit tenaga kerja.

Jika produktivitas naik, maka jumlah barang/jasa yang dihasilkan juga meningkat. Perusahaan akan mampu memenuhi permintaan pasar, biaya rata-rata turun, skala produksi membesar.

Ketika *output* meningkat, maka pendapatan juga cenderung naik bagi pekerja hal ini merupakan upah yang meningkat disertai bonus produksi. Sedangkan bagi perusahaan laba perusahaan akan meningkat. Bagi negara hal ini masukan bagi pendapatan nasional dan pajak bertambah. Bagi masyarakat lapangan kerja bertambah dan kesejahteraan meningkat.

Jika kita lihat hubungannya dengan teori Adam Smith maka jelas bahwa pembagian kerja merupakan sumber utama kemakmuran suatu negara karena mampu meningkatkan keterampilan pekerja, menghemat waktu perpindahan tugas dan mendorong penggunaan mesin dan inovasi.

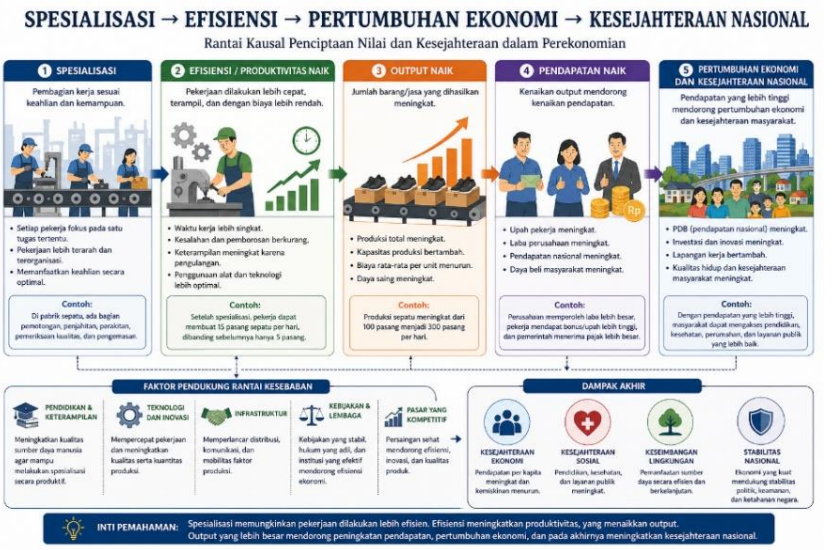

Gambar 1.2 Rantai Kausal Pembangunan Ekonomi

Gambar 1.2 menjelaskan rantai kausal pembangunan ekonomi, yaitu bagaimana spesialisasi tenaga kerja dapat berkembang menjadi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan nasional. Ini merupakan pengembangan dari teori klasik Adam Smith mengenai *division of labor* (pembagian kerja), tetapi diperluas hingga dampak makroekonomi modern.

Artinya, ketika masyarakat dan perusahaan bekerja secara terorganisasi sesuai keahlian, maka produktivitas meningkat. Produktivitas yang tinggi menaikkan produksi, memperbesar pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Spesialisasi tenaga kerja menciptakan efisiensi produksi. Efisiensi meningkatkan *output* dan pendapatan. Jika didukung pendidikan, teknologi, infrastruktur, dan kebijakan yang baik, proses ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan nasional.

Gambar 1.2 tersebut juga menggambarkan mekanisme pembangunan ekonomi di mana spesialisasi mendorong efisiensi dan produktivitas. Peningkatan produktivitas memperbesar *output* dan pendapatan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Gambar 1.3 Rantai Kausal Pembangunan Ekonomi

Gambar 1.3 menjelaskan dua jalur pembangunan ekonomi yang saling berlawanan yaitu rantai positif dan rantai negatif. Ranatai positif ketika spesialisasi, efisiensi, dan produktivitas berjalan baik maka tercipta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Sedangkan rantai nrgatif ketika spesialisasi gagal maka muncul inefisiensi, *output* rendah, pendapatan rendah, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi.

Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi otomatis, tetapi bergantung pada kualitas sistem ekonomi, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan. Negara yang mampu membangun spesialisasi, produktivitas, dan efisiensi akan tumbuh lebih cepat dan lebih sejahtera. Sebaliknya, negara yang gagal mengelola tenaga

kerja, teknologi, dan kebijakan akan terjebak dalam kemiskinan dan stagnasi.

1.2 Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi: Mikro, Makro, dan Internasional

Ilmu ekonomi memiliki arsitektur keilmuan yang luas, mencakup aktor ekonomi, pendekatan mikro dan makro, metodologi analisis, serta cabang-cabang terapan seperti ekonomi publik, internasional, moneter, dan pembangunan wilayah (Gambar 1.1).

Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Fokus utamanya mencakup bagaimana keputusan individu tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang/jasa, yang pada akhirnya menentukan tingkat harga di pasar.

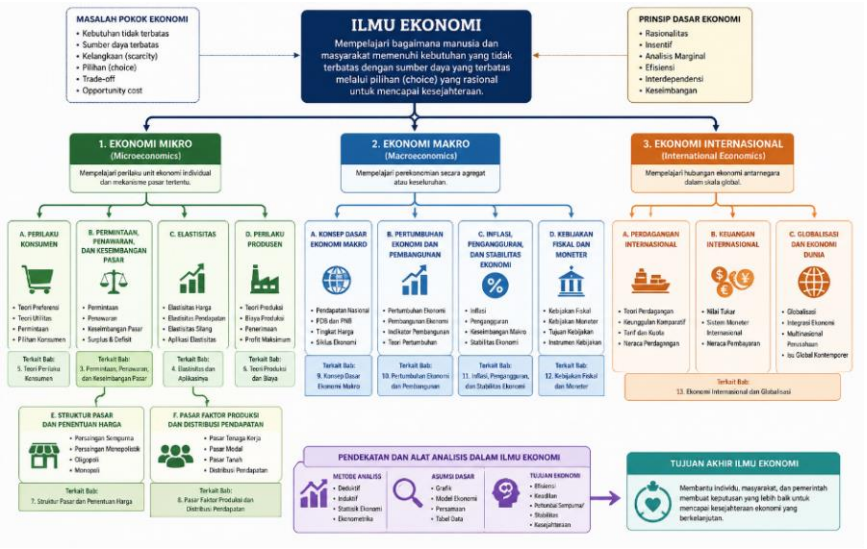

Gambar 1.4 Peta Besar Cabang Ilmu Ekonomi

Untuk menjawab bagaimana pasar terbentuk, apa yang memengaruhi keputusan konsumen, bagaimana barang diproduksi, hingga bagaimana pasar itu sendiri beroperasi dapat dipahami lebih lanjut pada bab berikutnya dalam buku ini.

Seperti pada Bab 3 yang menjelaskan fondasi dasar interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Menunjukkan hukum permintaan (harga naik, permintaan turun) dan hukum penawaran (harga naik, penawaran naik). Pertemuan keduanya akan membentuk titik keseimbangan (ekuilibrium), yakni titik di mana harga dan kuantitas barang yang disepakati pembeli dan penjual sama besar.

Bab 4 fokus pada pengukuran tingkat kepekaan pasar terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Menganalisis seberapa besar jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akan berubah jika harga berubah. Ini sangat penting bagi produsen untuk menentukan strategi penetapan harga (*pricing strategy*) dan estimasi total pendapatan.

Membedah dasar dari sisi permintaan dari sudut pandang konsumen individu dibahas lengkap pada Bab 5. Mempelajari bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan (utilitas) dari pendapatan yang terbatas. Di sini dianalisis bagaimana kurva permintaan individu terbentuk melalui pendekatan kurva indiferens (*indifference curve*) dan utilitas marjinal (*marginal utility*).

Membedah dasar dari sisi penawaran dari sudut pandang produsen disajikan pada Bab 6 tentang produksi dan biaya. Menganalisis hubungan antara jumlah *input* (faktor produksi) yang digunakan dan *output* (barang yang dihasilkan). Bab ini juga membahas struktur biaya produksi (biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marjinal) yang menjadi acuan produsen dalam menetapkan harga jual minimum agar tidak rugi.

Tempat bertemunya perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam skala industri mempelajari tentang struktur pasar yang dikupas tuntas pada Bab 7. Mengklasifikasikan pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk industri, dan jenis produk. Terdapat empat bentuk utama, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik.

Terakhir pada Bab 8 membahas penyediaan sarana yang memungkinkan proses produksi terjadi. Berbeda dengan pasar barang konsumsi di mana konsumen adalah pembeli, di pasar ini perusahaan berperan sebagai pembeli (permintaan) untuk faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah, sementara rumah tangga bertindak sebagai penjual (penawaran).

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan perekonomian secara keseluruhan (agregat). Ruang lingkupnya mencakup isu-isu skala besar seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca perdagangan.

Konsep dasar ekonomi makro dibahas di Bab 9 yang merupakan fondasi utama yang mempelajari ukuran-ukuran agregat (total). Hal ini mencakup indikator Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengukur total produksi, pendapatan nasional, tingkat konsumsi, investasi, serta siklus bisnis suatu negara.

Inflasi dan pengangguran merupakan dua masalah utama ekonomi jangka pendek (Bab 10). Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, sedangkan pengangguran mencerminkan tidak terserapnya angkatan kerja. Dalam makroekonomi, terdapat teori seperti Kurva Phillips yang menunjukkan bahwa kedua hal ini sering memiliki hubungan berbanding terbalik (*trade-off*) dalam jangka pendek.

Kebijakan fiskal dan moneter pada Bab 11 berfungsi sebagai alat kendali (*stabilizer*) makroekonomi. Kebijakan fiskal dikelola oleh pemerintah melalui APBN (mengatur pajak dan pengeluaran) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau mengerem laju inflasi. Sedangkan kebijakan moneter dikelola oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga demi menjaga kestabilan nilai tukar dan mengendalikan harga.

Ekonomi internasional mempelajari interaksi ekonomi antarnegara yang mencakup empat pilar utama: perdagangan, valuta asing, globalisasi, dan neraca pembayaran. Keempat elemen ini saling berkaitan erat dalam sistem perekonomian terbuka, di mana arus barang, jasa, dan modal mengalir melintasi batas-batas territorial.

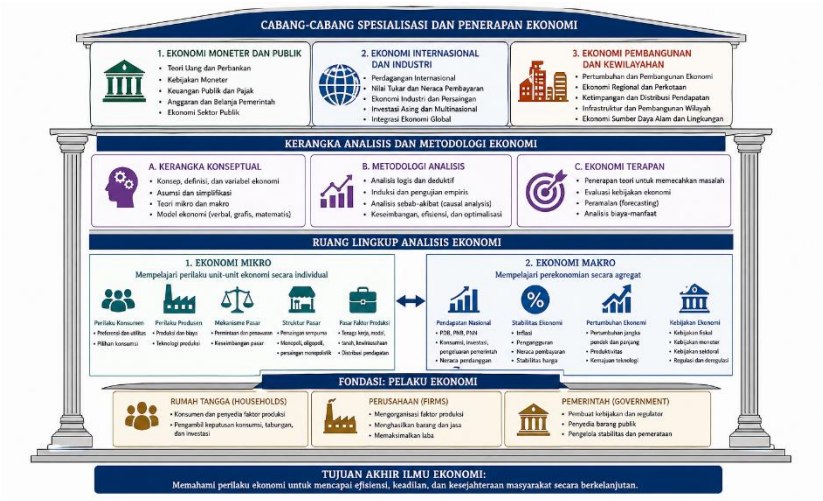

Gambar 1.5 Peta Arsitektur Ilmu Ekonomi
(Struktur, Ruang Lingkup, & Cabang-cabang Penerapan)

Gambar "*Mapping the Architecture of Economics*" menggambarkan ilmu ekonomi sebagai bangunan pengetahuan yang tersusun sistematis, di mana setiap bagian saling mendukung. Analogi bangunan ini menunjukkan bahwa ekonomi bukan sekadar teori tentang uang atau pasar, tetapi disiplin ilmu yang memiliki fondasi, pilar, struktur analisis, dan cabang terapan.

Bangunan dibagi menjadi 4 lapisan utama:

1. *Economic Actors* (Pelaku Ekonomi)

   Bagian paling bawah menunjukkan bahwa ekonomi berawal dari aktor ekonomi sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi. Terdapat 3 aktor utama pada fondasi ini yaitu *households & society* (rumah tangga dan masyarakat), *companies/producers* (perusahaan/ produsen), dan *government* & *international* (pemerintah dan dunia internasional). Seluruh analisis ekonomi selalu kembali kepada interaksi tiga aktor ini.

2. *Structural Framework & Methodology* (Kerangka Struktural & Metodologi)

   Ini adalah kerangka utama ilmu ekonomi, yaitu teori dan metode untuk memahami fenomena ekonomi. Ekonomi *cause and effect* mencoba menjelaskan hubungan sebab-akibat seperti ketika harga naik maka permintaan akan turun, ketika suku bunga naik akibatnya investasi turun, subsidi naik maka produksi meningkat. Ekonomi terapan merupakan teori yang diterapkan untuk memecahkan masalah nyata seperti kemiskinan,

pengangguran, inflasi, dan pembangunan daerah. Dari sisi metodologi ilmu ekonomi biasanya menggunakan konsep, asumsi dan model teoritis.

3. *Micro vs Macro Scope* (ruang lingkup analisis)
   Micro scope mempelajari perilaku unit ekonomi individu seperti konsumen, perusahaan, pasar tertentu dan penentuan harga. *Macro scope* mempelajari perekonomian agregat seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
4. *Specialized Fields & Applied Branches* (cabang lanjutan di puncak)
   Setelah fondasi dan teori kuat, ekonomi berkembang menjadi cabang-cabang spesialisasi. Beberapa diantaranya seperti *monetary* & *public economics* yang membahas tentang uang, bank sentral, pajak, dan anggaran pemerintah. *International* & *industrial* membahas tentang perdagangan global, nilai tukar, industri, dan struktur pasar. *Regional development* membahas tentang pembangunan wilayah, ketimpangan daerah, urbanisasi, dan ekonomi regional.

Artinya, ilmu ekonomi dibangun dari perilaku pelaku ekonomi, dianalisis dengan teori dan metode tertentu, lalu berkembang menjadi berbagai bidang khusus untuk menyelesaikan masalah nyata.

1.3 Prinsip Dasar dan Cara Berpikir Ekonomi

Prinsip dasar ekonomi adalah pedoman bertindak dalam menghadapi keterbatasan sumber daya guna memenuhi kebutuhan manusia. Cara berpikirnya berpusat pada pengambilan keputusan yang rasional, di mana setiap pilihan selalu memiliki pengorbanan dan manfaat yang harus diukur secara cermat.

Apa yang dimaksud dengan logika ekonomi? Logika ekonomi adalah cara berpikir yang rasional, sistematis, berbasis sebab-akibat, mempertimbangkan biaya dan manfaat, serta memahami bahwa sumber daya terbatas. Ekonom selalu bertanya "*Jika suatu pilihan diambil, apa konsekuensinya*?"

Contoh: jika harga cabai naik:

1. Apakah permintaan turun?
2. Apakah petani akan menanam lebih banyak?
3. Bagaimana dampaknya terhadap inflasi?

Ini adalah cara berpikir ekonomi.

Melatih cara berpikir ekonomi (*economic thinking*) sangat krusial agar memiliki kemampuan analisis yang tajam dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas (seperti waktu, uang, dan energi) secara efisien untuk memaksimalkan hasil dan kesejahteraan.

Ekonomi bukan hanya kumpulan teori, tetapi alat analisis kehidupan nyata. Ilmu ekonomi adalah lensa terbaik untuk membedah bagaimana kita membuat keputusan sehari-hari, mulai dari mengelola anggaran bulanan, merespons kenaikan harga (inflasi), hingga memahami arah kebijakan publik.

Cara berpikir ekonom berpusat pada analisis rasional untuk memahami bagaimana manusia membuat keputusan di tengah keterbatasan sumber daya. Berikut prinsip-prinsip utama cara ekonom berpikir:

- Berpikir pada margin (*thinking at the margin*)
  Ekonom menganalisis keputusan berdasarkan manfaat dan biaya tambahan (*marginal*) dari satu unit ekstra yang dikonsumsi atau diproduksi, bukan sekadar total rata-ratanya.
- *Ceteris paribus*
  Asumsi "hal-hal lain dianggap sama". Prinsip ini digunakan untuk mengisolasi dampak dari satu variabel tertentu dengan mengabaikan perubahan pada faktor-faktor lainnya.
- Hubungan sebab akibat (*causation*)
  Membedakan antara korelasi (dua hal yang terjadi bersamaan) dan kausalitas (satu hal yang benar-benar menyebabkan terjadinya hal lain), untuk menghindari kesimpulan yang keliru.
- Model ekonomi
  Penyederhanaan realitas biasanya berupa grafik, persamaan matematis, atau diagram, yang digunakan untuk memahami bagaimana variabel ekonomi saling berinteraksi.
- Asumsi dalam ekonomi
  Landasan yang disederhanakan agar teori dan model dapat diterapkan serta diuji.

Pilar utama dalam riset ekonomi untuk memahami fenomena dan perilaku pasar secara komprehensif dapat menggunakan beberapa metode analisis, seperti:

- Pendekatan deduktif
  Metode analisis yang bergerak dari teori atau premis umum menuju kesimpulan khusus. Dalam ekonomi, ini digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan teori yang sudah mapan (misalnya: hukum permintaan).
- Pendekatan induktif
  Metode analisis yang mengumpulkan data atau fakta spesifik di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan atau teori umum. Ini sangat berguna untuk melihat tren atau pola ekonomi yang baru.
- Data kuantitatif dan kualitatif
  - *Kuantitatif:* Data berupa angka yang dapat diukur (seperti PDB, inflasi, dan angka pengangguran) untuk analisis statistik.
  - *Kualitatif:* Data deskriptif (seperti kebijakan pemerintah, wawancara konsumen, dan sentimen pasar) untuk memahami konteks sosial-ekonomi.
- Grafik dan kurva ekonomi
  Alat visualisasi matematis untuk menyederhanakan hubungan antarvariabel ekonomi (misalnya: kurva IS-LM) dalam makroekonomi atau kurva penawaran dan permintaan seperti pada rumus ($Q_d = a - bP$).

Kombinasi keempat metode ini memungkinkan analisis ekonomi menjadi lebih akurat, baik secara teoretis maupun

empiris. Perkembangan cara berpikir ekonomi modern bergeser dari fokus pada produksi dan penawaran bebas (klasik) menuju pendekatan yang lebih holistik. Pemikiran saat ini menekankan efisiensi pasar, intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas (Keynesian), perilaku psikologis pelaku ekonomi (ekonomi perilaku), hingga keberlanjutan lingkungan dan teknologi

Perkembangan cara berpikir ekonomi modern menunjukkan bahwa analisis ekonomi tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, dan tantangan global kontemporer (Noguera-Méndez *et al*., 2024).

1.4 Ilmu Ekonomi dalam Konteks Kontemporer

Ilmu ekonomi di era kontemporer adalah pilar utama dalam membedah fenomena modern seperti disrupsi teknologi, transisi energi hijau, dan krisis global. Ilmu ini bukan sekadar teori usang, melainkan alat analitis yang sangat relevan untuk merancang solusi kebijakan, bisnis, dan strategi bertahan hidup sehari-hari.

Oleh karena itu, ilmu ekonomi tidak lagi dipandang sebagai teori konvensional semata, tetapi sebagai alat strategis untuk merancang kebijakan publik, mengembangkan model bisnis inovatif, serta membantu masyarakat dan negara beradaptasi terhadap perubahan dunia yang cepat dan penuh ketidakpastian.

Peran ekonomi saat ini seperti ekonomi digital (*digital economy*), E-commerce, Fintech, ekonomi hijau (*green economy*), ekonomi sirkular (*circular economy*) dan ekonomi berbagi (*sharing economy*), perannya saling beririsan. Di mana satu sistem ekonomi modern dapat menjadi bagian dari sistem lainnya. Misalnya, *platform e-commerce* menggunakan fintech untuk pembayaran digital, sekaligus mulai menerapkan prinsip *green economy* melalui pengurangan limbah kemasan dan efisiensi distribusi.

Kajian mengenai *digital economy* oleh Raihan (2024) menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan inovasi, namun juga memunculkan tantangan baru terkait keberlanjutan, ketimpangan digital, dan perubahan struktur pasar kerja modern. Ekonomi digital tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi teknologi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Meskipun ekonomi digital memberikan berbagai peluang, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital, perubahan struktur tenaga kerja, dan isu keberlanjutan lingkungan.

Seluruh perkembangan ekonomi kontemporer muncul sebagai respons terhadap perubahan global yang semakin kompleks. Munculnya berbagai tantangan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, krisis pangan, pengangguran teknologi, inflasi global, perubahan iklim, dan disrupsi pasar

tenaga kerja. Di satu sisi, model-model ekonomi modern menawarkan solusi baru yang lebih efisien dan inovatif, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baru.

Menurut penelitian Rosário & Dias (2023), perkembangan ekonomi digital mendorong transformasi ekonomi global sekaligus menuntut pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan modern. Ilmu ekonomi kontemporer menjadi alat analisis penting dalam memahami perubahan global yang dipengaruhi teknologi dan keberlanjutan. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat secara global. Pertumbuhan ekonomi modern tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya.

Selain itu juga terdapat enam tantangan modern ini merupakan krisis sistemik yang saling berkaitan dan menuntut solusi lintas sektoral. Untuk menavigasi dinamika tersebut, diperlukan pemahaman atas akar masalah serta strategi adaptasi yang berfokus pada ketahanan ekonomi dan kesetaraan.

Bab ini menjadi fondasi untuk memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya, terutama mengenai mekanisme pasar, perilaku konsumen, produksi, kebijakan ekonomi, dan dinamika ekonomi global. Pemahaman terhadap ruang lingkup dan konsep dasar ilmu ekonomi akan membantu pembaca melihat bahwa ekonomi bukan sekadar teori,

melainkan alat analisis yang sangat penting dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan kehidupan modern.

REFERENSI

Noguera-Méndez, P., Molera, L., & Semitiel-García, M. (2024). Integrating sustainability in the economics curriculum: Challenges and impact on future decision-makers. *Oeconomia Copernicana*, *15*(3), 871-923.

Gregory, M. N. (2009). Principles of Economics/N. Gregory Mankiw. *Mason: South–Western Cengage learning, 2009.–856 p*.

Raihan, A. (2024). A review of the potential opportunities and challenges of the digital economy for sustainability. *Innovation and Green Development*, *3*(4), 100174.

Rosário, A. T., & Dias, J. C. (2023). The new digital economy and sustainability: Challenges and opportunities. *Sustainability*, *15*(14), 10902.

Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2009). *EBook: Economics*. McGraw Hill.

Smith, A. (1869). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, volume 1* (Vol. 1). Oxford: Clarendon Press.

The CORE Econ team (2024). The Economy 2.0. An open-access textbook for any first course in economics, whether principles, micro, or macro. CORE Econ (Curriculum Open-access Resources in Economics) https://books.core-econ.org/the-economy/index.html?utm_source=chatgpt.com

BAB 2
SISTEM EKONOMI DAN MEKANISME PASAR

Dr. Meisanti., S.P., M.P.

2.1 Pengertian dan Hakikat Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar telah didefinisikan oleh berbagai ekonom dengan penekanan yang berbeda, meskipun memiliki inti yang sama. N. Gregory Mankiw (2021) memandang mekanisme pasar sebagai suatu sistem di mana harga berfungsi sebagai "tangan tak terlihat" yang mengoordinasikan keputusan individu sehingga tercapai alokasi sumber daya yang efisien. Pandangan ini sejalan dengan gagasan klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, yang menekankan bahwa interaksi bebas antar individu yang mengejar kepentingan pribadi dapat menghasilkan keteraturan ekonomi tanpa perlu perencanaan terpusat. Berbeda dengan pendekatan tersebut, Hal R. Varian (2019) menekankan mekanisme pasar sebagai sistem komunikasi berbasis harga, di mana perubahan harga menyampaikan informasi mengenai kelangkaan dan preferensi sehingga pelaku ekonomi dapat menyesuaikan perilakunya secara rasional. Sementara itu, Joseph E. Stiglitz (2019) memberikan perspektif yang lebih kritis dengan menyoroti bahwa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan

hasil yang efisien akibat adanya kegagalan pasar, seperti eksternalitas dan asimetri informasi. Dengan demikian, perbandingan pandangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak hanya dapat dipahami sebagai alat alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai sistem koordinasi sosial yang memiliki keterbatasan dan memerlukan dukungan institusi untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar adalah konsep dasar yang menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi terjadi tanpa dikendalikan oleh pemerintah namun oleh kebebasan individu melalui interaksi konsumen dan produsen sebagai pelaku ekonomi. Sebagai contoh, apabila terjadi kelangkaan produksi maka produsen akan menaikkan harga oleh langkanya barang yang tersedia. Tindakan ini bukan atas arahan pemerintah namun merupakan keputusan sendiri untuk mencapai efisiensi. Dalam kerangka konseptual, mekanisme pasar tidak hanya dimaknai sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi sebagai suatu sistem sosial-ekonomi yang mengatur alokasi sumber daya yang langka melalui sinyal harga (Mankiw, 2021).

Secara filosofis, gagasan mekanisme pasar berakar pada pemikiran ekonomi klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith. Ekonomi klasik meyakini bahwa individu yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi (self-interest) secara tidak langsung dapat mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keteraturan ekonomi tidak selalu memerlukan campur tangan

pemerintah, melainkan dapat muncul dari interaksi bebas individu dalam pasar. Mekanisme pasar bekerja terutama melalui *"invisible hand"* atau tangan-tangan yang tidak terlihat. Artinya tanpa adanya otoritas pemerintah pun, pasar akan tetap berjalan.

Contoh ekonomi klasik dapat dilihat pada pasar tradisional. Misalnya, ketika terjadi kelangkaan cabai akibat gagal panen, harga cabai di pasar tradisional akan meningkat. Kenaikan harga ini mendorong petani di daerah lain untuk menanam dan meningkatkan produksi cabai karena adanya insentif keuntungan. Di sisi lain, konsumen akan mengurangi konsumsi atau mencari barang substitusi. Tanpa adanya koordinasi terpusat, pasar secara alami bergerak menuju keseimbangan baru.

Dalam perspektif teori ekonomi modern, mekanisme pasar dipahami sebagai sistem koordinasi berbasis informasi. Harga berfungsi sebagai sinyal yang mencerminkan kondisi kelangkaan relatif suatu barang atau jasa. Ketika terjadi perubahan dalam preferensi konsumen atau ketersediaan sumber daya, harga akan menyesuaikan dan memberikan informasi kepada pelaku ekonomi untuk merespons perubahan tersebut (Varian, 2019). Dengan demikian, harga berperan sebagai alat komunikasi yang efisien dalam sistem ekonomi yang kompleks.

Peran lain harga adalah fungsinya sebagai insentif. Ketika harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan produksi karena adanya peluang keuntungan, sementara

dengan naiknya harga maka konsumen akan menyesuaikan pola konsumsi mereka. Dalam hal ini, mekanisme pasar mencerminkan prinsip rasionalitas ekonomi, di mana setiap pelaku berupaya memaksimalkan utilitas atau keuntungan di bawah keterbatasan yang dihadapi (Nicholson & Snyder, 2017).

Meskipun demikian, secara kritis perlu dipahami bahwa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dan adil. Teori kegagalan pasar (*market failure*) menunjukkan adanya kondisi di mana pasar gagal mencapai efisiensi Pareto, seperti dalam kasus eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi (Stiglitz, 2019). Dalam konteks ini, intervensi pemerintah menjadi penting untuk memperbaiki distorsi yang terjadi serta memastikan tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih luas. Campur tangan pemerintah contohnya pada bahan-bahan pangan (misalnya beras sebagai komoditas politik), bukan hanya untuk melindungi konsumen dengan memastikan beras tersedia dan dapat dijangkau masyarakat namun juga untuk memastikan beras dapat memberikan *profit* bagi produsen (petani). Ketika harga turun karena panen raya maka pemerintah menetapkan harga dasar (*floor price*) dan menyerap kelebihan produksi. Dengan demikian akan terbentuk keseimbangan permintaan dan penawaran yang baru. Demikian juga apabila harga naik karena beras langka/ terbatas maka pemerintah akan mengeluarkan beras yang

disimpan Bulog dan kebijakan harga atap akan menjaga konsumen tetap mampu menjangkau harga pasar.

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi kelembagaan, mekanisme pasar tidak dapat dipisahkan dari institusi yang melingkupinya. Aturan formal maupun informal, seperti hukum, norma sosial, dan struktur kelembagaan, berperan dalam membentuk cara pasar beroperasi (North, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa pasar bukanlah entitas yang sepenuhnya bebas. Pasar selalu dipengaruhi oleh aturan, budaya, dan struktur sosial di masyarakat, sehingga pasar sebenarnya "*embedded*" pada kehidupan sosial dan tidak berdiri sendiri secara bebas. Contoh sederhana di Indonesia, jual beli online berkembang karena ada aturan transaksi digital, sistem perbankan, dan kepercayaan masyarakat terhadap marketplace. Tanpa aturan hukum atau kepercayaan sosial, pasar akan sulit berjalan dengan baik karena penjualan secara online berpotensi menimbulkan banyak penipuan dan ketidakpastian.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, mekanisme pasar mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan globalisasi. Pasar digital, seperti platform e-commerce dan ekonomi berbasis aplikasi, telah mengubah cara interaksi antara penjual dan pembeli. Platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara cepat dan praktis tanpa harus bertemu langsung. Informasi mengenai harga, promo, dan produk juga dapat tersebar

dengan sangat cepat sehingga transaksi menjadi lebih efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, fenomena ini menurut Rochet & Tirole (2003) juga menimbulkan tantangan baru, seperti dominasi platform digital, monopoli data, serta meningkatnya asimetri informasi.Terdapat dominasi perusahaan platform digital yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar, penguasaan data pengguna dalam jumlah besar oleh perusahaan teknologi, serta terjadinya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika platform atau penjual tertentu memiliki informasi lebih banyak dibanding konsumen atau pelaku usaha kecil. Contohnya, marketplace dapat mengatur algoritma pencarian produk dan mengetahui kebiasaan belanja pengguna, sementara penjual kecil sering kesulitan memahami sistem tersebut sehingga persaingan menjadi tidak seimbang.

2.2 Mekanisme Pasar dalam Berbagai Sistem Ekonomi

Mekanisme pasar menjadi alat yang mengoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara seperti penentuan harga, produksi, dan distribusi barang. Meski demikian, bagaimana derajat kebebasan mekanisme pasar bekerja ditentukan oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara tersebut. Perbedaan sistem ekonomi mencerminkan perbedaan pandangan tentang bagaimana sumber daya yang langka seharusnya dialokasikan—apakah melalui kebebasan individu, kendali kolektif oleh negara, atau kombinasi keduanya. Dengan demikian, mekanisme pasar tidak hanya merupakan

konsep teknis, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai ideologis dan pilihan kebijakan publik.

2.2.1 Mekanisme Pasar dalam Sistem Kapitalisme

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar adalah proses penentuan harga, produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa, terutama dikendalikan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk memiliki modal, memproduksi barang, menentukan harga, serta bersaing demi memperoleh keuntungan. Peran pemerintah sangat minim dalam mencampuri pasar, hanya menjaga hukum, dan ketertiban di antara pelaku pasar. Akar filosofisnya bergantung pada pemikiran *Invisible hand* Adam Smith di mana pasar digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat. Secara teoritis, sistem ini diasosiasikan dengan efisiensi ekonomi karena kompetisi antar pelaku pasar mendorong inovasi dan penggunaan sumber daya secara optimal (Mankiw, 2021).

Praktik mekanisme pasar yang relatif dominan dapat dilihat pada sektor perdagangan digital dan ritel modern. Pada platform e-commerce, harga barang ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Penjual bersaing dalam harga, kualitas, dan layanan, sementara konsumen bebas memilih produk sesuai preferensi. Fenomena diskon, flash sale, dan perang harga mencerminkan dinamika

pasar yang kompetitif dan relatif bebas dari intervensi langsung pemerintah.

2.2.2 Mekanisme Pasar dalam Sistem Sosialis

Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis membatasi peran mekanisme pasar dan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara filosofis, sistem ini lahir dari kritik terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh pasar bebas, sebagaimana disoroti oleh pemikir seperti Karl Marx. Dalam sistem ini, alokasi sumber daya dilakukan melalui perencanaan terpusat dengan tujuan utama pemerataan dan keadilan sosial. Pemerintah menetapkan harga dengan tujuan untuk menghindari fluktuasi harga yang ekstrem dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Meskipun Indonesia bukan negara sosialis, pemerintah mengendalikan sektor-sektor strategis dan tidak menyerahkannya pada mekanisme pasar melalui penentuan harga. Contoh penetapan tarif listrik dan bahan bakar tertentu oleh pemerintah. Harga BBM bersubsidi tidak sepenuhnya mengikuti harga pasar global, melainkan ditetapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar “dibatasi” demi tujuan sosial.

2.2.3 Sistem Ekonomi Campuran (Kombinasi Pasar dan Intervensi)

Sebagian besar negara modern, termasuk Indonesia, menganut sistem ekonomi campuran, yaitu kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Secara teoritis, pendekatan ini berkembang dari kesadaran bahwa pasar tidak selalu sempurna dan dapat mengalami kegagalan (*market failure*), seperti eksternalitas, monopoli, dan asimetri informasi (Stiglitz, 2019). Dalam sistem ini, mekanisme pasar tetap digunakan untuk mencapai efisiensi, namun pemerintah hadir untuk mengoreksi kegagalan pasar, menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan

Kasus harga minyak goreng dan gula pasir menunjukkan praktik sistem campuran. Ketika harga melonjak akibat gangguan pasokan, pemerintah melakukan intervensi melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), operasi pasar dan subsidi, meski demikian, distribusi dan produksi tetap melibatkan mekanisme pasar. Ini menunjukkan bahwa pasar dan pemerintah bekerja secara simultan.

2.2.4 Perbandingan Tingkat Kebebasan Mekanisme Pasar

Perbedaan Tingkat kebebasan mekanisme pasar mencerminkan dilema antara efisiensi dan keadilan. Sistem kapitalisme cenderung unggul dalam efisiensi tetapi berpotensi menciptakan ketimpangan, sementara sistem sosialis menekankan pemerataan namun sering menghadapi masalah inefisiensi. Sistem campuran mencoba

menyeimbangkan keduanya, meskipun tidak selalu mudah mencapai keseimbangan optimal. Perbedaan sistem ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan sistem ekonomi dapat dilihat dari tingkat kebebasan mekanisme pasar yang diberikan

Aspek	Kapitalisme	Sosialisme	Campuran
Peran pasar	Sangat dominan	Terbatas	Moderat
Peran pemerintah	Minimal	Sangat besar	Signifikan
Penentuan harga	Pasar	Pemerintah	Kombinasi
Tujuan utama	Efisiensi	Pemerataan	Efisiensi & keadilan
Risiko	Ketimpangan	Inefisiensi	*Trade-off*

2.3 Peran Harga sebagai Sinyal dan Insentif

Harga dalam mekanisme pasar berfungsi tidak hanya sebagai nilai tukar suatu barang atau jasa, tetapi juga sebagai sinyal informasi dan alat insentif bagi pelaku ekonomi. Dalam sistem ekonomi berbasis pasar, harga menjadi media utama yang mengoordinasikan keputusan produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya. Tanpa perlu perintah langsung dari pemerintah, pelaku ekonomi dapat menyesuaikan perilakunya hanya dengan merespons perubahan harga. Harga dalam sistem ekonomi bekerja dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

2.3.1 Harga sebagai Indikator Kelangkaan

Salah satu fungsi utama harga adalah sebagai indikator kelangkaan (*scarcity indicator*). Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan merupakan kondisi di mana sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Harga menjadi representasi dari tingkat kelangkaan tersebut: semakin langka suatu barang, semakin tinggi harganya; sebaliknya, jika suatu barang melimpah, harganya cenderung rendah.

Sebagai indikator, harga menyampaikan informasi penting kepada pelaku ekonomi tanpa harus melalui komunikasi langsung. Perubahan harga sudah cukup untuk memberi tahu kondisi pasar kepada semua pihak. Contoh perubahan harga cabai. Ketika harga cabai naik, para konsumen memahami bahwa cabai sedang langka atau permintaannya meningkat. Konsumen kemudian mungkin mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Di sisi lain, petani melihat kenaikan harga sebagai peluang memperoleh keuntungan lebih besar. Akibatnya, banyak petani mulai menanam cabai lebih banyak. Pedagang juga berusaha mencari pasokan tambahan karena tahu barang tersebut sedang dibutuhkan pasar.

Semua tindakan tersebut adalah respon spontan pelaku pasar yaitu petani, pedagang, dan konsumen tanpa perlu bersepakat. Mereka cukup melihat perubahan harga di pasar lalu mengambil keputusan masing-masing. Inilah yang dimaksud harga menjadi alat komunikasi dalam sistem ekonomi kapitalis.

Secara sederhana, mekanismenya dapat digambarkan seperti berikut:

Permintaan naik atau barang langka
↓
Harga meningkat
↓
Produsen terdorong menambah produksi
↓
Pasokan bertambah
↓
Harga kembali stabil

Di Indonesia, ketika terjadi gangguan produksi akibat cuaca buruk atau gagal panen, pasokan cabai di pasar menurun. Akibatnya, harga cabai meningkat secara signifikan. Kenaikan harga ini bukan sekadar fenomena pasar, tetapi juga merupakan sinyal bahwa cabai menjadi barang yang relatif lebih langka dibandingkan sebelumnya.

Sebaliknya, ketika musim panen melimpah, pasokan cabai meningkat sehingga harga turun. Dalam kondisi ini, harga memberikan sinyal bahwa barang tersedia dalam jumlah banyak, sehingga tidak perlu ada upaya tambahan untuk meningkatkan produksi dalam jangka pendek. Di sinilah terlihat harga menjadi sinyal yang memberikan informasi kondisi kelangkaan cabai kepada seluruh pelaku ekonomi secara cepat dan efisien.

2.3.2 Harga sebagai Insentif bagi Produsen dan Konsumen

Selain sebagai indikator, harga juga berfungsi sebagai insentif yang memengaruhi perilaku ekonomi. Insentif adalah dorongan yang membuat individu atau perusahaan mengambil keputusan tertentu. Dalam konteks pasar, perubahan harga menciptakan insentif bagi produsen dan konsumen untuk menyesuaikan tindakan mereka.

1. Insentif bagi Produsen

   Bagi produsen, harga yang tinggi menjadi sinyal adanya peluang keuntungan. Ketika harga suatu barang meningkat, produsen terdorong untuk: 1) meningkatkan jumlah produksi; 2) Mengalihkan sumber daya dari produksi barang lain; 3) Masuk ke pasar baru.

   Kembali pada contoh cabai, kenaikan harga memberikan motivasi bagi petani untuk menanam lebih banyak cabai pada musim berikutnya. Bahkan petani yang sebelumnya menanam komoditas lain dapat beralih ke cabai karena melihat potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika harga suatu barang rendah, produsen akan mengurangi produksi atau bahkan keluar dari pasar karena tidak lagi menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa harga berfungsi sebagai mekanisme seleksi dalam kegiatan ekonomi.

2. Insentif bagi Konsumen

   Bagi konsumen, harga memengaruhi keputusan konsumsi. Ketika harga suatu barang meningkat, konsumen cenderung: mengurangi konsumsi, mencari

barang substitusi atau menunda pembelian. Sebagai contoh, ketika harga cabai melonjak tinggi, banyak rumah tangga di Indonesia mengurangi penggunaan cabai atau menggantinya dengan bahan lain. Sebaliknya, ketika harga turun, konsumsi meningkat karena barang menjadi lebih terjangkau. Dengan demikian, harga tidak hanya mengatur produksi, tetapi juga mengendalikan pola konsumsi masyarakat.

2.3.3 Fungsi Distribusi dan Alokasi Sumber Daya

Dalam fungsi distribusi, harga menentukan siapa yang memperoleh barang dan berapa jumlahnya. Individu yang memiliki daya beli lebih tinggi cenderung memperoleh akses lebih besar terhadap barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar mendistribusikan barang berdasarkan kemampuan ekonomi. Meskipun mekanisme ini efisien, secara kritis perlu diakui bahwa distribusi berbasis harga tidak selalu mencerminkan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah sering melakukan intervensi untuk memastikan akses terhadap barang kebutuhan pokok.

Dalam fungsi alokasi, harga mengarahkan bagaimana sumber daya dialokasikan antar sektor. Sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan lahan akan mengalir ke sektor-sektor yang memberikan keuntungan lebih tinggi, yang biasanya ditunjukkan oleh harga *output* yang tinggi. Sebagai contoh, ketika harga komoditas tertentu seperti kelapa sawit

meningkat di pasar global, banyak lahan pertanian di Indonesia dialihkan untuk produksi sawit. Hal ini menunjukkan bahwa harga tidak hanya memengaruhi keputusan jangka pendek, tetapi juga struktur ekonomi dalam jangka panjang.

REFERENSI

Mankiw, N. G. (2021) *Principles of Economics (9th ed.).* Cengage Learning.

Nicholson, W., & Snyder, C. (2017) *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions (12th ed.).* Cengage Learning.

North, D. C. (1990) *Institutions, Institutional Change and Economic Performance.* Cambridge University Press.

Rochet, J. C., & Tirole, J. (2003) Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association,* 1(4), 990–1029.

Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. *MetaLibri.* (Original work published 1776)

Stiglitz, J. E. (2019) *Economics of the Public Sector (4th ed.). W.* W. Norton & Company.

Varian, H. R. (2019). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (9th ed.).* W. W. Norton & Company

BAB 3
PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN KESEIMBANGAN

Dr. Dian Anggraeni, S.P., M.P.

3.1 Permintaan

3.1.1 Pengertian Permintaan

Setiap individu memiliki berbagai kebutuhan yang dipenuhi melalui konsumsi barang dan jasa yang tersedia di pasar. Aktivitas konsumsi tersebut menjadi dasar munculnya konsep permintaan dalam ilmu ekonomi.

Secara umum, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa permintaan tidak hanya mencerminkan keinginan membeli, tetapi juga kemampuan untuk melakukan pembelian. Dengan demikian, keinginan memiliki suatu barang tanpa didukung kemampuan finansial belum dapat dikategorikan sebagai permintaan dalam pengertian ekonomi.
Permintaan mencerminkan perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, selera, kebutuhan, dan kondisi ekonomi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang membutuhkan laptop akan mempertimbangkan harga, spesifikasi, dan kemampuan

keuangannya sebelum membeli. Ketika harga turun, keinginan untuk membeli cenderung meningkat, sedangkan kenaikan harga dapat mendorong konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau.

Dalam ekonomi mikro, permintaan memiliki peranan penting karena menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Bersama dengan penawaran, permintaan menjadi faktor utama yang menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar.

3.1.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan

Permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat berbagai faktor lain yang turut menentukan besar kecilnya permintaan masyarakat terhadap suatu produk.

1. Harga Barang Itu Sendiri

   Harga barang merupakan faktor yang paling langsung memengaruhi jumlah permintaan. Ketika harga suatu barang meningkat, konsumen cenderung mengurangi jumlah pembelian karena daya beli mereka menjadi relatif lebih rendah. Sebaliknya, ketika harga turun, konsumen cenderung meningkatkan jumlah pembelian. Sebagai contoh, apabila harga beras mengalami kenaikan yang signifikan, sebagian konsumen mungkin akan mengurangi konsumsi atau mencari alternatif bahan pangan lain yang lebih murah.

2. Tingkat Pendapatan Konsumen

Pendapatan menentukan kemampuan seseorang dalam membeli barang dan jasa. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk melakukan konsumsi. Untuk barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan. Sebaliknya, untuk barang inferior, peningkatan pendapatan justru dapat menyebabkan permintaan menurun karena konsumen beralih kepada produk yang kualitasnya lebih baik. Sebagai contoh, ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap kendaraan pribadi atau perangkat elektronik cenderung meningkat.

3. Selera dan Preferensi Konsumen

Perubahan selera masyarakat dapat menyebabkan perubahan permintaan meskipun harga barang tidak berubah. Perkembangan tren gaya hidup, promosi media, pengaruh tokoh publik, serta perubahan budaya dapat memengaruhi preferensi konsumen terhadap suatu produk. Sebagai contoh, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat telah meningkatkan permintaan terhadap makanan organik dan produk rendah gula.

4. Harga Barang Substitusi

Barang substitusi merupakan barang yang dapat saling menggantikan dalam memenuhi kebutuhan yang sama. Jika harga suatu barang meningkat, konsumen cenderung beralih ke barang substitusinya sehingga permintaan

terhadap barang pengganti meningkat. Sebagai contoh, kopi dan teh dapat dianggap sebagai barang substitusi. Jika harga kopi meningkat secara tajam, sebagian konsumen mungkin akan lebih banyak mengonsumsi teh.

5. Harga Barang Komplementer

   Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya saling melengkapi. Perubahan harga salah satu barang akan memengaruhi permintaan terhadap barang pasangannya. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan bakar dapat menurunkan penggunaan kendaraan pribadi sehingga permintaan terhadap kendaraan juga berpotensi menurun.

6. Jumlah Penduduk

   Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, semakin besar pula potensi permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Pertumbuhan populasi umumnya meningkatkan kebutuhan terhadap makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, dan layanan publik lainnya. Karena itu, perubahan demografi sering menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan bisnis maupun kebijakan ekonomi.

7. Ekspektasi terhadap Kondisi Masa Depan

   Harapan konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang dapat memengaruhi keputusan pembelian saat ini. Apabila masyarakat memperkirakan harga suatu barang akan naik pada masa depan, mereka cenderung membeli lebih banyak saat ini. Sebaliknya, jika diperkirakan harga akan turun, konsumen mungkin menunda

pembelian. Fenomena ini sering terlihat pada pasar properti, kendaraan, maupun produk elektronik.

3.1.3 Hukum Permintaan

Salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi mikro adalah hukum permintaan. Hukum ini menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan menyatakan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap (*ceteris paribus*), semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang diminta.

Hubungan tersebut bersifat negatif atau berlawanan arah. Ketika harga meningkat, daya beli konsumen menurun sehingga jumlah barang yang dibeli menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, ketika harga turun, konsumen dapat membeli lebih banyak barang dengan jumlah uang yang sama. Sebagai contoh, apabila harga tiket bioskop turun, lebih banyak orang akan tertarik menonton film karena biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih rendah. Namun apabila harga tiket meningkat, sebagian konsumen mungkin memilih alternatif hiburan lain yang lebih murah.

Hubungan antara harga dan jumlah yang diminta dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi:

$$Qd = f(P)$$

di mana:

Qd = jumlah yang diminta *(Quantity Demanded)*

P = harga barang *(Price)*

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa jumlah yang diminta dipengaruhi oleh tingkat harga yang berlaku.

3.1.4 Kurva Permintaan

Kurva permintaan merupakan representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Pada kurva permintaan, sumbu vertikal (Y) menunjukkan harga barang, sedangkan sumbu horizontal (X) menunjukkan jumlah barang yang diminta. Bentuk kurva permintaan umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta.

Sebagai ilustrasi, perhatikan data berikut:

Harga (Rp)	**Jumlah Diminta (Unit)**
25.000	100
20.000	200
15.000	300
10.000	400
5.000	500

Data tersebut menunjukkan bahwa ketika harga menurun, jumlah barang yang diminta meningkat. Jika data tersebut

digambarkan dalam grafik, akan terbentuk kurva permintaan yang bergerak turun dari kiri atas menuju kanan bawah.

Perubahan harga barang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan (*movement along the demand curve*). Sebaliknya, perubahan faktor selain harga, seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk, atau ekspektasi masa depan, menyebabkan pergeseran kurva permintaan (*shift of demand curve)*.

Pergeseran kurva ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan. Kondisi ini dapat terjadi akibat kenaikan pendapatan, bertambahnya jumlah penduduk, atau meningkatnya popularitas suatu produk. Sebaliknya, pergeseran kurva ke kiri menunjukkan penurunan permintaan yang dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan, perubahan tren, atau berkurangnya jumlah konsumen.

Pemahaman mengenai kurva permintaan sangat penting karena menjadi dasar dalam menganalisis perilaku konsumen serta memahami bagaimana harga pasar terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran.

Kurva Permintaan dan Pergeserannya

Kurva permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga (P) dan jumlah yang diminta (Q_d).
Perubahan faktor selain harga menyebabkan **pergeseran kurva permintaan.**

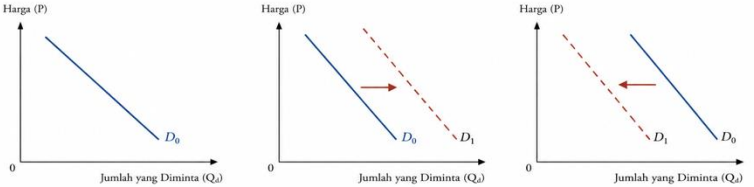

D_0 adalah kurva permintaan awal. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta.

Kurva bergeser ke kanan dari D_0 ke D_1 karena faktor selain harga meningkat (misalnya: pendapatan naik, selera meningkat, **jumlah penduduk bertambah,** ekspektasi harga naik).

Kurva bergeser ke kiri dari D_0 ke D_1 karena faktor selain harga menurun (misalnya: pendapatan turun, selera menurun, **jumlah penduduk berkurang,** ekspektasi harga turun).

Keterangan:
D_0 = Kurva permintaan awal
D_1 = Kurva permintaan baru
→ = Arah pergeseran kurva permintaan

Sumber: Diadaptasi dari *Principles of Microeconomics*, N. Gregory Mankiw.

3.1.5 Ringkasan

Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh harga barang, pendapatan, selera, harga barang terkait, jumlah penduduk, dan ekspektasi masa depan. Hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Hubungan tersebut digambarkan melalui kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bersama dengan penawaran, permintaan menjadi komponen utama dalam pembentukan keseimbangan pasar.

3.2 Penawaran

3.2.1 Pengertian Penawaran

Dalam kegiatan ekonomi, proses pertukaran melibatkan konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual. Jika permintaan menggambarkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa, maka penawaran menggambarkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang atau jasa tersebut di pasar.

Secara umum, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran tidak hanya menunjukkan jumlah barang yang tersedia, tetapi juga jumlah yang benar-benar ingin dipasarkan oleh produsen sesuai dengan kondisi harga yang berlaku.

Keputusan produsen dalam menentukan jumlah produksi sangat dipengaruhi oleh potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Ketika harga suatu barang meningkat, produsen cenderung meningkatkan produksi karena peluang keuntungan menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika harga menurun, produsen dapat mengurangi produksi atau mengalihkan sumber dayanya ke produk lain yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh, petani cabai biasanya meningkatkan produksi ketika harga cabai naik dan mengurangi produksi ketika harga turun dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, penawaran mencerminkan respons produsen terhadap perubahan kondisi pasar dan menjadi salah satu

faktor utama yang menentukan ketersediaan barang dan jasa dalam perekonomian.

3.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran

Meskipun harga merupakan faktor utama yang memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, dalam kenyataannya terdapat berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan perubahan penawaran. Faktor-faktor tersebut dapat menggeser keseluruhan kurva penawaran ke kiri atau ke kanan.

1. Harga Barang Itu Sendiri

   Harga barang merupakan faktor yang paling langsung memengaruhi keputusan produsen. Ketika harga suatu barang meningkat, produsen cenderung meningkatkan jumlah produksi karena potensi keuntungan menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika harga turun, produsen cenderung mengurangi jumlah produksi. Sebagai ilustrasi, perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan akan meningkatkan *output* apabila harga jual produknya naik dan biaya produksi relatif tetap. Kenaikan harga memberikan peluang untuk memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi.

2. Biaya Produksi

   Biaya produksi mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, transportasi, dan perawatan mesin. Ketika biaya produksi meningkat,

keuntungan produsen akan berkurang apabila harga jual tidak ikut naik. Akibatnya, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, apabila biaya produksi menurun, produsen dapat meningkatkan produksi karena biaya per unit menjadi lebih rendah. Contohnya, kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya distribusi sehingga perusahaan mengurangi jumlah produk yang dipasarkan untuk menjaga efisiensi operasional.

3. Kemajuan Teknologi

   Perkembangan teknologi memungkinkan produsen menghasilkan lebih banyak *output* dengan jumlah *input* yang sama. Teknologi yang lebih efisien dapat menurunkan biaya produksi, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Sebagai contoh, penggunaan mesin otomatis dalam industri manufaktur memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus menambah tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan penawaran meningkat.

4. Jumlah Produsen

   Semakin banyak produsen yang beroperasi dalam suatu industri, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Sebaliknya, apabila banyak perusahaan keluar dari pasar karena mengalami kerugian, jumlah barang yang tersedia akan berkurang sehingga penawaran menurun. Fenomena ini sering terlihat pada industri makanan dan

minuman. Ketika peluang keuntungan tinggi, banyak pelaku usaha baru memasuki pasar sehingga jumlah produk yang tersedia meningkat secara signifikan.

5. Harga Barang Terkait dalam Produksi

   Produsen sering kali memiliki alternatif produk yang dapat dihasilkan dengan sumber daya yang sama. Oleh karena itu, perubahan harga pada suatu produk dapat memengaruhi jumlah penawaran produk lainnya. Sebagai contoh, petani dapat menggunakan lahannya untuk menanam jagung atau kedelai. Jika harga jagung meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan harga kedelai, sebagian petani akan mengalihkan lahannya ke tanaman jagung. Akibatnya, penawaran kedelai menurun.

6. Ekspektasi Produsen terhadap Kondisi Masa Depan

   Keputusan produksi tidak hanya dipengaruhi kondisi saat ini, tetapi juga harapan mengenai kondisi ekonomi di masa mendatang. Apabila produsen memperkirakan harga akan meningkat pada masa depan, mereka mungkin menahan sebagian stok barang untuk dijual nanti. Sebaliknya, apabila diperkirakan harga akan turun, produsen cenderung segera menjual produknya sebelum nilai jual semakin rendah.

7. Kebijakan Pemerintah

   Pemerintah dapat memengaruhi penawaran melalui berbagai kebijakan seperti pajak, subsidi, regulasi lingkungan, atau kebijakan perdagangan. Pengenaan pajak produksi akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung produsen sehingga penawaran cenderung menurun.

Sebaliknya, pemberian subsidi dapat menurunkan biaya produksi sehingga produsen terdorong meningkatkan *output*. Sebagai contoh, subsidi pupuk bagi petani bertujuan meningkatkan produksi sektor pertanian sehingga pasokan bahan pangan menjadi lebih stabil.

3.2.3 Hukum Penawaran

Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hukum penawaran menyatakan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap (ceteris paribus), semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.

Hubungan ini bersifat positif atau searah. Kenaikan harga mendorong produsen meningkatkan produksi karena peluang memperoleh keuntungan lebih besar. Sebaliknya, penurunan harga mengurangi insentif produksi sehingga jumlah barang yang ditawarkan menurun.

Sebagai contoh, ketika harga kopi dunia meningkat, petani dan perusahaan perkebunan kopi akan berupaya meningkatkan produksi untuk memanfaatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Produksi dapat ditingkatkan melalui perluasan lahan, peningkatan produktivitas, maupun penambahan investasi.

Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum penawaran berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah. Jika

terjadi perubahan biaya produksi, kebijakan pemerintah, atau kondisi teknologi, maka hubungan sederhana antara harga dan jumlah yang ditawarkan dapat mengalami penyesuaian. Secara matematis, hubungan penawaran dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi:

$$Qs = f(P)$$

di mana:

Qs = jumlah yang ditawarkan *(Quantity Supplied)*

P = harga barang *(Price)*

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah yang ditawarkan merupakan fungsi dari harga.

3.2.4 Kurva Penawaran

Kurva penawaran merupakan representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kurva penawaran, sumbu vertikal (Y) menunjukkan tingkat harga, sedangkan sumbu horizontal (X) menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk kurva umumnya menanjak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan.

Sebagai contoh, perhatikan data berikut:

Harga (Rp)	Jumlah Ditawarkan (Unit)
5.000	100
10.000	200
15.000	300
20.000	400
25.000	500

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga diikuti oleh peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Jika data tersebut digambarkan dalam bentuk grafik, akan terbentuk kurva penawaran yang bergerak naik dari kiri ke kanan. Perubahan harga barang akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran *(movement along the supply curve)*. Sebaliknya, perubahan faktor selain harga, seperti teknologi, biaya produksi, atau jumlah produsen, akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran (*shift of supply curve*).

Pergeseran kurva ke kanan menunjukkan peningkatan penawaran. Kondisi ini dapat terjadi akibat kemajuan teknologi, penurunan biaya produksi, atau bertambahnya jumlah produsen. Sebaliknya, pergeseran kurva ke kiri menunjukkan penurunan penawaran yang dapat disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, bencana alam, atau berkurangnya jumlah produsen.

Pemahaman mengenai kurva penawaran sangat penting karena menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana pasar menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Kurva penawaran akan berinteraksi dengan kurva permintaan untuk membentuk mekanisme pasar yang menjadi fokus utama pembahasan berikutnya.

Kurva Penawaran dan Pergeserannya

Kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga (P) dan jumlah yang ditawarkan (Q_s).
Perubahan faktor selain harga menyebabkan pergeseran kurva penawaran.

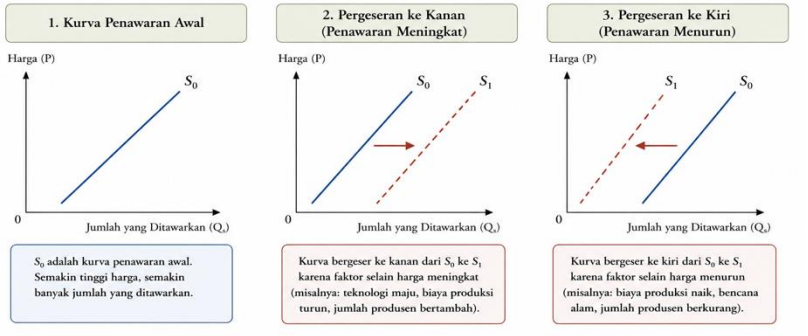

Keterangan:
S_0 = Kurva penawaran awal
S_1 = Kurva penawaran baru
→ = Arah pergeseran kurva penawaran

Sumber: Diadaptasi dari *Principles of Microeconomics*, N. Gregory Mankiw.

3.2.5 Ringkasan

Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Jumlah penawaran dipengaruhi oleh harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, harga barang terkait, ekspektasi masa depan, dan kebijakan pemerintah. Hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara harga

dan jumlah yang ditawarkan. Hubungan tersebut digambarkan melalui kurva penawaran yang umumnya menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva ini menjadi salah satu instrumen utama dalam memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana keseimbangan pasar terbentuk.

3.3 Keseimbangan Pasar

3.3.1 Konsep Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terjadi melalui interaksi antara konsumen dan produsen di pasar. Konsumen berusaha memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka, sedangkan produsen berusaha menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.

Secara umum, keseimbangan pasar adalah keadaan ketika jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pada kondisi ini tidak terdapat kecenderungan harga untuk naik atau turun karena keinginan pembeli dan penjual telah berada dalam keadaan yang seimbang.

Harga berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan keputusan konsumen dan produsen. Jika harga terlalu tinggi, jumlah yang ditawarkan akan melebihi jumlah yang diminta. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, jumlah yang diminta akan melebihi jumlah yang ditawarkan. Perbedaan tersebut akan mendorong penyesuaian harga hingga pasar kembali mencapai titik keseimbangan.

Dalam ekonomi mikro, proses penyesuaian otomatis ini dikenal sebagai mekanisme pasar (*market mechanism*), yaitu proses yang mengarahkan pasar menuju kondisi keseimbangan.

3.3.2 Penentuan Harga dan Kuantitas Keseimbangan

Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada harga tersebut, pasar berada dalam kondisi stabil karena tidak ada kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran.

Sementara itu, kuantitas keseimbangan adalah jumlah barang yang diperdagangkan pada harga keseimbangan tersebut. Secara grafis, titik keseimbangan diperoleh dari perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik perpotongan tersebut biasanya dilambangkan dengan huruf E (Equilibrium).

Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel berikut:

Harga (Rp)	Jumlah Diminta	Jumlah Ditawarkan
5.000	500	100
10.000	400	200
15.000	300	300
20.000	200	400
25.000	100	500

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada harga Rp15.000 jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama-sama sebesar 300 unit. Oleh karena itu, harga Rp15.000 merupakan harga keseimbangan, sedangkan 300 unit merupakan kuantitas keseimbangan.

Secara matematis, kondisi keseimbangan dapat dinyatakan sebagai:

$$Qd = Qs$$

di mana:

Qd = *Quantity Demanded* (jumlah yang diminta)

Qs = *Quantity Supplied* (jumlah yang ditawarkan)

Apabila diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran, harga keseimbangan dapat diperoleh dengan menyamakan kedua fungsi tersebut.

Sebagai contoh:

$Qd = 500 – 20P$

$Qs = 100 + 20P$

Karena pada kondisi keseimbangan berlaku Qd = Qs, maka:

$500 – 20P = 100 + 20P$

$400 = 40P$

$P = 10$

Substitusi ke salah satu fungsi menghasilkan:

$Q = 300$

Dengan demikian, harga keseimbangan adalah 10 dan kuantitas keseimbangan adalah 300 unit.

Pemahaman mengenai harga dan kuantitas keseimbangan sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai analisis

ekonomi, termasuk perumusan kebijakan pemerintah, strategi bisnis, dan pengambilan keputusan investasi.

3.3.3 *Excess Supply* (Kelebihan Penawaran)

Excess Supply atau kelebihan penawaran adalah kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu. Kondisi ini umumnya terjadi ketika harga pasar berada di atas harga keseimbangan.

Pada harga yang tinggi, produsen terdorong menawarkan lebih banyak barang, sementara konsumen mengurangi pembelian karena harga dianggap terlalu mahal. Akibatnya, sebagian barang tidak terjual dan terjadi surplus pasar.

Sebagai contoh, jika pada harga Rp20.000 jumlah yang ditawarkan adalah 400 unit dan jumlah yang diminta hanya 200 unit, maka surplus yang terjadi adalah:

Surplus = Qs − Qd
Surplus = 400 − 200
Surplus = 200 unit

Ketika terjadi surplus, persediaan barang akan menumpuk sehingga produsen cenderung menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Penurunan harga tersebut secara bertahap akan mengurangi surplus dan mengembalikan pasar menuju titik keseimbangan.

Dalam praktiknya, surplus sering terjadi pada komoditas pertanian saat musim panen raya, ketika produksi meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan pasar.

3.3.4 *Excess Demand* (Kelebihan Permintaan)

Excess Demand atau kelebihan permintaan adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Kondisi ini umumnya terjadi ketika harga pasar berada di bawah harga keseimbangan.

Pada harga yang relatif rendah, konsumen cenderung membeli lebih banyak barang, sedangkan produsen belum terdorong untuk meningkatkan produksi. Akibatnya, jumlah barang yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar sehingga terjadi *shortage* atau kelangkaan.

Sebagai contoh, jika pada harga Rp10.000 jumlah yang diminta mencapai 400 unit, sementara jumlah yang ditawarkan hanya 200 unit, maka terjadi kekurangan pasokan sebesar:

Shortage = Qd − Qs
Shortage = 400 − 200
Shortage = 200 unit

Ketika terjadi *shortage*, konsumen akan bersaing memperoleh barang yang tersedia sehingga harga cenderung meningkat. Kenaikan harga tersebut akan mengurangi jumlah yang diminta dan mendorong produsen meningkatkan produksi hingga pasar kembali mencapai keseimbangan.

Dalam praktiknya, *excess demand* sering terjadi pada produk yang sangat diminati masyarakat, seperti produk teknologi baru, tiket konser populer, atau komoditas tertentu ketika pasokan mengalami gangguan.

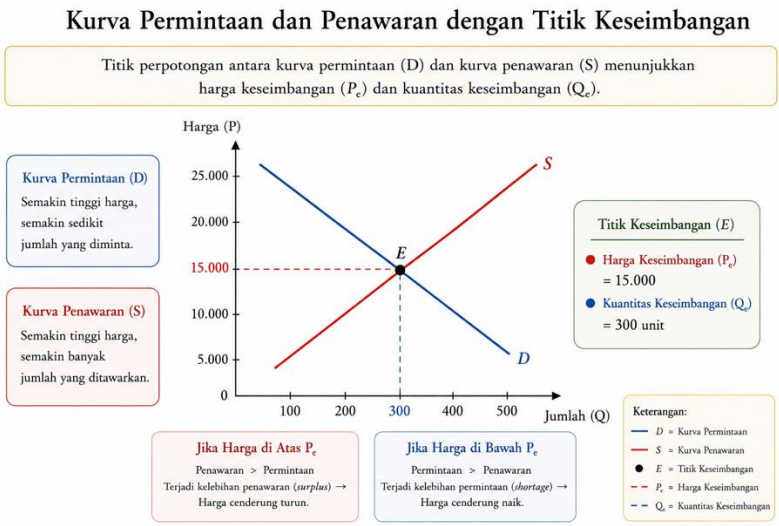

Sumber: Diadaptasi dari *Principles of Microeconomics*, N. Gregory Mankiw.

3.3.5 Ringkasan

Keseimbangan pasar merupakan kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Harga yang terbentuk pada kondisi tersebut disebut harga keseimbangan, sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan disebut kuantitas keseimbangan. Apabila harga berada di atas titik keseimbangan akan terjadi *excess supply* atau surplus, yaitu kondisi ketika jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Sebaliknya, apabila harga berada di bawah titik keseimbangan akan terjadi *excess demand* atau shortage, yaitu kondisi ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Melalui mekanisme pasar, perubahan harga akan

mendorong penyesuaian yang pada akhirnya mengembalikan pasar menuju kondisi keseimbangan.

REFERENSI

Mankiw, N.G., 2018. *Principles of Microeconomics*. 8th ed. Boston: Cengage Learning.

Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L., 2018. *Microeconomics*. 9th ed. Harlow: Pearson Education.

Perloff, J.M., 2020. *Microeconomics*. 9th ed. Harlow: Pearson Education.

Sukirno, S. 2016. *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Edisi Ketiga). RajaGrafindo Persada.

Varian, H.R., 2019. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. 9th ed. New York: W.W. Norton & Company.

Zahara, V.M. and Anwar, C.J., 2021. *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

BAB 4
ELASTISITAS DAN APLIKASINYA

Muh. Fachruddin, S.E., M.Acc.

4.1 Pengertian Elastisitas

Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan derajat kepekaan atau respons suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lain. Secara umum, elastisitas menggambarkan:

1. Seberapa besar perubahan jumlah permintaan ketika harga berubah
2. Seberapa besar perubahan jumlah penawaran ketika harga berubah
3. Seberapa besar perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan atau faktor lainnya

Pengertian elastisitas menurut para ahli:

1. Alfred Marshall

   Alfred Marshall merupakan pelopor konsep elastisitas dalam ekonomi. Marshall memperkenalkan konsep ini dalam karyanya *Principles of Economics* (1890).

   Menurutnya:

   Elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga.

2. N. Gregory Mankiw

   Dalam buku *Principles of Economics*, Mankiw menyatakan:

   Elastisitas adalah ukuran seberapa responsif jumlah yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan salah satu penentunya, seperti harga, pendapatan, atau harga barang lain.

3. Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus

   Dalam buku *Economics*, mereka mendefinisikan:

   Elastisitas adalah tingkat kepekaan (responsivitas) variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lain yang dinyatakan dalam persentase.

4. Hal R. Varian

   Dalam *Intermediate Microeconomics*, Varian menjelaskan:

   Elastisitas adalah ukuran perubahan proporsional suatu variabel sebagai akibat perubahan variabel lain dalam analisis ekonomi.

5. Sadono Sukirno

   Dalam buku Mikroekonomi Teori Pengantar, ia menyatakan:

   Elastisitas adalah tingkat perubahan relatif dalam jumlah permintaan atau penawaran sebagai akibat perubahan harga atau pendapatan.

4.2 Jenis-Jenis Elastisitas

Jenis elastisitas berdasarkan variabel yang diukur, membedakan faktor apa yang menyebabkan perubahan jumlah barang. Ada 4 jenis utama:

4.2.1 Elastisitas Harga Permintaan (*Price Elasticity of Demand)*

Mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang dibeli oleh konsumen ketika harga barang tersebut naik atau turun. Mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Secara umum, rumus elastisitas permintaan dapat dinyatakan dalam dua bentuk

Rumus Persentase

Rumus ini paling sering digunakan untuk memahami konsep dasarnya secara langsung:

$$E_d = \frac{\%\,\Delta Q_d}{\%\,\Delta P}$$

Keterangan:

E_d = Elastisitas permintaan

$\%\,\Delta Q_d$ = Persentase perubahan jumlah barang yang diminta.

$\%\,\Delta P$ = Persentase perubahan harga barang

Rumus Turunan (Matematis)

Untuk perhitungan yang lebih spesifik berdasarkan data angka awal dan akhir, gunakan rumus berikut:

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

Keterangan Komponen:

ΔQ (Delta Q) = Perubahan jumlah permintaan $(Q_2 - Q_1)$

ΔP (Delta P) = Perubahan harga $(P_2 - P_1)$

P = Harga awal sebelum perubahan (P_1)

Q = Jumlah barang awal sebelum perubahan (Q_1)

Jenis–Jenis Koefisien Elastisitas

Hasil perhitungan (E_d)biasanya diambil nilai mutlaknya untuk menentukan jenis elastisitasnya:

- Elastis $(E_d > 1)$: Perubahan harga sangat berpengaruh pada jumlah permintaan (contoh: barang mewah).
- Inelastis $(E_d < 1)$: Perubahan harga kurang berpengaruh pada jumlah permintaan (contoh: bahan pokok seperti beras).
- Unitary/Satuan $(E_d = 1)$: Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan.
- Elastis Sempurna $(E_d = \infty)$: Berapapun jumlah barang, harga tetap sama.
- Inelastis Sempurna $(E_d = 0)$: Perubahan harga tidak mengubah jumlah permintaan sama sekali (contoh: obat-obatan darurat atau tanah).

Contoh Soal

Harga suatu barang turun dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, dan jumlah permintaan naik dari 100 unit menjadi 160 unit.

Langkah 1: Hitung perubahan

$\Delta Q = 160 - 100 = 60$

$\Delta P = 8.000 - 10.000 = -2.000$

Langkah 2: Hitung elastisitas

$$E_d = \frac{60}{-2000} \times \frac{10.000}{100}$$
$$E_d = (-0.03) \times 100 = -3$$

Hasil:

E = 3 Elastis ($E_d > 1$)

Artinya: permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga.

Contoh yang lain jika permintaan hanya naik dari 100 unit menjadi 110 unit , E=0,05 Inelastis ($E_d < 1$)

4.2.2 Elastisitas Harga Penawaran *(Price Elasticity of Supply)*

Mengukur seberapa peka (responsif) jumlah barang yang diproduksi/dijual oleh produsen ketika harga barang di pasar berubah.

Rumus matematisnya identik dengan elastisitas permintaan, hanya saja Q (Kuantitas) di sini merujuk pada Kuantitas Penawaran *(Quantity Supplied).*

$$E_s = \frac{\% \, \Delta Q_s}{\% \, \Delta P}$$

Atau menggunakan turunan selisih angka awal dan akhir:

$$E_s = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

Keterangan:

E_s = Elastisitas Penawaran (*Supply*)

ΔQ = Perubahan jumlah penawaran $(Q_2 - Q_1)$

ΔP = Perubahan harga $(P_2 - P_1)$

P = Harga awal (P_1)

Q = Jumlah penawaran awal (Q_1)

Contoh Soal Elastisitas Penawaran

Kasus: Kenaikan Harga Produk

Seorang produsen di Indonesia menjual barang dengan kondisi berikut:

Harga awal (P_1) = Rp5.000

Harga naik menjadi (P_2) = Rp7.500

Jumlah penawaran awal (Q_1) = 100 unit

Jumlah penawaran meningkat menjadi (Q_2) = 150 unit

Hitung Perubahan

$\Delta Q = 150 - 100 = 50$

$\Delta P = 7.500 - 5.000 = 2.500$

Rumus Elastisitas Penawaran

$$E_s = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$E_s = \frac{50}{2500} \times \frac{5000}{100}$$
$$E_s = 0.02 \times 50 = 1$$

$E_s = 1$ (Unitary/Elastisitas Satuan)

Artinya:

Perubahan harga diikuti perubahan penawaran yang proporsional . Produsen mampu menyesuaikan produksi secara seimbang

Contoh Soal 2 (Inelastis)

Data:

Harga naik 10%

Penawaran naik 5%

$$E_s = \frac{5\%}{10\%} = 0.5$$

$E_s < 1$ (Inelastis)

Artinya:

Produsen sulit menambah produksi, Biasanya terjadi pada sektor pertanian jangka pendek

Kriteria Koefisien Elastisitas Penawaran

Nilai koefisien (E_s) digunakan untuk menentukan jenis elastisitas:

- $E_s > 1 \rightarrow$ Elastis
  Penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga
- $E_s < 1 \rightarrow$ Inelastis
  Penawaran kurang responsif terhadap perubahan harga

- $E_s = 1 \rightarrow$ Unitary (Satuan)
  Perubahan harga sebanding dengan perubahan penawaran
- $E_s = \infty \rightarrow$ Elastis sempurna
  Harga tetap, jumlah berubah bebas
- $E_s = 0 \rightarrow$ Inelastis sempurna
  Jumlah tetap, meskipun harga berubah

4.2.3 Elastisitas Silang *(Cross Elasticity)*

Mengukur seberapa peka jumlah permintaan suatu barang (Barang X) terhadap perubahan harga barang lain (Barang Y). Konsep ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui peta persaingan produk mereka di pasar, serta melihat bagaimana produk mereka dipengaruhi oleh produk lain.

Rumus Elastisitas Silang

$$E_{xy} = \frac{\%\,\Delta Q_x}{\%\,\Delta P_y}$$

Atau dalam bentuk turunan:

$$E_{xy} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$

Keterangan:

$E_{x\gamma}$ = Elastisitas silang
Q_x = Jumlah permintaan barang X
P_γ = Harga barang Y
ΔQ_x = Perubahan jumlah permintaan barang X
ΔP_γ = Perubahan harga barang Y

Jenis Hubungan Barang

a) Barang Substitusi (Pengganti)
   Nilai elastisitas positif ($E_{x\gamma} > 0$)
   - Contoh: teh dan kopi
   - Jika harga kopi naik → permintaan teh meningkat

b) Barang Komplementer (Pelengkap)
   - Nilai elastisitas negatif ($E_{x\gamma} < 0$)
   - Contoh: mobil dan bensin
   - Jika harga bensin naik → permintaan mobil turun

c) Barang Tidak Berkaitan
   - Nilai elastisitas mendekati nol ($E_{x\gamma} = 0$)
   - Contoh: buku dan sabun

Contoh Soal Elastisitas Silang

Kasus: Hubungan Teh dan Kopi

Di Indonesia, terjadi perubahan harga kopi yang memengaruhi permintaan teh:

Harga kopi naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000

Permintaan teh naik dari 100 unit menjadi 130 unit

Diketahui

- $P_y1 = 10.000$
- $P_y2 = 12.000$
- $Q_x1 = 100$
- $Q_x2 = 130$

Hitung Perubahan

- $\Delta Q_x = 130 - 100 = 30$
- $\Delta P_\gamma = 12.000 - 10.000 = 2.000$

3. Rumus Elastisitas Silang

$$E_{xy} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$
$$E_{xy} = \frac{30}{2000} \times \frac{10.000}{100}$$
$$E_{xy} = 0.015 \times 100 = 1.5$$

Hasil dan Interpretasi

$E_{x\gamma}$ = 1,5 (positif)

Artinya:

Barang substitusi (pengganti), Ketika harga kopi naik maka permintaan teh ikut naik

Contoh Soal 2 (Komplementer)

Kasus: Mobil dan BBM

Harga BBM naik 10%

Permintaan mobil turun 5%

$$E_{xy} = \frac{-5\%}{10\%} = -0.5$$

$E_{x\gamma}$ negatif → barang komplementer

4.2.4 Elastisitas Pendapatan *(Income Elasticity)*

Mengukur bagaimana perubahan pendapatan konsumen memengaruhi daya belinya terhadap suatu barang. Ini menentukan apakah suatu barang termasuk barang normal, barang mewah, atau barang inferior.

Rumus Elastisitas Pendapatan

$$E_i = \frac{\%\,\Delta Q_d}{\%\,\Delta Y}$$

Atau menggunakan rumus turunan (selisih angka awal dan akhir):

$$E_i = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q}$$

Keterangan:

E_i = Elastisitas Pendapatan

ΔQ = Perubahan jumlah permintaan $(Q_2 - Q_1)$

ΔY = Perubahan pendapatan $(Y_2 - Y_1)$

Y = Pendapatan awal (Y_1)

Q = Jumlah permintaan awal (Q_1)

Jenis Barang Berdasarkan Elastisitas Pendapatan

- Barang Normal ($E_\gamma > 0$)
  Permintaan meningkat ketika pendapatan meningkat. Contoh: pakaian, elektronik
- Barang Inferior ($E_\gamma < 0$)
  Permintaan menurun ketika pendapatan meningkat. Contoh: mie instan (dalam kondisi tertentu)
- Barang Mewah ($E_\gamma > 1$)
  Permintaan meningkat lebih besar dibanding kenaikan pendapatan. Contoh: mobil mewah, perhiasan
- Barang Kebutuhan Pokok ($0 < E_\gamma < 1$)
  Permintaan meningkat tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatan.Contoh: beras, gula

Soal Elastisitas Pendapatan

Kasus: Permintaan Pakaian

Seorang konsumen di Indonesia mengalami kenaikan pendapatan.

Pendapatan naik dari Rp5.000.000 menjadi Rp6.000.000

Permintaan pakaian naik dari 50 unit menjadi 75 unit

Diketahui

- $Y_1 = 5.000.000$
- $Y_2 = 6.000.000$
- $Q_1 = 50$
- $Q_2 = 75$

Hitung Perubahan

- $\Delta Y = 6.000.000 - 5.000.000 = 1.000.000$
- $\Delta Q = 75 - 50 = 25$

Rumus Elastisitas Pendapatan

$$E_y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q}$$

$$E_y = \frac{25}{1.000.000} \times \frac{5.000.000}{50}$$
$$E_y = 0.000025 \times 100.000 = 2.5$$

Hasil dan Interpretasi

$E_\gamma = 2,5$

Artinya:
$E_\gamma > 1$ = Barang mewah (luxury goods), Permintaan meningkat lebih besar dibanding kenaikan pendapatan

Contoh Soal 2 (Barang Inferior)
Kasus: Mie Instan
Pendapatan naik 20%
Permintaan mie instan turun 10%

$$E_y = \frac{-10\%}{20\%} = -0.5$$

E_γ negatif = barang inferior

Contoh Soal 3 (Kebutuhan Pokok)
Pendapatan naik 10%
Permintaan beras naik 5%

$$E_y = \frac{5\%}{10\%} = 0.5$$

$0 < E_\gamma < 1$ = barang kebutuhan pokok

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Elastisitas

Tingkat elastisitas baik itu permintaan maupun penawarantidak terjadi begitu saja. Ada alasan mengapa konsumen bisa sangat sensitif terhadap perubahan harga kopi, tetapi sama sekali tidak peduli dengan kenaikan harga garam.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat elastisitas dalam ekonomi:

4.3.1 Faktor yang Memengaruhi Elastisitas Harga Permintaan (*Demand*)

Ini adalah alasan mengapa konsumen merespons kenaikan harga suatu barang secara berbeda-beda:

1. Ketersediaan Barang Substitusi (Pengganti)

Semakin banyak barang pengganti yang tersedia, maka permintaan suatu barang cenderung semakin elastis. Artinya, konsumen akan lebih mudah beralih ke produk lain ketika harga suatu barang naik. Misalnya, jika harga salah satu merek air mineral meningkat tajam, konsumen dapat dengan mudah memilih dari banyak merek lain yang tersedia di pasar. Akibatnya, permintaan terhadap merek yang mengalami kenaikan harga tersebut akan turun secara signifikan.

Sebaliknya, jika suatu barang tidak memiliki pengganti, maka permintaannya bersifat inelastis. Dalam kondisi ini, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli barang tersebut meskipun harganya meningkat. Contohnya adalah obat insulin bagi penderita diabetes atau pasokan listrik dari PLN. Karena tidak ada alternatif yang setara, konsumen tetap bergantung pada barang tersebut, sehingga perubahan harga tidak banyak memengaruhi jumlah permintaan.

2. Sifat Barang (Kebutuhan vs. Kemewahan)

Barang kebutuhan pokok umumnya memiliki permintaan yang bersifat inelastis. Artinya, meskipun harga mengalami kenaikan, konsumen tetap akan membeli barang tersebut karena merupakan kebutuhan utama sehari-hari. Contohnya adalah beras, minyak goreng, dan obat-obatan yang tetap dibutuhkan dalam kondisi apa pun.

Sebaliknya, barang mewah memiliki permintaan yang bersifat elastis. Permintaan terhadap barang ini sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika harga naik, konsumen cenderung menunda atau bahkan membatalkan pembelian karena barang tersebut bukan kebutuhan mendesak. Contohnya adalah mobil sport, perhiasan, atau tiket kapal pesiar yang umumnya dibeli berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan.

3. Proporsi Pendapatan yang Dibelanjakan

Barang yang hanya mengambil porsi kecil dari pendapatan konsumen cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Artinya, meskipun harganya naik cukup besar, konsumen tetap akan membelinya karena pengaruhnya terhadap total pengeluaran sangat kecil. Misalnya, kenaikan harga garam dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 tidak terlalu dirasakan, sehingga konsumen tidak keberatan dan tetap membeli.

Sebaliknya, barang yang memerlukan porsi besar dari pendapatan memiliki permintaan yang elastis. Perubahan

harga, meskipun kecil, dapat memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Contohnya adalah mobil, rumah, atau laptop. Kenaikan harga sekitar 10% pada barang-barang tersebut dapat membuat konsumen menunda atau bahkan membatalkan pembelian karena dampaknya cukup besar terhadap keuangan mereka.

4. Jangka Waktu (*Time Horizon*)

Dalam jangka pendek, permintaan suatu barang cenderung bersifat inelastis. Hal ini karena konsumen belum memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan perilaku atau mencari alternatif. Misalnya, ketika harga bensin tiba-tiba naik, konsumen tetap harus membelinya untuk kebutuhan sehari-hari seperti berangkat kerja.

Sebaliknya, dalam jangka panjang, permintaan menjadi lebih elastis karena konsumen memiliki waktu untuk beradaptasi. Jika harga bensin terus meningkat dalam waktu yang lama, konsumen dapat mulai mencari alternatif, seperti menggunakan transportasi umum, beralih ke kendaraan listrik, atau bahkan memilih tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi kerja.

5. Definisi Pasar (Spesifik vs. Luas)

Semakin spesifik pasar didefinisikan, semakin elastis permintaannya. Contoh: "Es Krim Rasa Vanilla Merek A" sangat elastis (karena bisa diganti dengan Merek B). Namun, kategori "Makanan" secara umum sangat inelastis

(karena tidak ada pengganti makanan, manusia butuh makan).

4.3.2 Faktor yang Memengaruhi Elastisitas Harga Penawaran (*Supply*)

Ini adalah alasan mengapa produsen/perusahaan bisa (atau tidak bisa) dengan cepat menambah jumlah barang saat harga di pasar sedang tinggi:

1. Jangka Waktu (*Time Horizon*)

Dalam jangka waktu yang sangat pendek (seketika), penawaran bersifat inelastis sempurna. Artinya, produsen sama sekali tidak dapat menambah jumlah barang yang ditawarkan meskipun harga naik. Contohnya, ketika harga ikan di pasar tiba-tiba melonjak, nelayan tidak bisa langsung menggandakan hasil tangkapan pada hari itu juga.

Pada jangka pendek, penawaran masih cenderung inelastis. Produsen membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kapasitas produksi, seperti memesan mesin baru atau merekrut tenaga kerja tambahan. Oleh karena itu, peningkatan produksi tidak dapat dilakukan secara cepat dalam waktu singkat.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penawaran menjadi lebih elastis. Produsen memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian besar, seperti membangun pabrik baru, memperluas lahan produksi, atau menambah jumlah tenaga kerja secara signifikan. Hal ini

memungkinkan peningkatan jumlah produksi secara lebih fleksibel dalam merespons perubahan harga.

2. Daya Tahan Barang (*Storability*)

Barang yang mudah rusak atau cepat busuk cenderung memiliki penawaran yang inelastis. Hal ini karena produsen tidak memiliki banyak pilihan selain segera menjual barang tersebut, terlepas dari kondisi harga di pasar. Contohnya adalah tomat segar, ikan laut, atau sayuran. Barang-barang ini tidak bisa disimpan dalam waktu lama, sehingga produsen tidak dapat menunda penjualan ketika harga turun atau menahan stok untuk menunggu harga naik.

Sebaliknya, barang yang tahan lama memiliki penawaran yang lebih elastis. Produsen dapat menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dan menyesuaikan jumlah yang ditawarkan ke pasar sesuai dengan kondisi harga. Contohnya adalah furnitur kayu, emas, atau mobil. Ketika harga sedang rendah, produsen dapat menahan stok di gudang, dan ketika harga meningkat, mereka dapat segera menambah penawaran dengan mengeluarkan stok yang telah disimpan.

3. Mobilitas Faktor Produksi

Jika mesin atau tenaga kerja dapat dengan mudah dialihkan untuk memproduksi barang lain, maka penawaran suatu barang cenderung bersifat elastis.

Artinya, produsen dapat dengan cepat menyesuaikan jumlah produksi ketika terjadi perubahan harga. Contohnya adalah pabrik konveksi kemeja yang dapat dengan mudah mengubah proses produksinya untuk membuat masker kain ketika permintaan dan harga masker meningkat.

Sebaliknya, penawaran akan bersifat inelastis pada sektor yang sulit melakukan perubahan produksi dalam waktu singkat, seperti industri berat atau pertanian. Misalnya, petani kelapa sawit tidak dapat langsung mengubah lahannya menjadi kebun kopi hanya karena harga kopi sedang naik. Proses produksi yang memerlukan waktu dan investasi besar membuat penawaran menjadi kurang responsif terhadap perubahan harga.

4. Kapasitas Menganggur (*Spare Capacity*)

Jika sebuah pabrik tekstil sudah beroperasi pada kapasitas penuh (full capacity), yaitu mesin berjalan 100%, maka penawarannya cenderung bersifat inelastis. Artinya, ketika terjadi kenaikan harga atau permintaan mendadak, pabrik tidak dapat dengan mudah menambah jumlah produksi karena seluruh kapasitas sudah digunakan.

Sebaliknya, jika pabrik tersebut masih memiliki kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan, misalnya hanya menggunakan 50% dari total mesin yang tersedia, maka penawarannya menjadi lebih elastis. Dalam kondisi ini, pabrik dapat dengan cepat meningkatkan produksi

dengan mengoperasikan sisa mesin yang belum digunakan untuk merespons kenaikan harga di pasar.

REFERENSI

Mankiw, N. Gregory. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D.. (2010). *Economics* (19th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Varian, Hal R.. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.). New York, NY: W.W. Norton & Company.

Case, Karl E., Fair, Ray C., & Oster, Sharon E.. (2017). *Principles of Economics* (12th ed.). Boston, MA: Pearson.

Sukirno, Sadono. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics* (9th ed.). Pearson.

Nicholson, W., & Snyder, C. (2017). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions* (12th ed.). Cengage Learning.

BAB 5
TEORI PERILAKU KONSUMEN

Yuni Kartika Simarmata, S.P., M.Si.

Studi mengenai perilaku konsumen (*consumer behavior*) berawal dari penelitian terhadap perilaku pembeli (*buyer behavior*) yang mulai berkembang pesat pada pertengahan 1960-an. Pada saat itu, fokus utama lebih menekankan pada aspek perilaku pembeli yakni terpusat pada transaksi dan proses pengambilan keputusan seseorang saat mereka memilih dan membeli suatu produk.

Pergeseran istilah dari "Perilaku Pembeli" menjadi "Perilaku Konsumen" mencerminkan perluasan ruang lingkup studi. Jika pada awalnya fokus studi ini terbatas pada momen transaksi, kini perilaku konsumen mencakup seluruh rangkaian proses yang meliputi tahapan sebelum pembelian, pengalaman saat pembelian, hingga aspek pascapembelian.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan konsumsi. Dengan pendapatan, waktu, maupun kemampuan yang berbeda dan terbatas, konsumen harus mengalokasikan sumber daya tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Fenomena tersebut semakin relevan seiring perkembangan era digital yang telah membentuk karakter konsumen yang lebih kritis dan teredukasi. Dalam

menentukan pilihan, konsumen tidak lagi sekadar berorientasi pada pemenuhan fungsi dasar barang/jasa, melainkan mulai memprioritaskan aspek yang selaras dengan nilai-nilai personal, seperti keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta penguatan identitas lokal.

Teori perilaku konsumen merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi mikro untuk dapat mengubah fokus dari sekadar bertanya "Mengapa konsumen membeli?" menjadi "Bagaimana memprediksi ekspektasi dan reaksi konsumen terhadap strategi yang diterapkan untuk mencapai tingkat kepuasan, sekaligus mempermudah pengelolaan hubungan pelanggan yang berkelanjutan?".

5.1 Konsep Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah segala tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi dalam proses memenuhi kebutuhannya, mulai dari mencari informasi, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas barang/jasa serta adanya dampak dari proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat luas (Schiffman & Wisenblit, 2019) Mothersbaugh, Hawkins & Kleiser (2020).

Kajian tentang perilaku konsumen berfokus pada cara seseorang mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, seperti waktu, uang, dan tenaga, untuk kegiatan konsumsi (Schiffman & Wisenblit, 2019).

Selain itu, kajian ini juga memperhatikan pengaruh dari proses tersebut, baik terhadap konsumen itu sendiri maupun terhadap masyarakat secara lebih luas (Mothersbaugh, Hawkins & Kleiser (2020).

Solomon (2019) mendefinisikan perilaku konsumen mencakup proses yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pembelian. Hal ini mencakup bagaimana kepemilikan suatu produk memengaruhi kehidupan individu, persepsi terhadap diri sendiri, serta pandangan orang lain.

Dari pengertian perilaku konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah keseluruhan aktivitas dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi (mulai dari mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, hingga membuang barang/jasa) dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Konsumen tidak hanya berperilaku saat melakukan transaksi, tetapi juga sebelum dan sesudah pembelian dengan mengalokasikan sumber daya pribadi mereka. Perilaku ini pun bersifat kompleks karena tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga membentuk citra diri dan cara seseorang memposisikan diri di tengah masyarakat berdasarkan produk yang mereka miliki atau tidak miliki.

Dalam perspektif ekonomi, asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa konsumen bertindak secara rasional, yaitu berusaha memaksimalkan kepuasan (*utility*) yang diperoleh dari konsumsi barang/jasa dengan sumber daya (pendapatan)

yang terbatas. Terdapat dua konsep penting yang berkaitan dengan utilitas, yaitu: Utilitas Total (*Total Utility*) dan Utilitas Marjinal (*Marginal Utility*/MU).

Utilitas Total merupakan kepuasan keseluruhan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah unit barang/jasa tertentu. Utilitas total cenderung meningkat seiring pertambahan konsumsi, namun dengan laju yang semakin melambat. Sedangkan utilitas marjinal merupakan tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Secara matematis, $MU = \Delta TU/\Delta Q$, yaitu perubahan utilitas total dibagi perubahan jumlah barang yang dikonsumsi.

Terdapat hal-hal yang perlu dipahami untuk menganalisis perilaku konsumen:

1. Preferensi yang lengkap (*complete preferences*): Konsumen diasumsikan mampu mengevaluasi setiap kombinasi barang yang tersedia. Konsumen dapat menentukan setiap pilihan barang/jasa dalam skala prioritasnya, baik itu sebagai pilihan utama, pilihan yang setara, atau pilihan yang tidak diinginkan.
2. Preferensi bersifat transitif (*transitive preferences*): Preferensi yang bersifat transitif berarti adanya konsistensi dalam menentukan pilihan. Jika seorang konsumen lebih menyukai barang A daripada barang B, serta lebih menyukai barang B daripada barang C, maka secara logis ia pasti akan lebih memilih barang A dibandingkan barang C.

3. Ketidakpuasan (*non-satiation* atau *more is better*): Pada tingkat konsumsi yang wajar, konsumen lebih menyukai memiliki lebih banyak barang daripada lebih sedikit, dengan asumsi barang tersebut memberikan utilitas positif.
4. Tingkat substitusi marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal rate of substitution*): Konsumen bersedia mengorbankan semakin sedikit suatu barang/jasa untuk mendapatkan satu unit tambahan barang/jasa yang berbeda.

5.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui pengaruh berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, yang meliputi faktor ekonomi, psikologis, sosial budaya, dan teknologi.

5.2.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah penentu utama perilaku konsumen yang dapat diukur dengan angka dan dianalisis menggunakan metode ekonomi konvensional. Adapun faktor ekonomi yang memengaruhi perilaku konsumen yaitu:

1. Pendapatan dan daya beli, hal ini menentukan batasan kemampuan konsumsi.

2. Harga barang dan harga relatif, perubahan harga memengaruhi pilihan konsumen melalui efek substitusi dan efek pendapatan.
3. Ekspektasi harga dan pendapatan masa depan, hal ini mengantisipasi konsumen akan kenaikan harga namun dapat menciptakan lonjakan permintaan.
4. Kekayaan dan aset, selain adanya pendapatan, kekayaan merupakan faktor yang memengaruhi pola konsumsi jangka panjang.

5.2.2 Faktor Psikologis

Ekonomi perilaku (*behavioral economics*) juga telah menunjukkan bahwa faktor psikologis memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan konsumsi. Faktor psikologis yang dimaksud terdiri dari motivasi, persepsi, sikap dan kepercayaan, pembelajaran dan pengalaman, bias kognitif.

Motivasi merupakan proses dari dalam keluar di mana adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Proses munculnya motivasi konsumen berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan meliputi adanya kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang belum terpenuhi (*unfulfilled needs, wants, desires*), adanya ketegangan psikologis (*tension*) atau rasa tidak nyaman yang mendorong konsumen untuk segera mencari solusi, adanya dorongan (*drive*) atau energi internal yang menggerakkan konsumen untuk bertindak, yang pada saat bersamaan dipengaruhi oleh

proses pembelajaran dan kognitif (*learning & cognitive process*) berdasarkan pengalaman dan memori masa lalu konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan adanya perilaku nyata (*behavior*) yang terarah dan bertujuan. Pada akhirnya, perilaku tersebut membawa konsumen mencapai tujuan berupa pemenuhan kebutuhan (*goal/need fulfillment*) yang meredakan ketegangan awal dan sekaligus menjadi pengalaman baru yang akan memengaruhi proses motivasi berikutnya.

Berbeda dengan motivasi, persepsi adalah proses dari luar ke dalam di mana konsumen dibentuk untuk menginterpretasikan gambaran bermakna tentang suatu barang/jasa. Persepsi ditandai dengan adanya impresi kognitif dari stimulus (pendengaran, pengelihatan, penciuman, pengecapan, perabaan) yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu.

Sikap merupakan kondisi yang langsung muncul berdasarkan pengalaman yang ada, yang mempengaruhi respon terhadap sesuatu. Wardhana (2024) juga mendefinisikan sikap konsumen sebagao penilaian terhadap suatu produk, merek, layanan, maupun situasi pembelian tertentu. Sikap ini terdiri atas tiga komponen utama yang memengaruhi pandangan dan tindakan konsumen, yakni komponen kognitif (berupa pengetahuan dan keyakinan), komponen afektif (berupa emosi dan perasaan), serta komponen konatif (berupa niat dan perilaku)

Kepercayaan adalah kesadaran akan kebenaran sesuatu. Kedua hal tersebut terbentuk dari pengalaman, informasi, dan

pengaruh sosial memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan dan sulit diubah dalam jangka pendek. Pembelajaran dan pengalaman merupakan hal yang dipelajari konsumen pada masa lalu. Kepuasan dengan barang/jasa tertentu mendorong pembelian berulang dan loyalitas merek. Yang terakhir, Bias kognitif yang merupakan ketakutan konsumen akan rugi lebih besar dari kesenangan yang diperoleh.

5.2.3 Faktor Sosial Budaya

Budaya merupakan sekumpulan nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari seseorang dari keluarga serta lingkungan sekitarnya. Faktor sosial dan budaya merupakan pengaruh eksternal yang sangat kuat karena membentuk kerangka acuan bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Keluarga, teman, rekan kerja, dan tokoh masyarakat akan memengaruhi pilihan konsumsi. Tradisi pangan lokal, kepercayaan agama, dan nilai-nilai budaya secara mendalam memengaruhi pilihan barang/jasa. Perbedaan kelas sosial mencerminkan kombinasi pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup yang memengaruhi pola konsumsi secara holistik. Serta siklus hidup keluarga akan memengaruhi permintaan berbagai barang/jasa.

5.2.4 Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan konsumen dalam mencari informasi, mengevaluasi produk, dan proses mereka saat membeli barang. Di era digital saat ini, teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi ekosistem baru tempat keseluruhan proses pengambilan keputusan konsumen. Adapun faktor teknologi yang memengaruhi perilaku konsumen yaitu:

1. Akses internet dan penetrasi digital, ketersediaan dan kecepatan akses internet secara langsung menentukan sejauh mana konsumen dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelian. Konsumen dengan akses internet yang baik memiliki kemampuan lebih besar untuk membandingkan produk, membaca ulasan, dan melakukan transaksi secara daring. Semakin tinggi tingkat penetrasi digital di suatu wilayah, semakin luas pula pergeseran perilaku konsumen dari pasar konvensional ke platform digital.
2. Platform e-commerce dan marketplace digital, adanya platform belanja daring seperti marketplace dan toko virtual mengubah secara mendasar pola pembelian konsumen. Konsumen kini dapat mengakses ribuan pilihan produk, membandingkan harga secara real-time, dan menyelesaikan transaksi tanpa batasan geografis maupun waktu. Platform ini juga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal melalui sistem rekomendasi berbasis algoritma yang menyesuaikan

tampilan produk dengan preferensi dan riwayat pencarian konsumen. Pratiwi & Ananda (2024) juga telah melakukan penelitian mengenai proses pengambilan keputusan konsumen terhadap layanan 'Garansi Tepat Waktu' pada salah satu platform Shopee. Faktor utama yang memengaruhi keputusan meliputi efektivitas kompensasi, promosi, kemudahan klaim, dan integrasi teknologi pengiriman. Kepuasan pascapembelian yang tinggi terhadap layanan ini terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian kembali serta merekomendasikan Shopee kepada orang lain.

3. Media sosial dan pengaruh digital yang telah menjadi salah satu sumber informasi dan referensi utama konsumen dalam mengevaluasi produk. Ulasan pengguna (*user-generated content*), konten kreator, dan *influencer* membentuk persepsi konsumen secara masif dan cepat. Konsumen modern cenderung mempercayai rekomendasi dari sesama pengguna di platform digital melebihi iklan konvensional, sehingga media sosial berperan besar dalam tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif.
4. Kemudahan dan keamanan sistem pembayaran digital seperti dompet elektronik, transfer antar bank instan, dan metode *buy now pay later* secara signifikan mengurangi hambatan dalam proses pembelian. Ketersediaan berbagai opsi pembayaran mempercepat konversi dari niat beli menjadi keputusan pembelian aktual, sekaligus

memengaruhi besaran dan frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen.

Berbeda dengan faktor ekonomi yang berperan sebagai penentu kemampuan konsumen untuk membeli, faktor teknologi berperan sebagai penentu cara dan kemudahan konsumen dalam mengakses, mengevaluasi, dan melakukan pembelian. Keduanya saling berinteraksi — misalnya, teknologi *buy now pay later* secara efektif memperluas daya beli konsumen yang secara ekonomi terbatas, sementara platform e-commerce memperluas pilihan konsumen melampaui batas geografis yang selama ini membatasi pasar konvensional.

5.3 Model Perilaku Konsumen

Model stimulus-respons atau "*black box*" merupakan salah satu model paling mendasar dalam memahami konsumen mengolah berbagai stimulus dalam memahami bagaimana berbagai rangsangan (*stimulus)* eksternal diproses di dalam pikiran konsumen hingga menghasilkan keputusan pembelian. Menurut Kotler, Armstrong & Balasubramanian (2023), model ini bekerja melalui tiga komponen utama yaitu rangsangan (*marketing stimulus*), kotak hitam pembeli (*buyer's black box*), dan respon pembeli (*buyer's response*).

Adapun komponan rangsangan yang memengaruhi perilaku konsumen terdiri dari dua yaitu rangsangan pemasaran yaitu produk (p*roduct*), harga (*price*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*) atau 4P dan rangsangan lingkungan

yang mencakup faktor ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik

Kotak Hitam Pembeli merupakan proses internal yang terjadi dalam benak konsumen yang tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak luar (seperti pemasar). Kotak hitam pembeli terdiri dari dua komponen utama yaitu:

- Karakteristik pembeli: budaya, sosial, personal, dan psikologis
- Proses pengambilan keputusan: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian

Respons pembeli merupakan hasil akhir dari proses pengolahan informasi pada kotak hitam konsumen yang berupa sikap dan preferensi konsumen, perilaku pembelian (apa yang dibeli, kapan, di mana, dan berapa banyak), serta hubungan dengan merek dan perusahaan.

Dengan demikian, model *Black Box* menegaskan bahwa konsumen adalah pemikir aktif yang mengolah berbagai faktor eksternal dan internal; di mana proses pengambilan keputusan di dalam 'kotak hitam' tersebut menjadi penentu utama apakah suatu barang/jasa akan dibeli atau diabaikan.

5.4 Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang kompleks dengan melibatkan berbagai metode dan strategi untuk menentukan pilihan terbaik (Safrin, 2025). Proses pengambilan keputusan konsumen merupakan serangkaian tahapan sistematis yang dilalui konsumen sejak menyadari adanya kebutuhan hingga mengevaluasi hasil pembelian. Artinya, dalam proses pengambilan keputusan, seseorang memecahkan suatu masalah dengan memilih perilaku atau langkah yang paling sesuai. Kotler, Keller & Chernev (2022) menegaskan bahwa memahami keseluruhan tahapan ini penting bagi pemasar karena keputusan pembelian bukan merupakan tindakan tunggal, melainkan sebuah proses yang berkesinambungan.

Terdapat lima tahap proses keputusan pembelian yang dilalui konsumen, terutama untuk produk bernilai tinggi atau tidak rutin

5.4.1 Pengenalan Masalah (*Problem Recognition*)

Proses pengambilan keputusan berawal ketika konsumen merasa ada perbedaan antara kenyataan yang dihadapi dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Perbedaan ini dapat dipicu oleh dua sumber, yaitu rangsangan internal seperti rasa lapar, haus, atau kebutuhan mendasar lainnya, dan rangsangan eksternal seperti iklan, rekomendasi orang lain, atau paparan terhadap produk baru. Pada tahap konsumen menyadari akan adanya kebutuhan atau keinginan. Contoh:

Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat mendorong pencarian alternatif makanan bergizi berbasis bahan pangan lokal (singkong, sorgum, kacang-kacangan).

5.4.2 Pencarian Informasi (*Information Search*)

Tahap berikutnya setelah mengenali kebutuhan adalah mencari informasi guna mencari solusi atas kebutuhan tersebut. Pencarian informasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencarian internal dengan mengandalkan memori dan pengalaman masa lalu, serta pencarian eksternal melalui keluarga, teman, media sosial, ulasan daring, iklan, dan uji coba produk langsung.

5.4.3 Evaluasi Alternatif (*Evaluation of Alternatives)*

Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, konsumen akan membandingkan berbagai pilihan produk yang tersedia berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap penting. Kriteria evaluasi ini bersifat subjektif dan berbeda antar konsumen, namun umumnya mencakup atribut seperti harga, kualitas, merek, kemudahan akses, garansi, dan reputasi produk. Pada tahap ini, faktor psikologis seperti persepsi dan sikap berperan besar dalam menentukan alternatif mana yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai konsumen.

5.4.4 Keputusan Pembelian (*Purchase Decision*)

Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, konsumen akan menetapkan pilihan dan melakukan pembelian. Namun perlu dicatat bahwa niat beli tidak selalu berujung pada keputusan pembelian aktual. Dua faktor yang dapat mengintervensi keputusan pembelian yaitu sikap dan keputusan. Sikap yang dimaksud merupakan sikap orang lain (*attitude of others*) seperti pengaruh keluarga atau rekan, serta faktor situasional tak terduga (*unexpected situational factors*) seperti perubahan harga mendadak, ketidaktersediaan produk, atau perubahan kondisi keuangan. Keputusan pembelian juga mencakup pilihan mengenai merek, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.

5.4.5 Perilaku Pascapembelian (*Post-purchase Behavior)*

Proses pengambilan keputusan tidak berhenti setelah transaksi terjadi. Konsumen akan mengevaluasi kesesuaian antara harapan sebelum pembelian dengan pengalaman nyata setelah menggunakan produk. Apabila kinerja produk melebihi atau sesuai harapan, konsumen akan merasa puas dan berpotensi menjadi konsumen loyal serta merekomendasikan produk kepada orang lain. Sebaliknya, apabila kinerja produk di bawah harapan, konsumen akan mengalami ketidakpuasan yang dapat berujung pada komplain, penghentian pembelian, atau penyebaran ulasan negatif.

REFERENSI

Kotler, P., Armstrong, G. and Balasubramanian, S. 2023. *Principles of Marketing*. 19th edn, Global Edition. Harlow: Pearson Education.

Pratiwi, E.R. and Ananda, S.T. 2024. Consumer Behavior in Making Purchasing Decisions on the Shopee Program On-Time Guarantee. doi: 10.61242/ijabo.24.428

Kotler, P., Keller, K.L. and Chernev, A. 2022. *Marketing Management*. 16th edn, Global Edition. Harlow: Pearson Education.

Mothersbaugh, D.L., Hawkins, D.I. and Kleiser, S.B. 2020. *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*. 14th edn. New York: McGraw-Hill Education.

Safrin, F.A. 2025. *Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan*. Cetakan I. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Schiffman, L.G. and Wisenblit, J. 2019. *Consumer Behavior*. 12th edn. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Solomon, M.R. 2019. *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*. 13th edn. Hoboken: Pearson Education.

Wardhana, A. 2024. *Consumer Behavior in the Digital Era 4.0 – Edisi Indonesia*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

BAB 6
TEORI PRODUKSI DAN BIAYA

Ika Purnamasari, S.Pi., M.P.

Teori produksi dan biaya merupakan salah satu fondasi paling penting dalam ekonomi mikro. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu perusahaan atau unit usaha mengorganisasikan faktor-faktor produksinya, serta bagaimana biaya-biaya timbul dari proses tersebut, sangat diperlukan untuk menjelaskan perilaku produsen dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi nyata, produsen tidak hanya bertanya berapa banyak barang yang dapat dihasilkan, tetapi juga berapa biaya yang harus dikeluarkan, apakah tambahan *input* masih menguntungkan, dan pada tingkat *output* berapa usaha dapat beroperasi secara efisien.

Pada sektor agribisnis, teori produksi dan biaya memiliki arti yang sangat penting karena kegiatan usaha pada sektor ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, modal, tenaga kerja, serta teknologi budidaya. Petani maupun pembudidaya ikan dihadapkan pada berbagai keputusan, misalnya menentukan jumlah benih yang digunakan, kebutuhan pakan, penggunaan pupuk, tenaga kerja, luas lahan, hingga pilihan teknologi produksi. Setiap keputusan

tersebut akan memengaruhi jumlah produksi, struktur biaya, pendapatan, dan tingkat keuntungan usaha.

Bab ini menyajikan teori produksi dan biaya secara konseptual, matematis sederhana, dan aplikatif. Untuk memperkuat pemahaman, setiap konsep dilengkapi dengan contoh-contoh sederhana yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan perikanan, sehingga pembaca diharapkan tidak hanya memahami teori produksi dan biaya secara abstrak, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menganalisis keputusan produksi dalam kegiatan ekonomi nyata.

6.1 Konsep Dasar Teori Produksi

Produksi adalah proses transformasi *input* (faktor produksi) menjadi *output* (hasil produksi) yang memberikan nilai tambah. Kegiatan produksi tidak selalu berarti menciptakan barang baru secara fisik, tetapi juga meningkatkan nilai guna bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Petani yang menanam padi, pembudidaya yang membesarkan udang, nelayan yang mendaratkan ikan, hingga UMKM yang mengolah bandeng menjadi otak-otak semuanya melakukan produksi karena mengubah sumber daya menjadi produk bernilai ekonomi.

Input atau faktor produksi adalah seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Pada sektor agribisnis (pertanian, perikanan, peternakan) *input* dapat berupa lahan, benih, pupuk, pestisida, irigasi, tenaga kerja, pakan, probiotik, obat-obatan,kolam, kapur, kandang dan lain sebagainya.

Sedangkan *output* adalah hasil produksi yang dapat diukur dalam satuan fisik atau nilai ekonomi.

Dalam teori produksi, hubungan antara *input* dan *output* menjadi inti utama pembahasan. Setiap produsen akan berusaha mengombinasikan berbagai faktor produksi secara tepat agar dapat menghasilkan *output* yang optimal. Oleh karena itu, teori produksi membantu produsen memahami batas kemampuan *input* dalam menghasilkan *output.* Dengan memahami teori produksi, petani, pembudidaya, maupun pelaku agribisnis lainnya dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dalam memilih kombinasi *input*, menentukan skala usaha, serta meningkatkan produktivitas dan keuntungan secara berkelanjutan.

6.2 Fungsi Produksi

Fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis antara jumlah *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Menurut Sudarsono (1995) Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan atau industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. Dalam keadaan teknologi tertentu hubungan antara *input* dan *output*-nya tercermin dalam rumusan fungsi produksinya. Apabila teknologi berubah, berubah pula fungsi produksinya.

Mubyarto (2003) memaknai fungsi produksi sebagai gambaran matematis dari hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan *(input)* dengan hasil produksi fisik

yang diperoleh *(output*). Secara sederhana, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis:

$$Y = f\ (x_1\ , x_2 \dots \dots \dots \dots x_n)$$

Di mana :

Y : Hasil produksi fisik *(output)*

$x_1 \dots x_n$: Faktor – faktor produksi

Fungsi produksi dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu analisisnya, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, terdapat minimal satu faktor produksi yang bersifat tetap (*fixed input*), sementara faktor produksi lainnya bersifat variabel. Sebaliknya, dalam jangka panjang seluruh faktor produksi diasumsikan dapat berubah sesuai kebutuhan produsen. Mankiw (2021) menjelaskan perbedaan jangka waktu ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan produsen dalam melakukan penyesuaian produksi. Pada kondisi jangka pendek, berlaku hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (*Law of Diminishing Returns*), yang menyatakan bahwa penambahan satu unit *input* variabel secara terus-menerus akan menghasilkan tambahan *output* (*Marginal Product*) yang semakin menurun pada titik tertentu.

Salah satu bentuk fungsi produksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian empiris, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Soekartawi (2016) menjelaskan bahwa fungsi Cobb-Douglas dipilih karena kemudahannya dalam proses estimasi

serta kemampuannya dalam menggambarkan elastisitas produksi masing-masing *input* secara langsung dari nilai koefisien regresinya. Selain itu, fungsi *Cobb-Douglas* mudah ditransfer kedalam bentuk linear serta mudah untuk melihat hubungan *input* dan *output.* Dengan karakteristik tersebut, fungsi *Cobb-Douglas* banyak digunakan untuk menganalisis seberapa besar perubahan *output* akibat perubahan penggunaan *input* produksi, seperti benih, pupuk, pakan, tenaga kerja, dan luas lahan. Dalam konteks agribisnis, model ini juga membantu peneliti mengidentifikasi *input* mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan produksi sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan usaha.

6.3 Produk Total, Produk Rata-rata, dan Produk Marginal

Produk Total (*Total Product*/ TP), Rata-rata (*Average Product*/ AP) dan Produk Marginal (*Marginal Product*/MP) merupakan turunan dari fungsi produksi dan sangat penting untuk memahami hubungan antara penggunaan *input* dan *output* yang dihasilkan. Hubungan antara ketiga konsep tersebut dapat divisualisasikan melalui kurva produksi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Dua grafik yang saling berkaitan menggambarkan hubungan antara penggunaan *input* tenaga kerja (L) dengan *output* yang dihasilkan dalam proses produksi. Grafik pertama (atas) menunjukkan kurva *Total Product* (TP), sedangkan grafik

kedua (bawah) menampilkan kurva *Average Product* (AP) dan *Marginal Product* (MP) secara bersamaan.

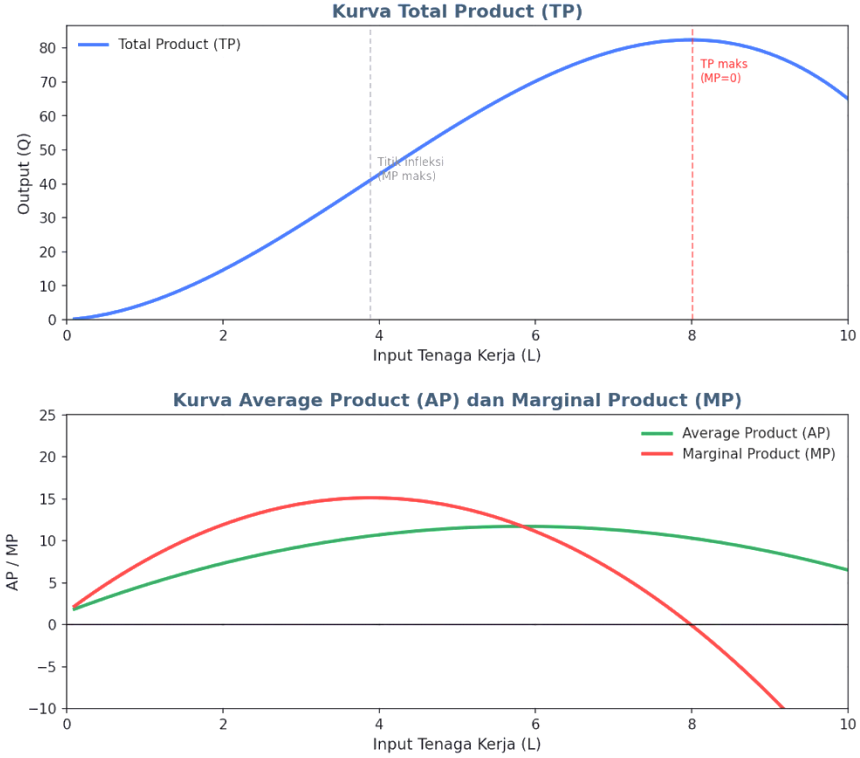

Gambar 6.1 Kurva *Total Product (TP), Average Product (AP), dan Marginal Product (MP)*

Pada grafik TP (atas), terlihat bahwa ketika tidak ada tenaga kerja yang digunakan, *output* yang dihasilkan adalah nol. Seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja, *output* meningkat secara pesat pada awalnya. Peningkatan ini berlangsung hingga mencapai titik infleksi pada sekitar L = 4,

yang ditandai dengan garis putus-putus abu-abu. Titik ini menandai berakhirnya **Fase I** sekaligus awal dari **Fase II**, dan merupakan titik di mana *Marginal Product* (MP) mencapai nilai tertingginya. Artinya, pada Fase I setiap penambahan tenaga kerja masih memberikan tambahan *output* yang terus membesar. Namun produsen belum dikatakan benar-benar efisien di sini, karena *Average Product* (AP) pun masih terus naik yang berarti potensi produktivitas setiap tenaga kerja belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Memasuki **Fase II**, TP masih terus meningkat namun lajunya semakin melambat. MP mulai menurun meskipun masih bernilai positif, sementara AP mencapai puncaknya tepat di titik perpotongan dengan MP, kemudian ikut menurun. Fase II berlangsung hingga sekitar L = 8, yang ditandai garis putus-putus merah, yaitu titik di mana TP mencapai nilai maksimumnya dan MP sama dengan nol. Fase II inilah zona produksi yang paling rasional, karena setiap penambahan tenaga kerja masih memberikan tambahan *output* yang positif. Produsen yang bijak akan memilih beroperasi di rentang ini.

Setelah melewati L = 8, produksi memasuki **Fase III**. Pada fase ini penambahan tenaga kerja justru membuat total *output* turun, karena MP sudah bernilai negatif. Kondisi ini terjadi karena jumlah tenaga kerja sudah terlalu banyak dibandingkan lahan atau peralatan yang tersedia, sehingga mereka justru saling mengganggu satu sama lain. Fase III

adalah zona yang tidak rasional dan sebaiknya dihindari oleh setiap produsen.

Pada grafik AP dan MP (bawah), terlihat bahwa kurva MP (merah) naik dengan cepat lalu turun dan akhirnya bernilai negatif setelah L = 8, sejalan dengan apa yang terjadi pada kurva TP di atas. Sementara itu, kurva AP (hijau) juga berbentuk busur namun lebih landai dan lebih lambat mencapai puncaknya. Yang perlu diperhatikan adalah perpotongan antara kurva MP dan AP terjadi tepat di titik puncak AP. Hal ini bukan kebetulan, melainkan hubungan matematis yang selalu berlaku: ketika MP lebih besar dari AP, nilai AP akan terus meningkat; ketika MP lebih kecil dari AP, nilai AP akan menurun; dan ketika MP tepat sama dengan AP, itulah titik di mana AP mencapai nilai tertingginya.

Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan berlakunya **Hukum Hasil yang Semakin Menurun** *(Law of Diminishing Returns)*. Zona produksi yang paling rasional bagi seorang produsen berada di Fase II, yakni pada kisaran L = 4 hingga L = 8, di mana AP dan MP sama-sama masih bernilai positif meskipun keduanya sudah mulai menurun. Berikut disajikan tabel konsep dasar produksi mengenai TP, AP dan MP secara singkat sehingga mudah dipahami.

Tabel 6.1 Konsep-Konsep Dasar Produksi (TP, AP, dan MP)

Konsep	Definisi	Formula	Keterangan
Total Product (TP)	Total *output* yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah *input* variabel tertentu	TP = f(L)	Dikenal juga sebagai Total *Physical Product*
Average Product (AP)	*Output* rata-rata per unit *input* variabel	AP = TP / L	Mengukur produktivitas rata-rata
Marginal Product (MP)	Tambahan *output* akibat penambahan satu unit *input* variabel	MP = ΔTP / ΔL	Mengukur produktivitas marjinal

6.4 Kurva *Isoquant* dan *Isocost*

Analisis isokuan digunakan dalam jangka panjang ketika semua faktor produksi bersifat variabel. *Isoquant* menggambarkan berbagai kombinasi dua *input* yang menghasilkan tingkat *output* yang sama.

Sifat-sifat kurva *isoquant*:

- Mempunyai kemiringan negatif (*slope* negatif)
- Cembung ke arah titik asal (*convex to origin*)
- Tidak saling berpotongan antara satu *isoquant* dengan *isoquant* lainnya

- *Isoquant* yang lebih jauh dari titik asal menunjukkan *output* yang lebih besar

Salah satu konsep penting yang muncul dari kurva *isoquant* adalah *Marginal Rate of Technical Substitution* (MRTS), yaitu tingkat di mana suatu *input* dapat digantikan oleh *input* lain tanpa mengubah jumlah *output* yang dihasilkan. Sederhananya, MRTS menunjukkan seberapa banyak *input* modal (K) yang bersedia dikorbankan oleh produsen apabila ia menambah satu unit tenaga kerja (L), dengan syarat *output* tetap sama. Nilai MRTS ini tercermin dari kemiringan *(slope)* kurva isokuan pada setiap titiknya, dan secara matematis dirumuskan sebagai:

$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L}$$

atau dalam bentuk *Marginal Product*:

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

Keterangan:

$MRTS_{LK}$: tingkat substitusi teknis marginal antara tenaga kerja dan modal

K : modal

L : tenaga kerja

MP_L : *Marginal Product* tenaga kerja

MP_K : *Marginal Product* modal

Kurva ***isocost*** menggambarkan berbagai kombinasi dua *input*, yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K), yang dapat dibeli oleh produsen dengan jumlah anggaran tertentu. Semakin

besar anggaran yang tersedia, maka kurva *isocost* akan bergeser semakin jauh dari titik asal, mencerminkan kemampuan produsen untuk membeli lebih banyak *input.* Secara matematis, kurva *isocost* dirumuskan sebagai:

$$TC = wL + rK$$

Di mana TC adalah total biaya (*total cost*), w adalah tingkat upah tenaga kerja, dan r adalah harga sewa modal. Apabila persamaan tersebut diselesaikan untuk K, maka diperoleh bentuk yang lebih mudah digambarkan dalam grafik:

$$K = TC/r - (w/r)L$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa kemiringan (slope) kurva *isocost* ditentukan oleh rasio harga kedua *input*, yaitu −w/r. Artinya, semakin mahal tenaga kerja dibandingkan modal, maka garis *isocost* akan semakin curam.

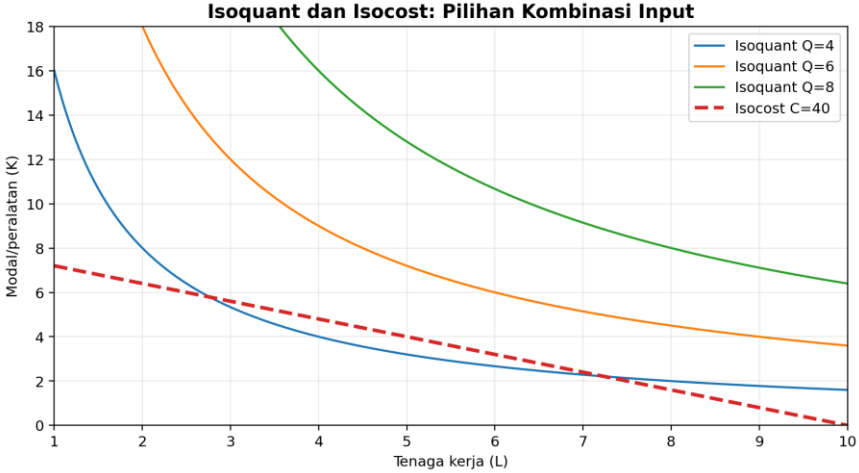

Gambar 6.2 Kurva *isoquant dan isocost*

Gambar 6.2 menampilkan tiga kurva *isoquant* (Q = 4, Q = 6, dan Q = 8) beserta satu garis *isocost* (C = 40) dalam satu grafik. Sumbu tegak menunjukkan jumlah modal (K) dan sumbu mendatar menunjukkan jumlah tenaga kerja (L) yang digunakan dalam produksi.

Ketiga kurva *isoquant* berbentuk melengkung ke arah titik asal dan tidak saling berpotongan. Semakin jauh kurva dari titik asal, semakin besar *output* yang dihasilkan. Artinya, Q = 8 menghasilkan *output* lebih banyak dari Q = 6, dan Q = 6 lebih banyak dari Q = 4.

Garis putus-putus merah adalah garis *isocost* dengan anggaran C = 40, yang menggambarkan batas kemampuan produsen dalam membeli kombinasi *input.* Dengan anggaran tersebut, garis *isocost* hanya mampu menyentuh kurva *isoquant* Q = 4 pada sekitar L = 3 dan K = 5. Titik singgung inilah yang disebut titik produksi optimal, yaitu kombinasi *input* yang menghasilkan *output* maksimum dengan anggaran yang tersedia. Adapun kurva Q = 6 dan Q = 8 tidak dapat dicapai dengan anggaran C = 40, sehingga untuk mencapainya produsen perlu menambah anggaran.

6.5 Skala Hasil (*Returns to scale*)

Setelah memahami bagaimana produsen menentukan kombinasi *input* yang optimal, pertanyaan selanjutnya adalah: apa yang terjadi pada *output* apabila semua *input* ditingkatkan secara bersamaan dan proporsional? Inilah yang disebut dengan konsep **skala hasil (*returns to scale*)**, yang merupakan analisis dalam jangka panjang di mana seluruh faktor produksi bersifat variabel. Terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat terjadi, yaitu *Increasing Returns to scale* (IRS), *Constant Returns to scale* (CRS), dan *Decreasing Returns to scale* (DRS) (Soekartawi, 1994).

Increasing Returns to scale (IRS) terjadi ketika penambahan seluruh *input* secara proporsional menghasilkan peningkatan *output* yang lebih besar dari proporsi penambahan *input* tersebut. Misalnya, seluruh *input* ditambah sebesar 10%, namun *output* yang dihasilkan meningkat lebih dari 10%.

Constant Returns to scale (CRS) terjadi ketika penambahan seluruh *input* secara proporsional menghasilkan peningkatan *output* yang sama persis dengan proporsi penambahan *input*. Misalnya, seluruh *input* ditambah 10% dan *output* pun meningkat tepat 10%.

Decreasing Returns to scale (DRS) terjadi ketika penambahan seluruh *input* secara proporsional justru menghasilkan peningkatan *output* yang lebih kecil dari proporsi penambahan *input* tersebut. Misalnya, seluruh *input*

ditambah 10% namun *output* hanya meningkat kurang dari 10%.

Dalam fungsi produksi *Cobb-Douglas* $Q = A\ L^{\alpha}\ K^{\beta}$, jenis *returns to scale* dapat diidentifikasi langsung dari penjumlahan nilai eksponen kedua *input*-nya (Soekartawi, 1994), yaitu:

- Jika $\alpha + \beta > 1$, maka terjadi ***Increasing Returns to scale***
- Jika $\alpha + \beta = 1$, maka terjadi ***Constant Returns to scale***
- Jika $\alpha + \beta < 1$, maka terjadi ***Decreasing Returns to scale***

6.6 Teori Biaya Produksi

Biaya produksi adalah nilai ekonomi dari seluruh *input* yang digunakan untuk menghasilkan *output.* Dalam ilmu ekonomi, biaya tidak hanya berupa uang yang benar-benar dibayarkan, tetapi juga mencakup biaya kesempatan. Oleh karena itu, biaya dalam ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu **biaya eksplisit** dan **biaya implisit.** Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dibayarkan, misalnya pembelian benih, pakan, pupuk, upah tenaga kerja, sewa lahan, listrik, dan transportasi. Biaya implisit adalah biaya atas sumber daya milik sendiri yang digunakan dalam usaha, misalnya tenaga kerja keluarga, lahan milik sendiri, atau modal sendiri yang sebenarnya memiliki alternatif penggunaan lain.

Dalam pencatatan usaha pertanian dan perikanan, biaya juga sering dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah dalam jangka pendek meskipun *output* berubah sedangkan biaya variabel berubah mengikuti skala produksi.

6.6.1 Biaya Jangka Pendek

Biaya jangka pendek terjadi ketika sebagian *input* bersifat tetap, sehingga biaya produksi dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa **Biaya Tetap Total (*Total Fixed Cost*/*TFC*)** adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun *output* yang dihasilkan bertambah atau berkurang. Contohnya adalah biaya sewa lahan, pajak lahan, dan biaya penyusutan peralatan. Sebaliknya, **Biaya Variabel Total (*Total Variable Cost*/*TVC*)** adalah biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan jumlah *output* yang dihasilkan, seperti biaya pembelian benih, pupuk, pestisida, pakan, probiotik dan upah tenaga kerja harian. Penjumlahan keduanya menghasilkan **Biaya Total (*Total Cost*/TC):**

$$TC = TFC + TVC$$

Selain ketiga konsep tersebut, terdapat pula konsep biaya rata-rata dan biaya marjinal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan produksi. **Biaya Tetap Rata-rata (*Average Fixed Cost*/*AFC*)** diperoleh dengan membagi TFC dengan jumlah *output* (Q), sehingga nilainya akan terus menurun seiring bertambahnya *output* karena beban biaya tetap tersebar ke semakin banyak unit produksi. **Biaya Variabel Rata-rata (*Average Variable Cost*/*AVC*)** diperoleh dengan membagi TVC dengan Q, sedangkan **Biaya Total Rata-rata (*Average Total Cost*/*ATC*)** diperoleh dengan membagi TC dengan Q. Secara matematis:

$$AFC = TFC / Q$$
$$AVC = TVC / Q$$
$$ATC = TC / Q = AFC + AVC$$

Satu konsep yang paling krusial dalam analisis biaya adalah **Biaya Marjinal (*Marginal Cost*/*MC*)**, yaitu tambahan biaya total yang harus dikeluarkan akibat penambahan satu unit *output:*

$$MC = \Delta TC / \Delta Q$$

Kurva MC berbentuk U, artinya pada awalnya menurun kemudian meningkat kembali, sejalan dengan berlakunya hukum *diminishing returns*. Kurva MC selalu memotong kurva AVC dan ATC tepat di titik minimumnya masing-masing. Artinya, selama MC lebih kecil dari ATC maka ATC akan terus menurun, dan ketika MC lebih besar dari ATC maka ATC akan meningkat.

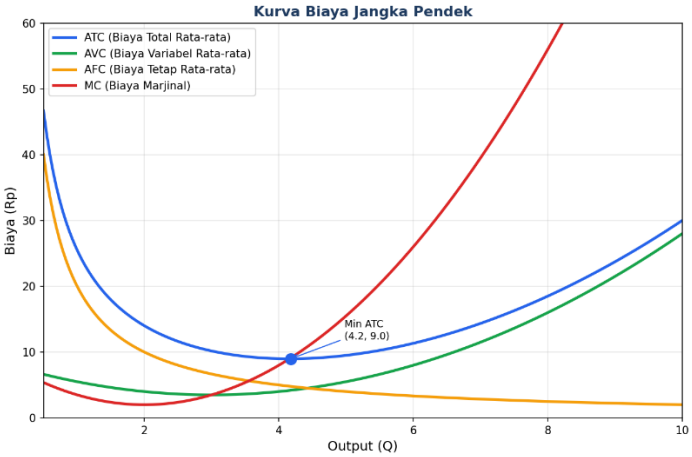

Gambar 6.3 Kurva Biaya Jangka Pendek

Kurva AFC (kuning) terus menurun dari kiri ke kanan sepanjang grafik. Hal ini wajar karena semakin banyak *output* yang dihasilkan, beban biaya tetap tersebar ke semakin banyak unit produksi sehingga biaya tetap per unitnya semakin kecil.

Kurva AVC (hijau) dan ATC (biru) keduanya berbentuk U, yaitu mula-mula menurun kemudian meningkat kembali. Posisi kurva ATC selalu berada di atas kurva AVC karena ATC merupakan penjumlahan dari AVC dan AFC. Seiring bertambahnya *output,* jarak antara ATC dan AVC semakin menyempit karena nilai AFC yang terus mengecil.

Kurva MC (merah) juga berbentuk U namun lebih curam. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah kurva MC memotong kurva ATC tepat di titik minimumnya, yaitu pada titik (4,2 ; 9,0). Ini berarti biaya total rata-rata paling rendah dicapai ketika *output* sebesar 4,2 unit dengan biaya Rp 9,0 per unit. Sebelum titik tersebut MC berada di bawah ATC sehingga ATC masih menurun, dan setelah titik tersebut MC berada di atas ATC sehingga ATC mulai meningkat.

6.6.2 Biaya Jangka Panjang

Sukirno (2016) menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, seluruh faktor produksi bersifat variabel sehingga tidak ada lagi perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Pada kondisi ini, produsen memiliki kebebasan penuh untuk menyesuaikan seluruh skala usahanya guna mencapai kombinasi *input* yang paling efisien.

Konsep utama dalam analisis biaya jangka panjang adalah **Biaya Total Rata-rata Jangka Panjang (*Long-Run Average Total Cost*/*LRATC*)**. Kurva LRATC dibentuk dari titik-titik terendah berbagai kurva ATC jangka pendek pada berbagai skala usaha, sehingga kurva LRATC sering disebut sebagai kurva amplop *(envelope curve)*. Bentuk kurva LRATC mencerminkan kondisi skala ekonomis yang dihadapi produsen:

- Ketika LRATC **menurun** seiring bertambahnya *output*, terjadi ***Economies of Scale***, produsen semakin efisien seiring pembesaran skala usaha
- Ketika LRATC **konstan**, terjadi ***Constant Returns to scale***, skala usaha tidak mempengaruhi efisiensi biaya rata-rata
- Ketika LRATC **meningkat**, terjadi ***Diseconomies of Scale***, pembesaran skala usaha justru menurunkan efisiensi karena masalah koordinasi dan manajemen yang semakin kompleks

Pemahaman tentang biaya jangka panjang sangat relevan bagi pelaku usaha pertanian dan perikanan yang sedang mempertimbangkan perluasan skala usaha. Dengan mengetahui posisi usahanya pada kurva LRATC, produsen dapat menentukan apakah perluasan usaha masih akan menurunkan biaya rata-rata atau justru sebaliknya.

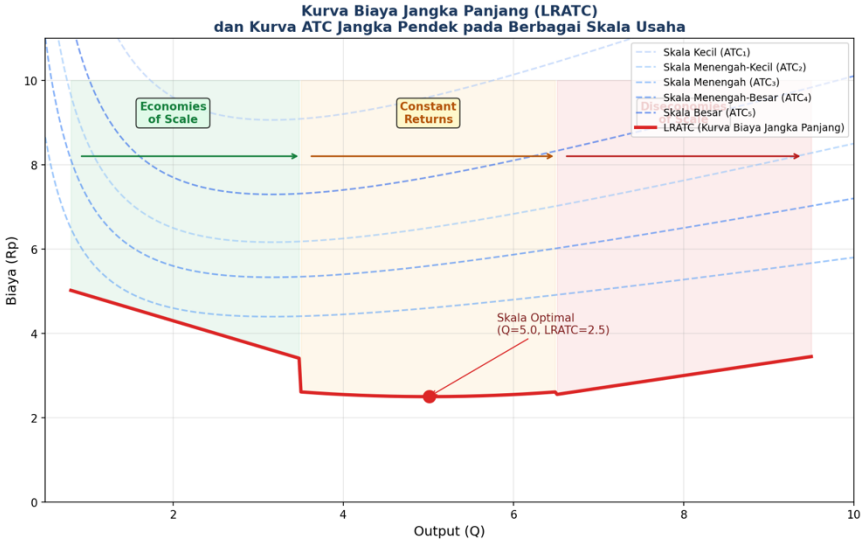

Gambar 6.4 Kurva Biaya Jangka Panjang

Gambar 6.4 menampilkan kurva **LRATC** (garis merah tebal) yang merupakan kurva biaya jangka panjang, beserta beberapa kurva ATC jangka pendek (garis biru putus-putus) pada berbagai skala usaha. Kurva LRATC terbentuk dari titik-titik terendah setiap kurva ATC jangka pendek, sehingga disebut **kurva amplop** *(envelope curve)*.

Kurva LRATC terbagi menjadi tiga zona. Pada zona pertama (***Economies of Scale***, area hijau), kurva LRATC menurun seiring bertambahnya *output*. Artinya, semakin besar skala usaha, biaya rata-rata semakin rendah, produsen semakin efisien. Pada zona kedua (***Constant Returns***, area kuning), kurva LRATC relatif datar, menunjukkan bahwa perubahan skala usaha tidak lagi mempengaruhi biaya rata-

rata secara signifikan. Pada zona ketiga (***Diseconomies of Scale***, area merah), kurva LRATC justru meningkat, artinya pembesaran skala usaha malah membuat biaya rata-rata semakin mahal akibat sulitnya koordinasi dan manajemen.

Titik terpenting adalah **skala optimal**, yaitu titik terendah kurva LRATC di mana biaya rata-rata paling minimum. Produsen yang ingin beroperasi paling efisien sebaiknya memilih skala usaha yang mendekati titik ini.

6.7 Hubungan Biaya dan Fungsi Produksi

Teori biaya dan teori produksi sesungguhnya merupakan dua sisi dari keping yang sama. Kurva-kurva biaya yang telah dibahas sebelumnya tidak muncul begitu saja, melainkan lahir langsung dari karakteristik fungsi produksi yang mendasarinya (Sukirno, 2016). Dengan kata lain, bentuk kurva biaya adalah cerminan dari bagaimana produktivitas *input* berperilaku dalam proses produksi.

Hubungan paling mendasar antara keduanya dapat dilihat melalui keterkaitan antara *Marginal Product* (MP) dan *Marginal Cost* (MC). Ketika tenaga kerja ditambahkan dan MP sedang meningkat, artinya setiap pekerja tambahan menghasilkan *output* yang semakin banyak maka, biaya untuk menghasilkan setiap unit *output* tambahan justru semakin kecil, sehingga MC menurun. Sebaliknya, ketika MP mulai menurun akibat berlakunya hukum diminishing returns, maka MC akan meningkat karena dibutuhkan lebih banyak *input*

untuk menghasilkan satu unit *output* tambahan. Hubungan ini dapat dinyatakan secara matematis sebagai:

$$MC = w / MPL$$

Di mana w adalah tingkat upah tenaga kerja dan MPL adalah *Marginal Product* of labor. Persamaan ini menunjukkan bahwa MC dan MP bergerak dalam arah yang **berlawanan**, ketika MP naik, MC turun; dan ketika MP turun, MC naik.

Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan antara *Average Product* (AP) dan *Average Variable Cost* (AVC):

$$AVC = w / APL$$

Ketika APL meningkat, AVC menurun; dan ketika APL menurun, AVC meningkat. Itulah mengapa kurva AVC dan kurva AP keduanya berbentuk U terbalik dan U, namun saling mencerminkan satu sama lain.

Secara ringkas, hubungan antara fungsi produksi dan kurva biaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Fase I produksi (MP meningkat) → MC menurun
- MP mencapai maksimum → MC mencapai minimum
- Fase II produksi (MP menurun, masih positif) → MC meningkat
- AP mencapai maksimum → AVC mencapai minimum
- Fase III produksi (MP negatif) → MC sangat tinggi, produksi tidak rasional

Pemahaman tentang hubungan ini sangat penting dalam agribisnis. Seorang petani atau pembudidaya yang memahami bahwa penurunan produktivitas *input*-nya, misalnya akibat kelebihan pupuk atau kepadatan benih yang terlalu tinggi

secara langsung akan mendorong kenaikan biaya produksi per unitnya, tentu akan lebih berhati-hati dalam menentukan jumlah *input* yang digunakan.

6.8 Aplikasi Teori Produksi dan Biaya di Sektor Agribisnis

Teori produksi tidak hanya bersifat abstrak, tetapi memiliki relevansi yang sangat nyata dalam sektor agribisnis. Penerapan fungsi produksi secara empiris dapat memberikan gambaran konkret tentang faktor-faktor apa saja yang paling menentukan hasil produksi suatu komoditas, sekaligus mengukur seberapa efisien sumber daya yang sudah digunakan oleh petani maupun pembudidaya.

Purnamasari, Hanani, dan Suhartini (2018) dalam penelitiannya tentang efisiensi teknis usahatani tebu di Mojokerto, Jawa Timur menggunakan pendekatan fungsi produksi stokastik *frontier Cobb-Douglas* dan menemukan bahwa pada lahan tegalan, faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi tebu adalah bibit dan tenaga kerja, sementara pada lahan sawah faktor yang berpengaruh nyata adalah tenaga kerja, pupuk urea, ponska, dan herbisida. Rata-rata efisiensi teknis usahatani tebu pada lahan tegalan mencapai 0,887 dan lahan sawah 0,928. Artinya, produksi tebu secara teknis sudah cukup baik, namun masih memiliki peluang peningkatan masing-masing sebesar 12% dan 7% untuk mencapai kondisi optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis lahan sangat menentukan kombinasi *input* yang

paling efektif, sehingga petani perlu menyesuaikan penggunaan faktor produksinya dengan karakteristik lahan yang dimiliki.

Hal serupa juga berlaku di sektor perikanan. Purnamasari, Muntalim, Mas'ud, dan Prihatini (2023) dalam penelitiannya tentang analisis faktor produksi dan efisiensi teknis budidaya udang vaname di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan menggunakan pendekatan yang sama dan menemukan bahwa faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname adalah benih, tenaga kerja, dan pakan. Ketiganya memiliki koefisien positif, artinya penambahan ketiga *input* tersebut akan meningkatkan hasil produksi. Rata-rata efisiensi teknis yang dicapai pembudidaya adalah 0,88, yang berarti produksi sudah cukup efisien namun masih dapat ditingkatkan sebesar 12% untuk mencapai kondisi optimal. Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang fungsi produksi dan pengalokasian *input* yang tepat merupakan kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha agribisnis.

6.9 Contoh Soal dan Pembahasan

Soal 1: *Law of Diminishing Returns* (Usahatani Padi)

Pak Beny memiliki lahan padi seluas 1 ha. Ia menambah jumlah tenaga kerja secara bertahap dengan *input* lain tetap. Data produksi yang diperoleh sebagai berikut:

Tenaga Kerja (orang)	Total Produksi/TP (kg)
1	200
2	480
3	810
4	1.080
5	1.300
6	1.440
7	1.470
8	1.400

a. Hitunglah MP dan AP untuk setiap tingkat tenaga kerja!
b. Pada jumlah tenaga kerja berapa TP mencapai maksimum?
c. Tentukan fase produksi dan zona produksi yang rasional

Pembahasan:

TK (orang)	TP (kg)	MP (kg/orang)	AP (kg/orang)	Fase
1	200	200	200	I
2	480	280	240	I
3	810	330	270	I (MP maks)
4	1.080	270	270	II (AP maks, MP=AP)
5	1.300	220	260	II
6	1.440	140	240	II
7	1.470	30	210	II
8	1.400	-70	175	III

a. MP dihitung dari selisih TP dibagi selisih *input* ($\Delta TP/\Delta L$), sedangkan AP dihitung dari TP dibagi jumlah tenaga kerja (TP/L) seperti pada tabel di atas
b. TP mencapai maksimum antara 7-8 orang tenaga kerja, yaitu saat MP mendekati dan menyentuh nol
c. Fase I terjadi pada penggunaan 1-3 orang tenaga kerja di mana MP terus meningkat. Fase II terjadi pada 4-7 orang di mana MP menurun namun masih positif, inilah **zona produksi rasional**. Fase III terjadi pada 8 orang ke atas di mana MP sudah negatif dan TP mulai menurun

Soal 2. Fungsi Produksi *Cobb-Douglas* (Usahatani Tebu)

Berdasarkan penelitian Purnamasari, Hanani, dan Suhartini (2018), fungsi produksi usahatani tebu lahan tegalan di Mojokerto Jawa Timur diestimasi menggunakan pendekatan stokastik frontier dengan hasil sebagai berikut:

$$\ln Y = 3{,}61 + 0{,}41 \ln X_1 + 0{,}30 \ln X_2$$

Di mana
X_1 = bibit (kw)
X_2 = tenaga kerja (HOK)

a. Tentukan elastisitas produksi masing-masing *input*!
b. Tentukan jenis *returns to scale*!
c. Jika bibit ditambah 10% dan tenaga kerja ditambah 10%, berapa persen *output* meningkat?
d. *Input* mana yang lebih berpengaruh terhadap produksi tebu?

Pembahasan:

a. **Elastisitas produksi:**
   - Elastisitas bibit (E_1) = 0,41 → penambahan bibit 1% meningkatkan produksi tebu sebesar 0,41%
   - Elastisitas tenaga kerja (E_2) = 0,30 → penambahan tenaga kerja 1% meningkatkan produksi tebu sebesar 0,30%

b. ***Returns to scale*:**
   Jumlah elastisitas = 0,41 + 0,30 = **0,71**
   Karena 0,71 < 1, terjadi **Decreasing *Returns to scale***, penambahan semua *input* secara proporsional menghasilkan peningkatan *output* yang lebih kecil dari proporsi penambahan *input.*

c. **Jika bibit dan tenaga kerja masing-masing ditambah 10%:**
   $\Delta Y\% = (0{,}41 + 0{,}30) \times 10\% = 0{,}71 \times 10\% =$ **7,1%**
   Output hanya meningkat 7,1%, lebih kecil dari 10% penambahan *input.*

d. *Input* yang lebih berpengaruh adalah **bibit** dengan elastisitas 0,41, lebih besar dibandingkan tenaga kerja (0,30).

Soal 3. Kurva Biaya dan Hubungan MC-ATC (Budidaya Ikan Lele)

Pak Rudi membudidayakan ikan lele dengan fungsi biaya total:

$TC = 2Q^2 + 10Q + 50.000$ (dalam ribuan rupiah, Q = kg lele)

Dari persamaan tersebut:

a. Tentukan fungsi TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, dan MC!
b. Pada *output* berapa ATC mencapai minimum?
c. Buktikan bahwa pada titik minimum ATC, nilai MC = ATC!
d. Apakah kurva MC memotong ATC dari bawah atau dari atas? Jelaskan!

Pembahasan:

a. Fungsi-fungsi biaya:
   TFC = 50.000 (konstan, tidak tergantung Q)
   $TVC = 2Q^2 + 10Q$
   $AFC = TFC/Q = 50.000/Q$
   $AVC = TVC/Q = 2Q + 10$
   $ATC = TC/Q = 2Q + 10 + 50.000/Q$
   $MC = dTC/dQ = 4Q + 10$
b. ATC minimum:
   Syarat minimum: $dATC/dQ = 0$
   $dATC/dQ = 2 - 50.000/Q^2 = 0$
   $Q^2 = 25.000$
   Q = 158,1 kg
   ATC minimum = 2(158,1) + 10 + 50.000/158,1 = 316,2 + 10 + 316,3 = Rp 642,5 ribu/kg
c. Pembuktian MC = ATC saat minimum:
   MC pada Q = 158,1:
   MC = 4(158,1) + 10 = 632,4 + 10 = Rp 642,4 ribu/kg
   ATC = Rp 642,5 ribu/kg

MC ≈ ATC maka Terbukti bahwa pada titik minimum ATC, nilai MC sama dengan ATC.

d. Kurva MC memotong ATC dari bawah ke atas.

Hal ini karena sebelum titik perpotongan, MC < ATC sehingga ATC masih menurun.

Setelah titik perpotongan, MC > ATC sehingga ATC mulai meningkat.

Titik perpotongan itulah yang menjadi titik minimum ATC.

Berikut gambar kurva biaya jangka pendek budidaya ikan lele TC = $2Q^2$ + 10Q + 50.000 di mana titik biru menunjukkan titik minimum ATC di mana MC = ATC (Q ≈ 158 kg).

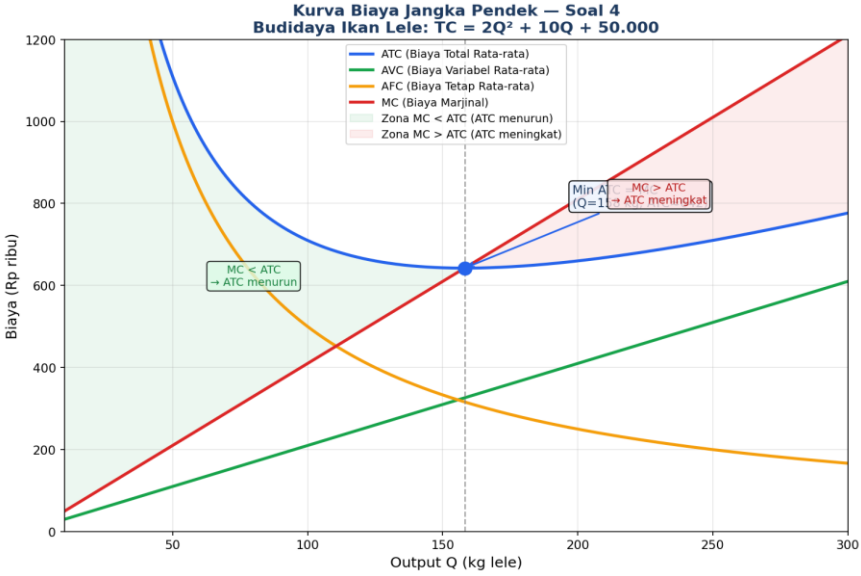

REFERENSI

Mankiw, N. G. (2021). Principles of Microeconomics (9th ed.). Cengage Learning.

Mubyarto. (2003). Pengantar Ekonomi Pertanian. Aditya Media. Yogyakarta.

Purnamasari, I., Hanani, N., & Suhartini, S. (2018). Technical Efficiency Analysis of Sugar Cane Farming in East Java, Indonesia (Statistical Approach of Frontier Production Functions). *Agricultural Socio-Economics Journal*, 18(1), 23–29.

Purnamasari, I., Muntalim, Mas'ud, F., & Prihatini, E. S. (2023). Analisis Faktor Produksi dan Tingkat Efisiensi Teknis Budidaya Udang Vaname di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Grouper: Jurnal Ilmiah Perikanan*, 14(2), 106–111.

Soekartawi. (1994). *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas*. Jakarta: CV Rajawali.

Soekartawi. (2016). Analisis Usahatani. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Sudarsono. (1995). Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta.

Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

BAB 7
STRUKTUR PASAR DAN PENENTUAN HARGA

Dr. Iis Ismawati, S.Hut., M.Si.

7.1 Struktur Pasar

Pasar merupakan arena interaksi antara penjual dan pembeli yang di dalamnya terbentuk mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, pemahaman tentang struktur pasar menjadi fundamental karena menentukan bagaimana harga terbentuk, bagaimana perusahaan berperilaku, serta bagaimana alokasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat dapat dioptimalkan. Sedangkan struktur pasar merujuk pada karakteristik organisasi pasar yang membentuk perilaku persaingan serta kemampuan setiap perusahaan dalam memengaruhi harga. Pemahaman mendalam tentang struktur pasar tidak hanya penting untuk analisis teoritis, tetapi juga menjadi fondasi dalam merumuskan strategi bisnis yang adaptif di tengah dinamika ekonomi modern. Berdasarkan sejumlah kajian sistematis terkini, struktur pasar memengaruhi secara signifikan pada keputusan penetapan harga, inovasi produk, strategi pemasaran, hingga kebijakan ekspansi Perusahaan (Marwan, Barmitoni, & Zefriyenni, 2025).

Secara teoritis, struktur pasar diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama: pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoly. Masing-masing struktur pasar memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah penjual dan pembeli, derajat diferensiasi produk, hambatan masuk dan keluar pasar, serta tingkat penguasaan informasi oleh pelaku pasar (Rahmat, 2024). Perbedaan karakteristik ini selanjutnya memengaruhi bagaimana setiap perusahaan dalam struktur pasar tersebut menetapkan harga dan menentukan tingkat *output* optimal.

7.2 Struktur Pasar Persaingan Sempurna

7.2.1 Definisi dan Ciri-Ciri Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang secara teoritis dianggap sebagai bentuk pasar paling ideal karena menjamin terwujudnya efisiensi alokatif dan produktif secara optimal. Dalam struktur pasar ini, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satu pun pelaku pasar yang dapat memengaruhi harga secara individual. Namun Hardiansyah, Raja; Putri, (2021) menyatakan bahwa dalam praktiknya tidaklah mudah menentukan jenis industri yang digolongkan dalam persaiangan sempurna murni, yang ada adalah yang mendekati ciri-cirinya. Menurut *Ramadhan et al*., (2025), pasar persaingan sempurna menghasilkan penetapan harga yang tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh produsen, sehingga harga produk tidak menjadi satu-

satunya acuan yang menarik konsumen untuk membeli dari suatu produsen dibandingkan pesaingnya.

Karakteristik Pasar Persaingan Sempurna:

a. Jumlah Penjual dan Pembeli yang Sangat Banyak: Jumlah penjual dan pembeli sangat besar sehingga masing-masing tidak dapat memengaruhi harga pasar. Setiap penjual hanya menjual sebagian kecil dari total penawaran, sementara setiap pembeli hanya membeli sebagian kecil dari total permintaan.
b. Produk Homogen (Identik): Barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau identik, artinya produk dari satu penjual sama persis dengan produk dari penjual lain. Konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produk dari penjual tertentu karena tidak ada perbedaan kualitas, bentuk, atau merek yang membedakan.
c. Kebebasan Masuk dan Keluar Pasar (*Free Entry and Exit*): Setiap perusahaan bebas untuk memasuki atau keluar dari industri tanpa hambatan berarti. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian, dapat keluar pasar dan sebaliknya.
d. Pengetahuan Pasar yang Sempurna (Perfect Knowledge): Semua pelaku pasar (baik penjual maupun pembeli) memiliki informasi yang sempurna tentang harga, kualitas produk, dan kondisi pasar secara keseluruhan.
e. Mobilitas Sumber Daya yang Sempurna: Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dapat bergerak bebas antar industri tanpa hambatan. Sehingga

diasumsikan tidak ada biaya transportasi dan harga di pasar menjadi sama.

f. Produsen berperan sebagai *Price Taker* (Penerima Harga): Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran agregat di pasar.
g. Kurva permintaan yang dihadapi produsen adalah garis lurus horizontal: Produsen dapat menjual *output* berapa pun jumlahnya pada tingkat harga yang berlaku, tanpa mengakibatkan penurunan harga.

7.2.2 Penentuan Harga dan *Output* Pasar Persaiangan Sempurna

Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan pada titik perpotongan antara kurva permintaan pasar (agregat) dan kurva penawaran pasar (agregat). Pada titik keseimbangan ini, jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Setiap perusahaan individual menghadapi kurva permintaan yang horizontal (elastis sempurna) pada tingkat harga keseimbangan tersebut. Artinya, perusahaan dapat menjual berapa pun jumlah *output* pada harga yang berlaku, tetapi tidak dapat menjual satu unit pun jika harga yang ditetapkannya di atas harga pasar.

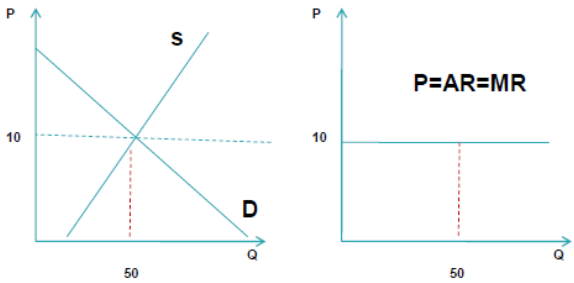

Gambar 7.1 (a) Kurva Permintaan Industri
(b) Kurva Permintaan Perusahaan

Pada pasar persaingan sempurna harga (P) tetap berapapun jumlah produk yang dijual sehingga berlaku persamaan:

P= AR=MR

Di mana: P = Price
AR= Average Revenue
MR=Marginal Revenue

Maksimalisasi laba dengan pendekatan total (*Total Revenue* dan *Total Cost*) terjadi jika selisih antara TR dan TC maksimun. Sedangkan pada pendekatan marginal, keputusan *output* optimal perusahaan dalam jangka pendek *(short-run*) dicapai pada saat pendapatan marjinal (*Marginal Revenue*/MR) sama dengan biaya marjinal (*Marginal Cost*/MC).

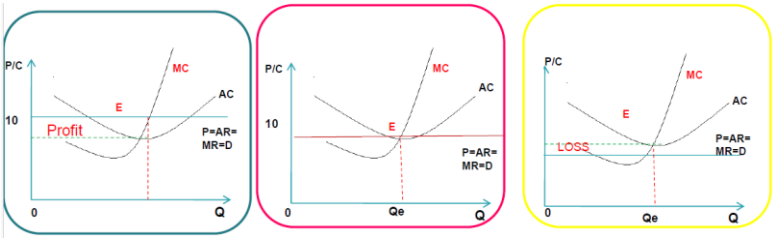

(a) Extra -*Profit* (b) Normal *Profit* (c) Loss *Profit*

Gambar 7.2 Kurva Maksimisasi *Profit* Pasar Persaingan Sempurna

Karena dalam persaingan sempurna harga (P) sama dengan MR (P = MR), maka syarat maksimisasi laba menjadi: P=MC. Sehingga pada jangka pendek Perusahaan dapat memperoleh extra *profit*, normal *profit* dan loss *profit*.

Shut down point atau titik penutupan usaha adalah titik di mana pendapatan total perusahaan dalam jangka pendek sama persis dengan biaya variabel totalnya, atau secara unit, harga sama dengan biaya variabel rata-rata minimum (P = AVC minimum). Pada titik ini, perusahaan berada dalam kondisi indifferent antara terus berproduksi atau berhenti sementara (*shut down*) karena kerugian yang diderita sama besarnya dengan biaya tetap yang harus ditanggung jika berhenti berproduksi.

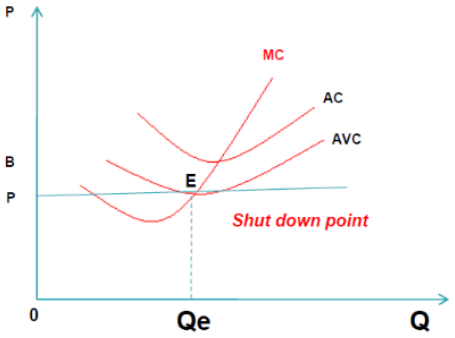

Gambar 7.3 Perusahaan Pada Posisi *Shut Down Point*

Keputusan perusahaan untuk terus berproduksi atau berhenti dalam jangka pendek didasarkan pada perbandingan antara harga (P) dengan biaya variabel rata-rata (AVC) pada berbagai tingkat *output.* Menurut (Pindyck & Rubinfeld, 2017) dalam jangka pendek, perusahaan tetap memiliki biaya tetap (*fixed cost*) yang harus dibayar meskipun produksi dihentikan sementara (misalnya biaya sewa gedung, bunga pinjaman, gaji manajer tetap). Oleh karena itu, keputusan *shut down* tidak menghilangkan biaya tetap, tetapi hanya menghindari biaya variabel yang timbul jika produksi dilanjutkan.

Terdapat tiga zona keputusan berdasarkan posisi harga relatif terhadap kurva AVC seperti pada Tabel Berikut:

Tabel 7.1 Zona Keputusan Perusahaan Pada Berbagai Kondisi Harga dan Biaya Variabel Rata-Rata

Kondisi Harga	Keputusan	Alasan
P > AVC minimun	Terus berproduksi	Perusahaan mampu menutup seluruh biaya variabel dan sebagian biaya tetap, sehingga kerugian < *total fixed cost*
P = AVC minimun	Shut down point (indifferent)	Kerugian = *total fixed cost*, baik berproduksi maupun tida
P < AVC minimun	Shut down (berhenti sementara)	Jika berproduksi, kerugian > total fixed cost; lebih baik berhenti dan hanya menanggung fixed cost

Sementara dalam jangka panjang (*long-run*), adanya asumsi kebebasan masuk dan keluar pasar menyebabkan laba *extra profit* menjadi nol. Jika perusahaan memperoleh laba di atas normal, pendatang baru akan masuk pasar sehingga penawaran meningkat, harga turun, dan laba kembali normal. Sebaliknya, jika perusahaan menderita kerugian, perusahaan akan keluar pasar sehingga penawaran menurun, harga naik,

dan kerugian tereliminasi. Akibatnya, dalam jangka panjang setiap perusahaan hanya akan memperoleh normal *profit*.

Konsekuensi dari kondisi ini adalah: (1) Efisiensi Alokatif: Harga mencerminkan biaya marjinal produksi, menunjukkan bahwa nilai barang bagi konsumen sama dengan biaya sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya.(2)Efisiensi Produktif: Dalam jangka panjang, perusahaan akan berproduksi pada titik di mana biaya total rata-rata (*Average Total Cost*/ATC) mencapai minimum, karena persaingan akan mendorong perusahaan untuk memproduksi pada skala paling efisien.

7.3 Struktur Pasar Monopoli

7.3.1 Definisi dan Ciri-Ciri Pasar Monopoli

Pasar monopoli termasuk dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu penjual (produsen) yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa, sementara barang yang dijual tidak memiliki substitusi yang dekat. Monopolis memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing yang dapat menawarkan produk pengganti serupa.

Karakteristik Pasar Monopoli:

a. Hanya ada satu penjual: Hanya terdapat satu perusahaan yang memproduksi dan menjual produk tertentu. Karena hanya satu penjual, maka perusahaan dan industri adalah sama

b. Tidak Ada Barang Substitusi yang Dekat: Produk yang dijual oleh monopolis tidak memiliki pengganti yang mirip atau dekat. Konsumen tidak dapat beralih ke produk lain jika ingin memenuhi kebutuhan yang sama.
c. Hambatan Masuk Pasar yang Tinggi (*High Barriers to Entry*): Hambatan masuk dapat berupa: (1) Natural monopoly (skala ekonomi sangat besar), (2) hak paten atau lisensi eksklusif, (3) kepemilikan tunggal atas sumber daya kunci, (4) monopoli legal yang diberikan negara.
d. Monopolis sebagai *Price Maker*: Monopolis dapat menentukan harga karena tidak ada pesaing yang dapat menawarkan harga lebih rendah. Namun, harga yang dapat ditetapkan tetap dibatasi oleh kurva permintaan pasar.
e. Kurva permintaan Perusahaan sama dengan kurva permintaan industri
f. Kurva Permintaan Menurun (*Downward Sloping Demand Curve*): Monopolis menghadapi kurva permintaan pasar yang menurun, artinya produsen harus menentukan berapa *output* yang diproduksi dan berapa harga yang ditetapkan agar keuntungan maksimum. Untuk itu produsen menjual lebih banyak *output*, maka harus menurunkan harga pada semua unit yang dijual.

7.3.2 Penentuan Harga dan *Output* Pasar Monopoli

Monopolis yang rasional akan berusaha menghasilkan *output* dan menjual harga pada tingkat optimal. Sehingga keuntungan ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan,

harga produk dan biaya produksi. Monopolis memaksimalkan laba pada tingkat *output* di mana MR = MC. Namun, karena MR < P, maka harga monopoli (Pm) akan lebih tinggi dari biaya marjinal (MC). Kondisi ini menciptakan *deadweight loss* atau kehilangan kesejahteraan, karena unit-unit barang yang seharusnya memberikan nilai lebih besar dari biaya produksinya (P > MC) tidak diproduksi. Dalam pasar monipoli, baik produksi short run maupun lon run, produsen dapat memperoleh extra *profit*, normal prodit dan loss *profit*. Hal ini terjadi karena hambatan masuk melindungi posisinya.

Menurut (Hardiansyah, Raja; Putri, 2021) perbedaan pasar monopoli dibanding pasar persaingan sempurna adalah: (1) bisa menetukan *output,* (2) bisa menentukan harga jual dan (3) keseimbangan Perusahaan sama dengan keseimbangan pasar. Di mana keuntungan maksimum tercapai bila MC = MR,

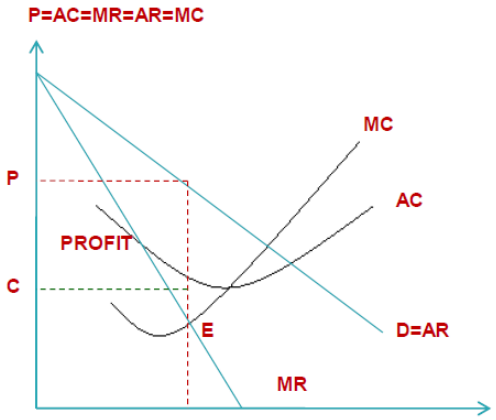

Gambar 4. Keuntungan Maksimum Pasar Monopoli

Dalam rangka memaksimumkan *profit*/revenue atau memperluas pangsa pasar, produsen monopoli dapat menerapkan harga/tarif yang berbeda, walaupun jumlah yang dijual sama banyak yang dikenal dengan *price discrimination*. Diskriminasi harga adalah strategi yang dapat dilakukan monopolis untuk meningkatkan laba lebih lanjut, yaitu dengan menjual produk yang sama kepada konsumen berbeda dengan harga berbeda, tanpa didasari perbedaan biaya. Tiga derajat diskriminasi harga:

a. Derajat pertama (*first-degree*): Setiap unit dijual pada harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen.
b. Derajat kedua (*second-degree*): Harga bervolume *(block pricing*), seperti diskon untuk pembelian dalam jumlah besar.
c. Derajat ketiga (*third-degree*): Segmentasi pasar berdasarkan karakteristik yang dapat diobservasi, seperti diskon pelajar, tiket pesawat berbeda antar waktu. Penelitian (Coleff & Rubbini, 2023) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengidentifikasi segmentasi konsumen dengan presisi tinggi

Saat monopoli memproduksi volume *output* yang lebih kecil daripada volume *output* yang maksimum, ini menunjukan monopoli menjadi tidak efesien dan cenderung merugikan masyarakat, karena ada unsur eksploitasi. Dari sisi konsumen ekploitasi berupa penetapan harga jual (P) di atas biaya produksi dari unit terakgir *output*nya (MC), sementara pada sisi pemilik factor produksi berupa upah tenaga kerja

yang lebih rendah daripada sumbangannya dalam bentuk *output.* Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatur monopoli diantaranya adalah:

a. Penetapan harga/price regulation: Kebijakan menetapkan Tingkat haarga maksimum *(Ceiling price)*
b. Pengaturan melalui pajak persatuan *output:* Pajak ini merupakan biaya vaariabel, sehingga kurva rata-rata biaya (AC) dan *marginal cost* (MC) bergeser keatas sejumlah pajak yang diterima. Pajak ini ditanggung konsumen dan produsen, di mana konsumen menanggung tambahan harga produk dan monopolis menanggung pengurangan laba.
c. Peneraapan Lum Sum Tax: Merupakan pajak yang dibebankan tanpa memperhatikan jumlah *output,* sehingga tidak merubah kurva MC namun hanya menggeser kurva AC. Harga dan jumlah produksi tetap, namun keuntungan monopolis berkurang.
d. Menetapkan undang-undang anti monopoli
e. Pemerintah mendirikan Perusahaan tandingan
f. Membuka kran impor

7.4 Struktur Pasar Monopolistik

7.4.1 Definisi dan Ciri-Ciri Pasar Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang berada di antara dua ekstrem: persaingan sempurna dan monopoli. Struktur ini menggabungkan unsur-unsur persaingan (karena banyak penjual) dengan unsur monopoli (karena produk terdiferensiasi). Istilah ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh (Chamberlin, 1933) dalam bukunya *"Theory of Monopolistic Competition"* yang mendefinisikan pasar monopolistik sebagai struktur pasar di mana banyak penjual menawarkan produk yang terdiferensiasi (*differentiated*) , sehingga setiap penjual memiliki monopoli atas produknya sendiri namun pada saat yang sama menghadapi persaingan dari produk-produk substitusi yang dekat.

Pasar persaingan monopolistik memiliki relevansi yang kuat dalam praktik nyata saat ini, terutama pada industri ritel yang dicirikan oleh banyaknya penjual dengan produk terdiferensiasi serta hambatan masuk yang relatif rendah. Contohnya, industri kopi ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya merek-merek populer seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan Fore Coffee. Merek-merek ini beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik, di mana banyak penjual menawarkan produk kopi yang serupa tetapi memiliki diferensiasi melalui rasa, kemasan, suasana kedai, dan strategi pemasaran yang unik. Sebuah studi oleh (Nurbaeti et al., 2025)

mengonfirmasi bahwa merek-merek kopi tersebut bersaing dengan menonjolkan diferensiasi produk untuk menarik konsumen.

Selain industri kopi, sektor kosmetik juga menunjukkan karakteristik pasar persaingan monopolistik yang kuat. Di pasar kosmetik Tiongkok, misalnya, Estée Lauder berhasil menguasai pangsa pasar produk kelas menengah dan atas yang signifikan dalam struktur persaingan monopolistik. Dalam studi yang dilakukan oleh (Gu, 2023), perusahaan ini memanfaatkan strategi diferensiasi dan iklan intensif untuk mengurangi dampak asimetri informasi dan memengaruhi perilaku konsumen yang seringkali tidak rasional. Secara global, merek-merek kosmetik halal lokal seperti Wardah di Indonesia juga beroperasi dalam struktur serupa dengan bersaing melalui diferensiasi produk berbasis nilai kehalalan yang menjadi keunikan tersendiri. Keberhasilan Estée Lauder dan Wardah di tengah persaingan ketat dan dominasi merek global membuktikan bahwa model persaingan monopolistik memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bersaing melalui harga, tetapi juga membangun loyalitas merek melalui diferensiasi yang berkelanjutan.

Karakteristik pasar monopolistik:

a. Jumlah Penjual Banyak: Terdapat banyak perusahaan yang bersaing, tetapi tidak sebanyak dalam persaingan sempurna. Setiap perusahaan hanya menguasai pangsa pasar yang relatif kecil sehingga tindakan satu perusahaan

tidak secara nyata mempengaruhi perusahaan lain secara langsung.

b. Diferensiasi Produk: Diferensiasi ini dapat berasal dari Karakteristik fisik produk: mutu, desain, warna, gaya, kemasan, merek dagang, paten dan Kondisi sekitar penjualan: lokasi toko, reputasi, keramahan pelayanan, kenyamanan, dan "ikatan pribadi" antara penjual dan pembeli. Akibat diferensiasi, produk dari setiap penjual menjadi unik sehingga penjual memiliki monopoli atas produknya sendiri, namun tetap bersaing dengan produk lain yang substitusi dekat.
c. Kebebasan Masuk dan Keluar Pasar *(Free Entry and Exit):* Dalam jangka panjang, perusahaan baru dapat masuk ke pasar dengan relatif mudah karena hambatan masuk tidak setinggi monopoli atau oligopoly. Demikian pula, perusahaan yang merugi dapat keluar tanpa rintangan berarti. Proses ini akan mendorong laba supernormal menjadi nol dalam jangka Panjang.
d. Kurva Permintaan yang Menurun: Setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan yang menurun (bukan horizontal seperti persaingan sempurna) karena diferensiasi produk. Namun kurva ini cukup elastis karena banyaknya produk substitusi dekat dari pesaing. Akibatnya, perusahaan memiliki kekuatan pasar yang terbatas (sedikit kemampuan mempengaruhi harga), tidak sekuat monopoli murni.

e. Persaingan Non-Harga *(Non-Price Competition):* Karena persaingan harga terbatas, perusahaan cenderung bersaing melalui Variasi produk seperti mengubah kualitas, desain, model, layanan dan Iklan dan biaya penjualan *(selling costs)* untuk membangun preferensi merek dan memperluas pasar.
f. Adanya Biaya Penjualan *(Selling Costs):* Berbeda dengan persaingan sempurna (yang tidak memerlukan biaya penjualan), dalam persaingan monopolistik pengeluaran untuk iklan, promosi, dan distribusi menjadi bagian integral dari strategi perusahaan
g. Perusahaan sebagai "*Competing* Monopolists" (Monopolis yang Bersaing): Setiap perusahaan adalah monopolis atas produknya sendiri, tetapi sekaligus pesaing karena produknya merupakan substitusi dekat bagi produk orang lain.

7.4.2 Penentuan Harga dan *Output* Pasar Monopolistik

Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan memiliki keleluasaan terbatas dalam menentukan harga karena dipengaruhi oleh diferensiasi produk (produk yang berbeda di mata konsumen) dan elastisitas permintaan (seberapa peka konsumen terhadap perubahan harga). Perusahaan dapat menetapkan harga di atas biaya marjinal (P > MC), namun kekuatan ini tidak sekuat pasar monopoli karena adanya produk substitusi yang dekat di pasar (Rayhan et al., 2025).

Dalam jangka pendek, perusahaan monopolistik dapat menikmati laba super normal karena kurva permintaan yang dihadapi menurun (downward sloping), sehingga pendapatan marjinal (MR) lebih kecil dari harga (P). Keseimbangan jangka pendek tercapai ketika MR = MC, di mana pada saat itu harga jual lebih besar dari biaya marjinal (P > MC), dan perusahaan beroperasi pada skala yang lebih kecil dari skala paling efisien (Lubis, et.al, 2025).

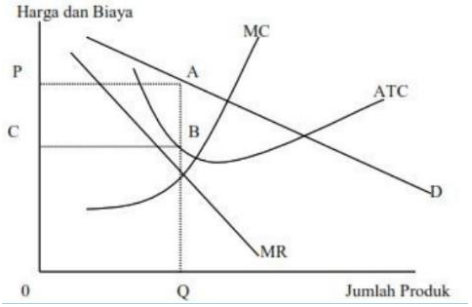

Gambar 7.4 Grafik Keseimbangan Pasar Monopolistik

Namun, karena dalam pasar ini tidak ada hambatan masuk yang berarti, keuntungan extra *profit* ini akan menarik perusahaan baru masuk ke pasar. Akibatnya, kurva permintaan setiap perusahaan bergeser ke kiri hingga pada titik P = ATC (harga sama dengan biaya total rata-rata), sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh normal *profit* dan tetap beroperasi dengan kapasitas berlebih *(excess capacity)* karena tidak memproduksi pada biaya rata-rata minimum. Dalam keseimbangan ini,

harga masih lebih tinggi dibandingkan biaya marjinal dan *output* yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan skala optimal, yang merupakan ciri inefisiensi pasar ini.

7.5 Struktur Pasar Oligopoli

7.5.1 Definisi dan Ciri-Ciri Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan yang mendominasi pangsa pasar. Jumlah perusahaan yang sedikit menyebabkan setiap tindakan satu perusahaan (misalnya menurunkan harga atau meluncurkan produk baru) akan memengaruhi perusahaan lain secara signifikan, sehingga terjadi interdependensi strategis antar perusahaan.

Karakteristik Pasar Oligopoli:

a. Sedikit Penjual: Hanya terdapat dua hingga sepuluh perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar
b. Produk Homogen atau Terdiferensiasi: Produk dapat bersifat homogen (misalnya semen, baja) atau terdiferensiasi (misalnya mobil, smartphone, rokok).
c. Hambatan Masuk Pasar yang Tinggi: Hambatan dapat berupa skala ekonomi yang sangat besar, kebutuhan modal besar, loyalitas merek yang kuat, regulasi, atau kepemilikan teknologi eksklusif.
d. Interdependensi dan Saling Ketergantungan: Setiap perusahaan harus mempertimbangkan reaksi pesaing

dalam setiap keputusan harga atau *output*. Fenomena ini sering dianalisis menggunakan *game theory*.

e. Persaingan Non-Harga yang Intensif: Karena perang harga dapat merugikan semua pihak, perusahaan oligopoli cenderung bersaing melalui iklan, inovasi produk, dan diferensiasi merek.
f. Kekakuan Harga (*Price Rigidity):* Harga cenderung stabil karena perusahaan enggan mengubah harga.

Berdasarkan sifat produk dan pola perilaku perusahaan, pasar oligopoli dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Berdasarkan Sifat Produk

1) Oligopoli Murni: Oligopoli murni adalah pasar di mana beberapa perusahaan besar menjual produk yang homogen (identik), sehingga konsumen tidak dapat membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya adalah industri semen, air mineral dalam kemasan, dan baja. Karena produk sulit dibedakan, persaingan cenderung berfokus pada harga, efisiensi biaya, dan pengelolaan kapasitas produksi
2) Oligopoli Terdiferensiasi (Differentiated Oligopoly): Merupakan pasar di mana beberapa perusahaan besar menjual produk yang sejenis tetapi memiliki karakteristik berbeda, seperti perbedaan kualitas, desain, fitur, merek, atau layanan tambahan. Karena diferensiasi menciptakan persepsi nilai yang berbeda di mata konsumen, sensitivitas terhadap perubahan harga

menjadi relatif lebih rendah. Contohnya hasil penelitian (Septya et al., 2018) tentang pasar beras di Surabaya , di mana perilaku pasar, fungsi grading, pengemasan dan pemberian merek oleh pedagang besar mendorong terciptanya diferensiasi produk sehingga dapat melakukan kolusi penetapan harga untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu.

B. Berdasarkan Pola Perilaku:

1) Oligopoli Kolusif: Oligopoli kolusif terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam industri secara sengaja bekerja sama (baik secara eksplisit maupun implisit) untuk mengendalikan harga dan *output* bersama, demi memaksimalkan keuntungan kolektif. Bentuk kolusi yang paling umum adalah kartel di mana sebuah perjanjian formal antar perusahaan untuk menetapkan harga, membatasi produksi, atau membagi pangsa pasar. Contoh klasiknya adalah OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) dalam mengendalikan pasokan dan harga minyak dunia.
2) Oligopoli Non-Kolusif: terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam industri bersaing secara independen tanpa adanya kesepakatan mengenai harga atau strategi pasar. Setiap perusahaan secara mandiri berusaha mengungguli pesaing melalui pemotongan harga, kampanye pemasaran, dan inovasi produk, namun tetap dalam kondisi saling ketergantungan.

Duopoli (duopoly) merupakan bentuk khusus (subkategori) dari pasar oligopoli dengan jumlah peserta yang paling minimal, yaitu hanya dua perusahaan yang mendominasi penawaran barang atau jasa di pasar. Sementara itu, oligopoli secara umum mencakup pasar dengan dua perusahaan atau lebih, yang jumlahnya dapat bervariasi tetapi tetap terbatas (biasanya kurang dari sepuluh perusahaan).

7.5.2 Penentuan Harga Pasar Oligopoli

Berbeda dengan struktur pasar sebelumnya, tidak ada satu model tunggal yang dapat menjelaskan perilaku penetapan harga dalam oligopoli karena kompleksitas interdependensi. Beberapa model utama meliputi:

a. Model Cournot (Kompetisi Kuantitas): Perusahaan bersaing dengan memilih *output* secara simultan, menganggap *output* pesaing tetap. Hasilnya, *output* total lebih besar dari monopoli tetapi lebih kecil dari persaingan sempurna, dan harga di antara keduanya
b. Model Bertrand (Kompetisi Harga): Perusahaan bersaing dengan memilih harga secara simultan. Jika produk homogen, hasil akhirnya harga sama dengan biaya marjinal. Dalam praktik, produk biasanya terdiferensiasi sehingga perusahaan dapat menetapkan harga di atas MC.
c. Model Stackelberg (Pemimpin–Pengikut): Satu perusahaan menjadi *first mover* (pemimpin) yang menentukan *output*

lebih dulu, lalu pesaing (pengikut) merespon. Pemimpin pasar mendapat laba lebih besar.

d. Model Kurva Permintaan Patah (*Kinked Demand Curve*): Menjelaskan kekakuan harga dalam oligopoli. Jika satu perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak akan mengikuti (kehilangan pelanggan). Jika menurunkan harga, pesaing akan segera mengikuti (tidak menambah pelanggan banyak). Akibatnya, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan patah pada harga saat ini, menghasilkan rentang MR vertikal yang memungkinkan biaya berubah tanpa mengubah harga.
e. Kolusi dan Kartel: Untuk menghindari persaingan destruktif, perusahaan oligopoli sering bekerja sama (*collusion*) secara eksplisit (kartel) atau implisit (*tacit collusion*). Kartel menetapkan harga dan *output* bersama seperti monopoli, namun seringkali tidak stabil. Misalnya tindakan anggota kartel yang secara sepihak melanggar kesepakatan demi keuntungan jangka pendeknya sendiri. Bentuk pelanggaran ini biasanya dilakukan dengan memproduksi lebih banyak dari kuota yang disepakati atau dengan diam-diam memotong harga di bawah harga kartel untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar.

REFERENSI

Chamberlin, E. (1933). The Theory of Monopolistic Competition. *Modern Economic Classics-Evaluations Through Time*, 65–107. https://doi.org/10.4324/9781315270548-12

Coleff, J., & Rubbini, C. (2023). Price discrimination: Teaching new results with simple exercises. *Journal of Economic Education*, *54*(2), 103–112. https://doi.org/10.1080/00220485.2023.2177221

Gu, J. (2023). *An Analysis of China's Cosmetics Market: Taking Estee Lauder Companies Inc. as an Example*. Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-142-5_60

Hardiansyah, Raja; Putri, A. S. (2021). *Pengantar Ekonomi Mikro* (Pertama). Insan Cendekia Mandiri.

Lubis, Nur Aisyah ; Zhafirah, Athaya Beli ; Alfarizi, Ashobi; Harahap, M. A. (2025). Pasar Persaingan Monopolistik. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, *19*(3).

Mawran; Barmitoni; Zefriyenni. (2025). Systematic Literature Review : Analisis Struktur Pasar Dan Dampaknya terhadap Strategi pasar dan strategi perusahaan , namun hasil-hasil penelitian tersebut cenderung tersebar , fokus. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *5*(3), 6952–6963. 10.54373/ifijeb.v5i3.4146

Nurbaeti, F., Affandi, M., Safri[3], R., & Mukti, T. (2025). Product Differentiation and Monopolistic Market Competition in the Retail Coffee Industry in Indonesia: A Review of Sharia Compliance and Its Impact on Consumer Choices. *Dinamis : Journal of Islamic Management and Bussiness*, *8*(2), 32–42.

https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/7142

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2017). *Microeconomics (9th ed.). Pearson.*

Rahmat, H. K. (2024). Navigating The Four Market Structures : Insights Into Firm Pricing and Strategy Menavigasi Empat Struktur Pasar : Wawasan Tentang. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, *3*(2), 93–100.

Ramadhan, A. W., Setiawan, B., & Cahyono, E. (2025). Konsumen dalam persaingan sempurna: bagaimana menaklukkan pasar persaingan sempurna di pasar tradisional? *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, *9*(4), 1598–1610. https://doli.olrg/10l.21776/ub.jepa.20l25.0l0l9l.044l.25

Rayhan, F., Irawan, P., & Arifianto, T. (2025). *Analisis struktur pasar dan strategi penetapan harga produk baru dalam persaingan monopilistik*. *6*(6), 9697–9704.

Septya, F., Widayanti, S., & Amir, I. T. (2018). *STRUKTUR DAN PERILAKU PASAR BERAS SURABAYA Structure and Conduct of Surabaya Rice Market*. *7*(1), 27–39.

BAB 8
PASAR FAKTOR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Marhusin, S.ST., M.A.B

8.1 Pasar Faktor Produksi

8.1.1 Pengertian Pasar Faktor Produksi

Pasar faktor produksi adalah pasar di mana para produsen atau perusahaan membeli masukan atau faktor produksi yang kemudian diolah menjadi barang produksi. Pasar produksi juga disebut pasar *input* atau pasar masukan (Dr. Mursyid., 2020).

Dalam kegiatan ekonomi, perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, faktor produksi tersebut diperoleh dari rumah tangga konsumen melalui faktor produksi. Perlu kita ketahui bersama bahwa pasar produksi berbeda dengan pasar barang dan jasa, di mana perusahaan bertindak sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Sedangkan pada pasar faktor produksi, rumah tangga konsumen bertindak sebagai penjual faktor produksi dan perusahaan sebagai pihak pembeli.

Keberadaan pasar produksi sangat penting dalam perekonomian karena ini menjadi sasaran distribusi sumber daya ekonomi sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, harga dari masing – masing

faktor produksi disebut sewa ekonomi di mana setiap faktor produksi dibayar lebih dari jumlah yang perlu untuk mempertahankan faktor produksi tersebut dalam penggunaannya.

Menurut (Feliks Arfid Guampe, 2020) sewa ekonomi (*economic rent*) merupakan selisih antar pembayaran untuk faktor tersebut dengan pembayaran minimal yang diperlukan untuk tetap dapat menggunakannya, artinya sewa ekonomi timbul bila jumlah laba lebih besar dari imbalan yang mungkin akan diterima oleh faktor produksi.

Berikut fungsi pasar produksi :

1. Menyediakan faktor produksi bagi perusahaan.
2. Menentukan harga faktor produksi.
3. Menjadi sarana memperoleh pendapatan bagi masyarakat.
4. Memperlancar proses produksi barang dan jasa.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi.

(Dr. Mursyid., 2020) Ada beberapa faktor yang menentukan permintaan *input* atau faktor produksi antara lain:

1. Teknologi. Hal ini dikarenakan perubahan teknologi yang semakin canggih akan meningkatkan produktivitas dari suatu *input* sehingga menggeser permintaan *input* ke kanan atas.
2. Bentuk Pasar. Bentuk pasar menentukan permintaan faktor produksi karena sekain elastis kurva permintaan

output maka permintaan faktor produksi akan semakin elastis.

3. Semua Variabel Independen yang Memperngaruhi permintaan *output* oleh sektor rumah tangga. Contohnya misal harga *output* perusahaan, pendapatan kosnumen, selra konsumen, iklan *output* perusahaan, distribusi pendapatan, dan kebijakan perusahaan dalam keuangan dan pemasaran akan menggeser permintaan konsumen ke kanan atas atau kekiri bawah sehingga permintaa faktor produksi juga akan bergeser ke kanan atas atau ke kiri bawah.

8.1.2 Jenis-jenis dalam Pasar Faktor Produksi

Ciri-ciri pasar faktor produksi yaitu pasar yang tidak memiliki wujud fisik melaikan berwujud kegiatan. Permintaan faktor produksi ini berasal dari produsen atau perusahaan yang melakukan proses produksi dan penawaran berasal dari rumahtangga sebagai pemilik faktor produksi atau disebut juga produsen faktor produksi. (Feliks Arfid Guampe, 2020) teori ekonomi membagi semua faktor produksi dalam empat kategori kegiatan utama yaitu:

1. Sumber daya alam atau *natural resources*, arinya disediakan oleh alam dalam jumlah terbatas, contohnya seperti tanah yang tidak mungkin ditambah dan aktiva yang akan mengalami deplesi seperti biji tembaga ataupun minyak bumi. Pendapatan bagi faktor tanah

yang tidak elastis sempurna di sebut dengan sewa (ekonomi murni)

2. Sumber daya manusia atau tenaga kerja (*human resources*). Faktor ini dihasilkan oleh faktor sosial dan biologis dan umumnya tidak diproduksi menurut tanggapan terdahap kondisi perekonomian, pendapatannya di sebut sebagai upah atau gaji.
3. Barang modal. Dihasilkan dari sistem perekonomian itu sendiri yang digunakan sebagai *input* produktif untuk selanjutnya, menghasilkan barang dan jasa. Barang modal ini termasuk akiva berumur panjang dan pendek, barang ini boleh disewakan dan pembayaran untuk pemanfaatan sementara barang modal dinamakan penyewaan atau *rental* dan berbeda dengan pengertian sewa tanah yang terbatas.
4. Keterampilan. Keterampilan manajerial yang berarti orang yang mengelola dan mengombinasikan faktor-faktor produksi lainnya secara profesional untuk dapat menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Keterampilan ini sangat diperlukan agar semua faktor produksi dapat digunakan secara produkti dengan biaya yang wajar dan menghasilkan pendapatan serta memperoleh keuntungan yang maksimal.

8.1.3 Pelaku Ekonomi dalam Pasar Faktor Produksi

Menurut (Prof. Dr. Elsyan Rienette Marlissa., 2026) terdapat tiga pelaku utama dalam pasar faktor produksi yang terdiri dari:

1. Rumah tangga, merupakan salah satu pelaku utama dalam sistem perekonomian yang memiliki peran ganda sebagai konsumen barang dan jasa sekaligus pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian. Dalam eonomi mikro pelaku rumah tangga menjadi perhatian penting karena keputusan merka dalam konsumsi dan penawaran faktor produksi memengaruhi permintaan, penawaran serta keseimbangan pasar serta berperan aktif dalam siklus ekonomi melalui kombinasi kegiatan konsumsi dan produksi yang dilakukan secara optimal.
    1) Rumah tangga sebagai konsumen. Peranannya yaitu membeli dan menggunakan barang serta jasa yang diproduksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup. Selain itu rumah tangga juga mempertimbangkan pendapatan yang dimiliki serta harga barang dan jasa yang tersedia agar memperoleh kepuasan.
    2) Rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi. Di mana rumah tengga memiliki peran tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Faktor produksi tersebut ditawarkan melalui pasar faktor produksi

sebagai imbalannya rumah tangga memperoleh upah, sewa, bunga ataupun laba, sehingga pendapatan ini dapat memenuhi kebutan konsumsi sekaligus mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi.

2. Perusahaan, berperan sebagai pembeli dan pengguna faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal dan kewirausahaan yang dimiliki rumah tangga. Melalui pasar faktor produksi perusahaan membeli atau menyewa faktor-faktor tersebut untuk menjalankan proses produksi barang dan jasa. Sehingga menciptakan hungungan timbal balik antara rumah tangga dan perusahaan yang menentukan harga faktor produksi, jumlah penggunaannya serta membentuk aliran uang dan barang secara berkelanjutan.
3. Pemerintah.
    1) Pemerintah sebagai regulator. Berperan sebagai regulator dengan mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan dengan stabil, adil, dan efisien. Peran ini dilakukan melalui pembuatan kebijakan, peraturan, penetapan upah minimum, dan pengawasan persaingan usaha serta kebijaka fiskal dan moneter. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menjaga distribusi pendapatan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
    2) Pemerintah sebagai produsen dan konsumen. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik seperti pertahanan, jalan raya, dan layanan umum

yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh pihak swasta. Pemerintah membeli berbagai barang dan jasa untuk menjalankan tugas negara, seperti pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pemerintah sehingga turut mendorong kegiatan ekonomi.

3) Peran sektor luar negeri. Berperan dalam perdagangan internasional dan aliran modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui ekspor, impor dan investasi asing, negara dapat meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, serta memperoleh barang dan jasa yang lebih beragam. Namun, hubungan dengan luar negeri juga menimbulkan tantangan seperti ketergantungan terhadap modal asing dan pengaruh kebijakan ekonomi global sehingga perlu dikelola secara seimbang.

8.1.4 Pasar Faktor Produksi Monopsoni

Monopsoni adalah kondisi pasar ketika hanya terdapat satu pembeli utama dalam pasar faktor produksi. Dalam konteks pasar faktor produksi, monopsoni terjadi ketika hanya ada satu pihak yang membeli faktor produksi, seperti tenaga kerja. Sebagai pembeli tunggal, perusahaan monopsonis menghadapi kurva penawaran faktor produksi yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. (Dr. Mursyid., 2020)

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga faktor produksi yang dibelinya. Jika perusahaan mengurangi jumlah pembelian, harga dapat ditekan menjadi lebih rendah, sedangkan apabila pembelian ditingkatkan maka harga faktor produksi akan naik. Situasi ini mirip dengan monopoli pada pasar *output*, di mana perusahaan dapat memengaruhi harga dengan mengatur jumlah barang yang dijual.

Pasar monopsoni muncul karena suatu perusahaan memiliki kekuatan yang besar dalam pasar faktor produksi. Dalam pasar yang bersifat persaingan sempurna, eksploitasi monopsonistik sulit terjadi karena perusahaan lain akan ikut menawarkan harga yang lebih tinggi terhadap faktor produksi yang memberikan keuntungan besar. Persaingan tersebut akan mendorong harga faktor produksi hingga mendekati nilai produk marjinalnya (MRP). Oleh sebab itu, monopsoni hanya dapat terjadi ketika tidak ada atau sangat sedikit pesaing dalam pasar faktor produksi sehingga perusahaan memiliki kendali yang lebih besar terhadap penentuan upah atau harga faktor produksi.

Salah satu penyebab terjadinya monopsoni adalah faktor geografis. Perusahaan yang berada di daerah kecil atau terpencil sering kali menjadi satu-satunya penyedia lapangan kerja utama bagi masyarakat setempat. Dalam kondisi ini, tenaga kerja sulit berpindah ke daerah lain karena membutuhkan biaya yang tinggi, sementara pilihan pekerjaan alternatif di daerah tersebut terbatas dan kurang menarik.

Situasi seperti ini dikenal dengan istilah company town, yaitu wilayah yang aktivitas ekonominya didominasi oleh satu atau dua perusahaan besar. Akibatnya, perusahaan dapat memiliki pengaruh kuat dalam menentukan tingkat upah tenaga kerja.

Penyebab lainnya adalah adanya spesialisasi dalam pekerjaan atau faktor produksi tertentu. Beberapa perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian yang sangat khusus sehingga pekerja yang memiliki kemampuan tersebut tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan lain. Misalnya, seorang insinyur perkapalan yang memiliki pengalaman khusus dalam merancang kapal selam nuklir kemungkinan hanya dapat bekerja di satu atau dua perusahaan tertentu. Karena keterampilannya sangat spesifik, pekerjaan alternatif menjadi kurang sesuai atau kurang menarik. Keadaan ini membuat perusahaan memiliki posisi monopsonistik dalam pasar tenaga kerja tersebut.

Selain itu, monopsoni juga dapat terjadi melalui diskriminasi sewa atau diskriminasi upah. Dalam kondisi ini, perusahaan membagi pasar tenaga kerja menjadi beberapa kelompok yang berbeda, misalnya berdasarkan gender, kemudian memberikan tingkat upah yang tidak sama meskipun produktivitasnya setara. Perusahaan akan menentukan jumlah tenaga kerja yang disewa pada titik ketika biaya tenaga kerja marjinal sama dengan pendapatan produk marjinal tenaga kerja (MRPL). Akibatnya, kelompok tenaga kerja dengan penawaran yang lebih tidak elastis dapat menerima upah yang lebih rendah. Praktik seperti ini

memungkinkan perusahaan monopsonis memperoleh keuntungan yang lebih besar karena mampu menekan biaya tenaga kerja.

Analisis permintaan faktor produksi memberikan manfaat penting bagi perusahaan dalam menentukan penggunaan faktor produksi secara efisien. Perusahaan harus mampu mengombinasikan faktor produksi yang terbatas agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan penggunaan faktor produksi yang efisien, perusahaan dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah sehingga memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Kondisi ini sangat penting agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

Selain bagi perusahaan, analisis permintaan faktor produksi juga bermanfaat bagi rumah tangga karena berkaitan dengan pendapatan atau imbalan yang diterima dari faktor produksi yang dimiliki. Jenis pendapatan tersebut dapat berupa sewa untuk tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, dan keuntungan untuk keahlian manajerial. Besarnya pendapatan yang diterima dipengaruhi oleh harga dan jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan. Sebagai contoh, semakin tinggi tingkat upah dan semakin banyak jam kerja yang digunakan, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima tenaga kerja.

8.2 Distribusi Pendapatan

8.2.1 Pengertian Distribusi Pendapatan

(Sukirno, 2017) Menurutnya distribusi pendapatan adalah proses pembagian hasil produksi (berupa uang atau barang) diantara faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian) yang berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian pendapatan kepada individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Pemerataan pendapatan menjadi tujuan penting bagi banyak negara karena dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan. (Maria Anita Titu, 2022).

Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian penghasilan yang diterima masyarakat dari hasil kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan produksi, setiap pemilik faktor produksi akan memperoleh balas jasa sesuai dengan kontribusi yang diberikan selama proses produksi berlangsung. Artinya distribusi pendapatan berkaitan erat dengan perolehan penghasilan oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. (Tiffany Kalalo, 2016).

Dalam ditinjau dari sistem perekonomian, distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Sitem leberalis, yaitu pembagian pendapatan yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar melalui hukum permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan pemerintah.

2. Sistem sosialis, yaitu distribusi pendapatan yang diatur langsung oleh pemerintah demi pemerataan kesejahteraan.
3. Sistem campuran, yaitu pembagian pendapatan yang dilakukan melalui perpaduan antara mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah.

8.2.2 Jenis-jenis dan Tujuan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dalam suatu perekonomian dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Secara umum distribusi pendapatan dibedakan menjadi yaitu :

1. Distribusi pendapatan perorangan. Distribusi pendapatan perorangan merupakan pembagian pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Jenis ini digunakan untuk melihat bagaimana total pendapatan terbesar di anatara anggota masyarakat, sehingga dapat diketahui adanya perbedaan tingkat penghasilan antara individu yang satu dengan yang lainnya.
2. Distribusi pendapatan fungsional. Yang mana pembagian pendapatan nasional berdasarkan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini, memperhatikan bagian pendapatan yang diterima tenaga kerja, pemilik modal, pemilik tanah dan pengusaha secara keseluruhan bukan individu secara terpisah.

3. Distribusi pendapatan regional. Merupakan pemerataan pendapatan yang ditinjau berdasarkan wilayah atau daerah tertentu. Distribusi ini dilihat dari perbandingan kesejahteraan anatara kabupaten, provinsi atau pulau. Dilihat juga dari perbedaan sumber daya alam, kualitas sumber daya hidup dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat oendapatan dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Ada beberpa tujuan yang dimiliki oleh distribusi pendapatan dan memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar taraf hidupnya menjadi lebih baik dan kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara layak.
2. Mewujudkan keadilan sosial. Distribusi pendapatan dilakukan agar setiap warga negara memperoleh hak, kesempatan dan akses yang sama terhadap hasil pembangunan serta fasilitas umum.
3. Mengurangi tingkat kriminalitas. Pemerataan pendapatan dapat membantu menekan tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan pencucian uang karena masyarakat mampu memnuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.
4. Meningkatkan solidaritas sosial. Dapat menumbuhkan rasa kepedualan dan kebersamaan antar anggota

masyakarat melalui kegiatan sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan.

8.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, (Ismail, 2022) yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Ketimpangan ini dapat menyebabkan antar wilayah mengalami perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerahnya.
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat menurunkan pendapatan perkapita apabila tidak diimbangi dengan peningkatan ksesempatan kerja dan produksi.
3. Terjadinya inflasi. Yang mana dapat menyebabkan keaikan pendapatan nominal, tetapi jika tidak disertai peningkatan produksi barang dan jasa secara seimbang, daya beli masyarakat tetap menurun.
4. Investasi yang berfokus pada proyek padat modal. Investasi ini lebih banyak menggunakan teknologi dan mesing dibandingkan tenaga kerja sehingga distribusi pendapatan menjadi kurang merata.
5. Rendahnya mobilitas sosial. Di mana kesempatan masyarakat untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi yang terbatas dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan yang juga semakin besar.

6. Kebijakan pemerintah terkait substitusi impor. Kebijakan pengurangan impor tertentu dapat memengaruhi harga barang di dalam negeri sehingga akan berdampak pada tingkat pendapatan dan daya beli di masyarakat.
7. Penurunan nilai tukar mata uang. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan industri dalam negeri terutama yang bergantung pada bahan baku impor, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat.

8.2.4 Indikator Pengukur Distribusi Pendapatan

1. Kurva Lorenz

   Digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pendapatan dengan membandingkan persentase jumlah penduduk terhadap persentase pendapatan yang diterima. Jika digambarkan dalam sebuah grafik maka penerimaan pendapatan digambarkan ppada sumbu horizontal sedangkan pendapatan yang diterima ditunjukkan pada sumbu vertikal, semakin jauh jarak kurva dari garis pemerataan sempurna, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Indeks Rasio Gini

   Merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang memiliki nilai anatara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 0 menunjukan distribusi pendapatan semakin merata, sedangka nilai yang mendekati 1 menandakan bahwa tingkat ketimpangan yang semakin tinggi dalam masyarakat.

3. Distribusi Ukuran

   Merupakan indikator yang mengukur distribusi pendapatan berdasarkan total pendapatan yang diterima setiap individu tanpa memperhatikan sumber pendapatannya. Pendapatan masyarakat kemudian dikelompokkan berdasarkan jumlah penerimaan masing-masing individu. Sehingga dengan cara ini dapat diketahui besar kecilnya perbedaan pendapatan antar individu, jika selisih sangat besar maka artinya distribusi pendapatan dalam masyarakat dapat dikatakan belum merata.

8.3 Upaya Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Muyasar, 2024) dalam jurnalnya, pemerintah melakukan berbagai kebiajakan redistribusi pendapatan agar hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut melalui sistem pajak, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendapatan adalah penerapan sistem pajak prograsif, di mana pajak dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi yang kemudian digunakan kembali untuk membiayai pembangunan dan program sosial bagi masyarakat. Sehingga

melalui kebijakan ini, pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah juga menerbitkan UU HPP yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan meingkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dana hasil pajak ini dialokasikan ke berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik. Dengan adanya dukungan yang memadai harapannya mampu untuk meningkatkan kualitas hidup serta memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Pemerintah juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di mana UMKM ini dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkaan pendapatan masyarakat. Pemerintah menyediakan Program Dana Penguatan Modal (DPM) untuk mendukung perkembangan UMKM melalui tambahan modal usaha bagi pelaku UMKM dan bantuan modal ini dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian.

Pemerintah juga menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan, di mana program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, program

ini bertujuan mningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, mendukung pendidikan anak dan layanan kesehatan keluarga penerima bantuan.

Namun pemerintah juga menghadapi tantangan dalam pemerataan pendapatan di mana sistem perpajakan yang belum sepenuhnya efesien dan masih adanya praktik korupsi, kondisi tersebut dapat menghambat proses distribusi bantuan dan pembangunan sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oeleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga diperlukannya pengawasan, transparansi, dan reformasi kebijakan agar redistribusi pendapatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kebijakan redistribusi pendapatan yanng dilakukan oleh pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui perpajakan, bantuan sosial, pengembangan UMKM serta program perlindungan sosial, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meingkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang tepat, berkelanjutan dan didukung oleh pengawasan yang baik.

8.4 Hubungan Pasar Faktor Produksi dengan Distribusi Pendapatan

Pasar faktor produksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, pasar faktor produksi menjadi tempat bertemunya pemilik faktor produksi dengan pihak yang membutuhkan faktor produksi untuk menjalankan proses produksi. Faktor produksi tersebut meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dari keterlibatan dalam proses produksi inilah masyarakat memperoleh pendapatan berupa upah, sewa, bunga, maupun laba.

Dalam jurnal Distribusi Faktor Produksi : Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi melalui Distribusi Faktor Produksi dijelaskan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dipisahkan dari kepemilikan faktor produksi. Seseorang yang memiliki faktor produksi dalam jumlah besar akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan individu yang memiliki faktor produksi terbatas. Oleh karena itu, ketimpangan kepemilikan faktor produksi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat (AM. M. Hafidz MS., 2010).

Hubungan antara pasar faktor produksi dan distribusi pendapatan dapat dilihat dari balas jasa yang diterima setiap pemilik faktor produksi, yaitu:

1. Pemilik tanah memperoleh pendapatan berupa sewa.
2. Tenaga kerja memperoleh upah atau gaji.

3. Pemilik modal memperoleh bunga atau keuntungan modal.
4. Pengusaha memperoleh laba usaha.

Semakin besar kualitas dan jumlah faktor produksi yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh dari pasar faktor produksi.

Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa distribusi faktor produksi yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan modal dan sumber daya cenderung dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal besar. Akibatnya, masyarakat yang hanya memiliki sedikit faktor produksi akan memperoleh pendapatan rendah dan sulit meningkatkan kesejahteraannya.

Di sisi lain, distribusi faktor produksi yang merata dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap tanah, modal, pendidikan, dan teknologi, maka mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses produksi. Kondisi ini memungkinkan peningkatan produktivitas serta memperluas kesempatan kerja sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Jurnal tersebut juga membandingkan sistem kapitalis dan sosialis dalam distribusi faktor produksi. Sistem kapitalis dianggap mampu meningkatkan produksi, namun sering menyebabkan kesenjangan pendapatan yang tinggi.

Sementara itu, sistem sosialis mencoba menciptakan pemerataan melalui pembagian faktor produksi secara sama rata, tetapi dinilai dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sistem distribusi yang tetap memperhatikan keadilan sekaligus menjaga produktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, pasar faktor produksi sangat memengaruhi distribusi pendapatan karena pendapatan masyarakat berasal dari kepemilikan dan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Semakin merata distribusi faktor produksi, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan juga akan semakin besar. Dengan demikian, pemerataan akses terhadap faktor produksi menjadi langkah penting dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

REFERENSI

AM. M. Hafidz MS., M. (2010). Distribusi Faktor Produksi : Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi melalui Distribusi Faktor Produksi. *Jurnal Hukum Islam*, 89-107.

Dr. Mursyid., M. d. (2020). *Dasar - Dasar Ekonomi Mikro.* Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.

Feliks Arfid Guampe, R. M. (2020). *Ekonomi Makro (Suatu Pendekatan Teoretis).* Kota Bandung - Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.

Ismail, I. (2022, Juni 15). Pengertian Distribusi Pendapatan. *Accurate.id*.

Maria Anita Titu, S. M. (2022). *Pengantar Ilmu Ekonomi.* Kabupaten Bandung: CV. Intelektual Manifes Media.

Muyasar. (2024). Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial - Ekonomi : Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 1-10.

Prof. Dr. Elsyan Rienette Marlissa., S. M. (2026). *Teori Ekonomi Mikro.* Kota Padang: CV. Pustaka Inspirasi Minang.

Sukirno, S. (2017). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: Kencana.

Tiffany Kalalo, D. S. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecematan Airmadidi Kabupaten Mihanasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 818-830.

BAB 9
KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO

Meily Andriani, S.P., M.Si.

9.1 Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Fokus ekonomi mikro terletak pada keputusan ekonomi rasional di tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang terbatas, yang melibatkan analisis harga, pasar, serta permintaan dan penawaran. Sementara itu, ekonomi makro mengamati ekonomi secara luas dengan meneliti indikator agregat seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan (Sukirno, 2019; Dornbusch, Fischer & Startz, 2018).

Ekonomi makro sebagai suatu disiplin ilmu yang terbentuk dari sebuah krisis besar dunia. Ekonom asal Inggris, John Maynard Keynes (1883–1946), mencetuskan Teori Keynesian yang kemudian diadopsi sebagai model ekonomi utama di berbagai negara maju. Teori ini menjadi fondasi kebijakan penting selama era Great Depression (1929–1930), Perang Dunia II (1939–1945), hingga masa pertumbuhan ekonomi pascaperang (1945–1973). Teori tersebut kemudian berkembang menjadi ilmu ekonomi makro, setelah ia menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam analisis

kegiatan perekonomian suatu negara untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna (Blanchard, 2021).

Secara spesifik terdapat tiga permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam ekonomi makro yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penyerapan tenaga kerja. Ketika perekonomian mengalami ketidakstabilan, inflasi dan pengangguran muncul bersamaan yang dapat memperburuk kondisi sosial, mendorong kemiskinan, serta memperlebar kesenjangan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata. Pemahaman terhadap ekonomi makro dengan demikian menjadi sangat penting bagi berbagai pihak : (1) bagi pemerintah sebagai landasan merumuskan kebijakan fiskal dan moneter; (2) bagi pelaku bisnis sebagai acuan dalam membaca iklim investasi dan proyeksi permintaan; serta (3) bagi masyarakat luas karena kondisi makroekonomi secara langsung memengaruhi nilai upah, harga kebutuhan pokok, dan ketersediaan lapangan kerja (Boediono, 2014).

9.2 PDB, Inflasi, Pengangguran

9.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk dan perusahaan dalam satu negara pada kurun waktu satu tahun. PDB berfungsi sebagai cermin kondisi ekonomi suatu bangsa. Ketika PDB tumbuh, perekonomian sedang berkembang; ketika PDB menyusut, perekonomian mengalami tekanan (Sukirno, 2019).

PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan. Pertama adalah pendekatan pengeluaran, yang merupakan pendekatan paling umum digunakan dengan rumus :

$$PDB = C + I + G + (X – M),$$

di mana C merupakan konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor.

Pendekatan kedua adalah pendekatan pendapatan, yang menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Pendekatan produksi merupakan pendekatan ketiga yang menghitung nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi (Dornbusch, Fischer & Startz, 2018).

PDB terbagi menjadi nominal dan riil. PDB nominal dinilai berdasarkan harga berlaku, sedangkan PDB riil menggunakan harga konstan untuk mengeliminasi dampak inflasi, sehingga lebih akurat dalam mengukur pertumbuhan ekonomi antar waktu (Blanchard, 2021).

9.2.2 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang dipicu oleh dinamika permintaan dan penawaran. Sebagai cerminan dari ketidakseimbangan dalam perekonomian, fenomena ini tidak hanya menyebabkan harga barang naik, tetapi juga langsung menurunkan daya beli masyarakat (Blanchard, 2021).

Inflasi umumnya dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu *Demand-pull inflation* (ketika permintaan agregat tumbuh terlalu cepat melampaui kapasitas penawaran) sedangkan *Cost-push inflation* (kenaikan biaya produksi seperti upah atau harga bahan baku yang mendorong produsen menaikkan harga jual). Ketika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan penawarannya maka akan mendorong terjadinya kenaikan harga dari sisi permintaan, sedangkan apabila terjadi peningkatan pada faktor biaya produksi, maka dapat mendorong kenaikan harga dari sisi penawaran (Dornbusch, Fischer & Startz, 2018).

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan instrumen utama untuk mengukur inflasi dengan cara menghitung rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam periode tertentu. Perubahan IHK ini merefleksikan laju inflasi atau deflasi. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung IHK melalui Survei Biaya Hidup (SBH) dengan memantau harga bulanan di pasar tradisional dan modern di berbagai kota. Selain IHK, pengukuran inflasi juga dapat menggunakan Deflator PDB, yang dihitung dari rasio PDB nominal terhadap PDB riil (Sukirno, 2019).

9.2.3 Pengangguran

Variabel makroekonomi ketiga yang menjadi perhatian utama adalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi merupakan masalah ekonomi sekaligus masalah sosial. Literatur ekonomi makro mengklasifikasikan pengangguran ke dalam beberapa jenis berdasarkan faktor penyebabnya. Pertama, pengangguran siklikal, yang terjadi akibat fluktuasi siklus bisnis; jumlah pengangguran meningkat saat resesi karena penurunan permintaan pasar, dan menyusut kembali ketika perekonomian membaik. Kedua, pengangguran friksional, yaitu kondisi sementara saat pekerja berada dalam proses transisi perpindahan pekerjaan. Ketiga, pengangguran struktural, yang dipicu oleh perubahan mendasar pada struktur ekonomi sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang baru (Sukirno, 2019).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator resmi pengukur pengangguran di Indonesia, yang membandingkan jumlah penganggur dengan total angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas. Tantangan ketenagakerjaan di dalam negeri tergolong kompleks karena dipicu oleh kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan pencari kerja dan terbatasnya lowongan yang tersedia. Dengan angka TPT Indonesia yang tercatat sebesar 4,91 persen pada tahun 2024 (BPS), data ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah dalam merancang strategi perluasan lapangan kerja.

Ketiga variabel utama ini saling berinteraksi secara dinamis. Pertumbuhan PDB yang kuat umumnya mampu menekan tingkat pengangguran karena aktivitas ekonomi yang meningkat membuka lebih banyak lapangan kerja; namun pertumbuhan yang terlalu cepat dapat memicu inflasi melalui tekanan pada sisi permintaan. Pemahaman terhadap interaksi antar variabel inilah yang menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan makroekonomi yang efektif dan berimbang (Blanchard, 2021; Dornbusch, Fischer & Startz, 2018).

9.3 Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator makro utama dalam mengevaluasi kinerja ekonomi sebuah negara. Secara teori, perkembangan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita (Sukirno, 2019). Pendapatan nasional berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan anggaran negara, distribusi kesejahteraan, dan perencanaan pembangunan. Data pendapatan nasional membantu pemerintah menentukan prioritas belanja publik dan kebijakan redistribusi pendapatan. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dan cara pengukuran pendapatan nasional menjadi prasyarat bagi yang ingin memahami bagaimana perekonomian suatu bangsa bekerja dan ke mana arah kebijakannya (Sukirno, 2019; Blanchard, 2021).

9.3.1 Konsep Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional umumnya dipresentasikan melalui PDB dan PNB, di mana tren kenaikan pada nilai per kapitanya menandakan adanya perkembangan ekonomi. PDB menghitung seluruh produksi barang dan jasa di dalam wilayah domestik suatu negara (termasuk oleh warga asing), sedangkan PNB mengukur *output* dari seluruh warga negara terkait di mana pun mereka berada dengan mengecualikan peran warga asing di dalam negeri (Dornbusch, Fischer & Startz, 2018).

Meskipun PNB dan PDB merupakan ukuran yang paling umum digunakan, keduanya memiliki keterbatasan sebagai ukuran kesejahteraan, yakni PNB hanya mencakup barang yang masuk ke pasar dan tidak memasukkan barang yang diproduksi atau dikonsumsi sendiri, tidak memperhitungkan kualitas hidup seperti waktu rekreasi yang merupakan bagian penting dari kesejahteraan, serta tidak memperhitungkan masalah polusi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Blanchard, 2021).

9.3.2 Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Distribusi

Berdasarkan PDB per kapita, Bank Dunia mengklasifikasikan negara menjadi empat kelompok: negara berpendapatan rendah (PDB per kapita di bawah USD 956), negara berpendapatan menengah bawah (USD 956–USD 3.895), negara berpendapatan menengah tinggi (USD 3.986–USD 12.055), dan negara berpendapatan tinggi (di atas USD

12.056). Namun demikian, pendapatan per kapita yang tinggi belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan yang sesungguhnya. Distribusi pendapatan harus diperhatikan untuk mengurangi kesenjangan, dan kebijakan yang mendorong konsumsi, tabungan, dan investasi dapat mendukung pertumbuhan pendapatan yang lebih merata, di mana aspek kesejahteraan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan ekonomi. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan tersebut digunakan instrumen Koefisien Gini, dengan semakin kecil nilai Koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu negara (Blanchard, 2021).

9.4 Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai pilar utama ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan *output* barang dan jasa secara kontinu dalam jangka panjang. Teori Solow-Swan menjelaskan bahwa dinamika ini dipengaruhi oleh tiga faktor struktural, yakni pertumbuhan angkatan kerja, akumulasi modal, dan inovasi teknologi. Pada tingkat yang lebih luas, pertumbuhan yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka produksi, melainkan dari kapasitas perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja, mereduksi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan publik secara keseluruhan (Sukirno, 2019).

Model Neoklasik Solow-Swan merupakan pilar teori pertumbuhan yang sangat berpengaruh dalam ekonomi

makro. Teori yang digagas oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956) ini menitikberatkan analisisnya pada interaksi antara akumulasi modal, ekspansi populasi, serta inovasi teknologi dalam memengaruhi skala *output* perekonomian. Model ini menggunakan fungsi produksi yang mensubstitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L), sehingga kondisi pertumbuhan menjadi stabil karena adanya fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal-tenaga kerja (Meiriza dkk., 2023). Secara matematis model ini dinyatakan dalam fungsi produksi:

$$Y = F (K, AL)$$

di mana Y adalah jumlah *output* yang diproduksi, K adalah akumulasi modal, A adalah kemajuan teknologi, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik menekankan pentingnya faktor produksi dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai produktivitas yang baik sehingga terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Sulistianingsih, 2016; Blanchard, 2021).

Meskipun pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung meningkat, kenyataannya perekonomian mengalami fluktuasi jangka pendek yang dikenal sebagai siklus bisnis. Siklus ini merupakan pola naik-turunnya aktivitas ekonomi secara berulang yang terdiri atas fase ekspansi dan resesi, di mana pergerakan PDB menjadi

indikator utama penentu titik balik siklus tersebut (Blanchard, 2021).

Pengalaman Indonesia memberikan ilustrasi nyata mengenai hal ini. Pada kuartal I tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi dan diikuti resesi pada kuartal berikutnya akibat pandemi Covid-19, setelah itu terjadi pemulihan ekonomi dan kembali mencapai *output* optimal jangka panjang setelah 1,5 tahun. Sementara itu, sepanjang tahun 2024 perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,1%, didorong oleh sektor industri pengolahan (4,5%), perdagangan (4,8%), dan sektor informasi dan komunikasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,3% seiring digitalisasi yang semakin luas. Pemahaman terhadap dinamika pertumbuhan dan siklus bisnis inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah dan bank sentral dalam merumuskan kebijakan (Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, 2025; Darmawan & Mifrahi, 2022).

9.5 Kebijakan Makroekonomi : Fiskal, Moneter, AD-AS

Setelah memahami berbagai variabel makroekonomi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dan otoritas moneter merespons kondisi perekonomian yang terus berubah? Jawabannya terletak pada dua instrumen kebijakan utama yang menjadi pilar pengelolaan ekonomi makro modern, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Blanchard, 2021; Dornbusch, Fischer & Startz, 2018).

9.5.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara guna mempengaruhi kondisi perekonomian secara agregat. Melalui pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, kebijakan fiskal memiliki peran yang signifikan dalam mengelola perekonomian. Pengeluaran pemerintah sangat memengaruhi konsumsi masyarakat, dan dampak kebijakan fiskal terutama di bidang infrastruktur dan sosial terbukti dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga gabungan antara keduanya sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sulistianingsih, 2016).

Arah kebijakan fiskal terbagi menjadi dua strategi stabilisasi, yakni ekspansif (meningkatkan belanja negara dan menurunkan pajak) untuk menstimulasi perekonomian saat resesi, serta kontraktif (memotong anggaran belanja dan menaikkan pajak) demi menekan laju inflasi. Konteks pengelolaan fiskal di Indonesia direfleksikan melalui instrumen APBN, di mana sektor perpajakan menjadi tulang punggung dengan kontribusi di atas 70%. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak berfungsi penting dalam aspek regulasi dan pemerataan pendapatan. Tantangan domestik seperti rendahnya kesadaran pajak serta kompleksitas birokrasi perpajakan menjadi urgensi bagi pemerintah untuk terus mendorong reformasi struktural melalui modernisasi dan digitalisasi sistem administrasi (Amri, 2020).

9.5.2 Kebijakan Moneter

Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter merupakan wewenang bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, yang mencakup stabilitas harga dan nilai tukar. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen moneter seperti suku bunga acuan (BI Rate), operasi pasar terbuka (OPT), intervensi nilai tukar, serta kebijakan cadangan wajib minimum (GWM). Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga dalam perekonomian (Afiftah dkk, 2024).

Kebijakan suku bunga merupakan instrumen moneter utama yang berdampak pada perekonomian. Saat BI Rate dinaikkan, suku bunga deposito dan kredit akan ikut terapresiasi. Dampaknya, jumlah uang beredar menyusut karena masyarakat lebih memilih menabung, sementara investasi sektor riil melambat akibat tingginya biaya modal. Mekanisme inilah yang berfungsi mengerem laju ekonomi demi menekan inflasi. Sebagai contoh empiris, kenaikan suku bunga BI sebesar 1% mampu mereduksi laju inflasi sebesar 0,83% (dengan asumsi variabel lain konstan). Hal tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pengetatan moneter dalam menjaga stabilitas harga di bawah strategi *Inflation Targeting Framework* (ITF) Bank Indonesia. (Rahmatullah, 2025).

Kenaikan suku bunga dapat memperlambat laju inflasi dalam jangka pendek meskipun dampaknya memerlukan waktu beberapa kuartal untuk dirasakan sepenuhnya. Oleh

karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal melalui stabilisasi harga pangan, penguatan sektor produksi, serta komunikasi kebijakan yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi agar koordinasi kebijakan yang optimal dapat meminimalkan dampak negatif jangka pendek (Sigalingging dkk., 2024).

9.6 Contoh Kasus: Dari Ekonomi Umum ke Sektor Pertanian Indonesia

Untuk memahami bagaimana seluruh konsep makroekonomi yang telah dibahas mulai dari PDB, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bagian ini menyajikan satu kasus empiris, yakni bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia tahun 2024 berdampak langsung pada sektor pertanian dan kehidupan petani. Kondisi makroekonomi agregat ditransmisikan secara nyata ke tingkat petani melalui berbagai jalur.

9.6.1 Jalur Pertama: Inflasi dan Harga Pangan

Fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan. Kondisi iklim yang tidak tetap dan instabilitas politik global mengakibatkan peningkatan harga komoditas pangan internasional, sehingga pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal berupa pemberian

subsidi, insentif fiskal termasuk keringanan perpajakan dan bea, serta optimalisasi anggaran untuk menekan fluktuasi harga komoditas pertanian (BPS, 2024).

9.6.2 Jalur Kedua: Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian.

Strategi peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas yang akhirnya mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional, sehingga diperlukan upaya yang tepat agar langkah-langkah yang diambil sesuai dengan sasaran. Tenaga kerja pertanian merupakan tenaga kerja terbesar dengan jumlahnya mencapai 37,81 juta orang pada Agustus 2024. Angka ini menempatkan sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa besarnya dampak kondisi makroekonomi terhadap jutaan keluarga petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

REFERENSI

Afiftah, A.T. dkk. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5). https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1493

Amri, K. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, UIN Syahada*, 8(1). DOI: https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2585

Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson Education.

Boediono. (2014). *Ekonomi Makro* (Edisi Keempat). BPFE, Yogyakarta.

BPS. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT*). Jakarta.

Darmawan, A.S. & Mifrahi, M.N. (2022). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 111–118. https://journal.uii.ac.id/JKEK/article/view/25198

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. (2025). *Ekonomi Indonesia* 2024: Pertumbuhan Stabil Berkat Kebijakan Tepat. Kemenkeu RI.

Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). *Macroeconomics* (13th ed.). McGraw-Hill Education.

Meiriza, M.S. dkk. (2023). Analisis Ekonomi Neo-Klasik terhadap Pertumbuhan Ekonomi. JKA: Jurnal Kebijakan dan Administrasi, 3(1). Rahmatullah. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter terhadap Inflasi. *Jurnal Ekonomika,*

16(3), 496–512. DOI: https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v3i1.4618

Sigalingging, A.M. dkk. (2024). Analisis Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat: Perspektif Teori dan Empiris. JEBS: *Jurnal Ekonomika dan Bisnis,* 4(4) : 529-535. DOI:10.47233/jebs.v4i4.1890

Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga, Cetakan Terbaru). Rajawali Pers, Depok.

Sulistianingsih, E. (2016). Penerapan Teori Solow-Swan pada Pertumbuhan Ekonomi. *BIMASTER, Universitas Tanjungpura*.https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jbmstr/article/download/14750/13049

BAB 10
INFLASI, PENGANGGURAN, DAN STABILITAS EKONOMI

Dr. Wini Fetia Wardhiani, S.T., M.EP.

10.1 Inflasi

Inflasi, pengangguran, dan stabilitas ekonomi merupakan tiga indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pemerintah dan otoritas moneter berupaya menjaga keseimbangan antara tingkat inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang rendah, serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan pada salah satu indikator dapat memengaruhi indikator lainnya dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun sektor usaha.

Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan yang sama menjadi lebih sedikit. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan

ketidakpastian ekonomi, menurunkan investasi, serta memperburuk distribusi pendapatan. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah bahkan deflasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat cenderung menunda konsumsi dan investasi.

Di sisi lain, pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan meskipun sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Pengangguran dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan ekonomi.

Stabilitas ekonomi merupakan kondisi ketika kegiatan ekonomi berjalan secara seimbang, ditandai oleh tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, nilai tukar yang stabil, serta tingkat pengangguran yang relatif rendah. Stabilitas ekonomi sangat penting karena menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, konsumsi, dan aktivitas produksi. Negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang baik cenderung mampu mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi semakin

kompleks. Krisis ekonomi global, pandemi, konflik geopolitik, perubahan harga energi, serta perkembangan teknologi digital memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai inflasi, pengangguran, dan stabilitas ekonomi menjadi sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun pembuat kebijakan.

10.1.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Inflasi tidak hanya ditandai oleh naiknya harga satu atau dua barang saja, tetapi mencakup kenaikan harga secara luas yang memengaruhi sebagian besar komoditas dan jasa dalam masyarakat. Menurut Sukirno (2016), inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sementara itu, Mankiw (2018) mendefinisikan inflasi sebagai peningkatan keseluruhan tingkat harga dalam perekonomian.

Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam analisis makroekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, nilai uang akan menurun sehingga masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk membeli barang dan jasa yang sama. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Secara umum, inflasi diukur menggunakan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan deflator Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan IHK sebagai indikator utama untuk mengukur inflasi. IHK mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu.

Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan terjadi apabila tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang berada pada kisaran 10–30% per tahun. Inflasi berat terjadi ketika tingkat inflasi mencapai 30–100% per tahun, sedangkan hiperinflasi terjadi apabila inflasi melebihi 100% per tahun. Hiperinflasi dapat menyebabkan kehancuran sistem ekonomi karena nilai uang menurun sangat cepat.

Selain berdasarkan tingkat keparahan, inflasi juga dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya. Inflasi tarikan permintaan *(demand-pull inflation)* terjadi karena peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi. Inflasi dorongan biaya *(cost-push inflation)* disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti upah tenaga kerja dan harga bahan baku. Inflasi campuran merupakan kombinasi antara inflasi tarikan permintaan dan dorongan biaya.

10.1.2 Penyebab Inflasi

Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam suatu

periode tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun karena jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Penyebab inflasi sangat beragam dan biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi produksi, hingga situasi global. Berikut penjelasan detail mengenai penyebab inflasi:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

   Inflasi ini terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibanding kemampuan produksi. Proses terjadinya ketika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli naik sehingga konsumsi barang dan jasa bertambah. Jika produksi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, maka harga akan naik. Faktor penyebabnya antara lain karena pendapatan masyarakat meningkat, kredit bank mudah diperoleh, pengeluaran pemerintah meningkat, jumlah uang beredar terlalu banyak dan kepercayaan konsumen meningkat.

   Contohnya pada saat menjelang hari raya, permintaan bahan pokok seperti beras, daging, dan minyak goreng meningkat tajam. Karena stok terbatas, harga menjadi naik, hal ini akan berdampak pada harga barang naik secara umum, daya beli masyarakat menurun dan mendorong kenaikan biaya hidup.

2. Inflasi Dorongan Biaya (*Cost Push Inflation*)

   Inflasi ini terjadi akibat kenaikan biaya produksi sehingga produsen menaikkan harga jual barang. Faktor penyebabnya adalah harga bahan baku naik, upah tenaga

kerja meningkat, harga BBM naik, tarif listrik meningkat dan biaya distribusi meningkat. Hal ini terjadi ketika biaya produksi naik, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghasilkan barang. Agar tidak merugi, produsen menaikkan harga produk kepada konsumen.

Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya transportasi meningkat. Akibatnya harga kebutuhan pokok ikut naik karena ongkos distribusi lebih mahal. Hal ini berdampak pada harga barang naik, produksi menurun dan pengangguran dapat meningkat

3. Bertambahnya Jumlah Uang Beredar

Jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, nilai uang menjadi turun sehingga harga barang meningkat. Ketika bank sentral mencetak uang secara berlebihan atau suku bunga terlalu rendah, masyarakat memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Permintaan meningkat, sedangkan jumlah barang tetap sehingga harga naik. Contohnya pemerintah memberikan stimulus besar-besaran tanpa diimbangi peningkatan produksi barang, hal ini berdampak pada melemahnya nilai mata uang, meningkatnya har kebutuhan poko dan tabungan masyarakat berkurang nilainya.

4. Kenaikan Harga Barang Impor

Inflasi juga dapat terjadi karena kenaikan harga barang dari luar negeri, penyebab utamanya adalah nilai tukar rupiah melemah, harga komoditas dunia naik dan gangguan perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena

bahan baku impor menjadi lebih mahal, biaya produksi dalam negeri ikut meningkat. Akibatnya harga barang jadi juga naik.

Contohnya kenaikan harga mie instan dan roti yang disebabkan oleh meningkatnya harga gandum dunia, hal ini berdampak pada kenaikan harga produk impor, industri terganggu dan inflasi menyebar ke sektor lain

5. Melemahnya Nilai Tukar Mata Uang

Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, barang impor menjadi lebih mahal, penyebab pelemahan kurs karena defisit perdagangan, utang luar negeri tinggi, krisis ekonomi global dan ketidakstabilan politik.

Contoh, jika sebelumnya 1 dolar = Rp14.000 lalu naik menjadi Rp16.000, maka biaya impor barang meningkat, hal ini berdampak pada kenaikan harga barang impor, peningkatan harga bahan baku, inflasi domestik bertambah

6. Gangguan Produksi dan Distribusi

Produksi yang terganggu menyebabkan jumlah barang di pasar berkurang sehingga harga naik, penyebabnya karena bencana alam, gagal panen, pandemi, konflik sosial dan kerusakan transportasi.

Sebagai contohnya banjir menyebabkan hasil panen berkurang sehingga harga cabai dan sayuran melonjak, hal ini berdampak pada kelangkaan barang, harga kebutuhan pokok meningkat dan distribusi tidak lancar.

7. Ekspektasi atau Psikologi Masyarakat

Inflasi dapat terjadi karena masyarakat memperkirakan harga akan naik di masa depan. Ketika masyarakat takut harga naik, mereka membeli barang dalam jumlah besar. Akibatnya permintaan meningkat dan harga benar-benar naik. Misalnya menjelang kenaikan BBM, masyarakat membeli barang dan bahan bakar secara berlebihan. Hal ini menyebabkan terjadinya panic buying, kelangkaan sementara dan harga semakin meningkat.

8. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan tertentu dapat memicu inflasi apabila menyebabkan biaya hidup meningkat. Kebijakan yang dapat menyebabkan inflasi seperti kenaikan pajak, pengurangan subsidi, kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga BBM. Pengurangan subsidi BBM membuat harga transportasi naik dan memicu kenaikan harga barang lainnya, hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat, harga barang naik serentak dan daya beli masyarakat turun.

10.1.3 Jenis Penyebab Inflasi Berdasarkan Asalnya

Inflasi Dalam Negeri

Disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negara seperti:

- Gagal panen
- Jumlah uang beredar berlebihan
- Kebijakan pemerintah
- Permintaan tinggi

Inflasi Luar Negeri *(Imported Inflation)*

Disebabkan oleh faktor dari luar negeri seperti:

- Kenaikan harga minyak dunia
- Krisis global
- Pelemahan nilai tukar
- Kenaikan harga impor

Inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang, permintaan barang, dan kemampuan produksi. Penyebab utama inflasi meliputi meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, bertambahnya uang beredar, kenaikan harga impor, pelemahan nilai tukar, gangguan produksi, ekspektasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kestabilan harga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat.

10.1.4 Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dampak inflasi dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada tingkat dan kestabilannya.Dampak inflasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga sangat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Salah satu dampak utama inflasi di Indonesia adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan masyarakat tetap,

maka kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan berkurang. Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan transportasi. Misalnya, ketika harga beras mengalami kenaikan tajam, masyarakat harus mengurangi konsumsi barang lain agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi. Penurunan daya beli ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dan dapat memperbesar angka kemiskinan.

Inflasi juga berdampak terhadap ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap, seperti buruh, pegawai honorer, dan pensiunan, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap inflasi. Hal ini karena penghasilan mereka tidak meningkat secepat kenaikan harga barang. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki aset seperti tanah, emas, atau usaha tertentu justru dapat memperoleh keuntungan dari inflasi. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat semakin melebar. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini sering terlihat di daerah perkotaan maupun pedesaan, terutama ketika harga bahan pangan meningkat secara signifikan.

Di sektor usaha dan industri, inflasi dapat meningkatkan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku, energi, dan biaya distribusi menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghasilkan produk. Sebagai contoh,

ketika harga BBM naik, biaya transportasi barang juga meningkat sehingga harga produk di pasaran ikut naik. Perusahaan kemudian menghadapi dua pilihan yang sulit, yaitu menaikkan harga jual produk atau mengurangi jumlah produksi. Jika harga jual dinaikkan, konsumen mungkin akan mengurangi pembelian karena harga menjadi lebih mahal. Namun jika produksi dikurangi, perusahaan dapat mengalami penurunan keuntungan dan bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja.

Dampak inflasi terhadap tenaga kerja juga cukup besar. Ketika biaya produksi meningkat dan penjualan menurun, beberapa perusahaan memilih melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja. Hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran. Di Indonesia, sektor yang paling rentan terhadap dampak inflasi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan mempertahankan usaha karena modal usaha meningkat sedangkan daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena UMKM merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia.

Selain itu, inflasi juga memengaruhi tingkat suku bunga di Indonesia. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia biasanya menerapkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan. Tujuannya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga konsumsi dapat ditekan. Namun, kenaikan suku bunga juga memiliki dampak

negatif, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki pinjaman di bank. Cicilan kredit menjadi lebih mahal sehingga masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan investasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sektor pertanian, inflasi memiliki dampak yang cukup kompleks. Di satu sisi, kenaikan harga hasil pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani. Namun di sisi lain, biaya produksi pertanian seperti pupuk, benih, pestisida, dan bahan bakar juga mengalami kenaikan. Akibatnya, keuntungan petani tidak selalu meningkat secara signifikan. Di Indonesia, inflasi pangan sering menjadi perhatian utama karena sebagian besar masyarakat masih sangat bergantung pada komoditas pangan lokal. Ketika produksi pertanian terganggu akibat cuaca ekstrem atau distribusi yang tidak lancar, harga pangan dapat melonjak dan menyebabkan inflasi semakin tinggi.

Inflasi juga berdampak terhadap sektor investasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal karena kondisi ekonomi dianggap tidak stabil. Investor cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi karena nilai keuntungan yang diperoleh bisa tergerus oleh kenaikan harga. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat inflasi dapat menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing. Pelemahan rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih mahal dan pada akhirnya kembali meningkatkan inflasi. Kondisi ini

menciptakan lingkaran ekonomi yang cukup sulit dikendalikan apabila tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat.

Dampak inflasi terhadap masyarakat juga terlihat pada perubahan pola konsumsi. Ketika harga barang meningkat, masyarakat cenderung lebih selektif dalam membeli kebutuhan. Konsumen biasanya akan mengurangi pembelian barang sekunder dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. Perubahan pola konsumsi ini dapat memengaruhi sektor perdagangan dan jasa. Misalnya, penjualan produk elektronik, pakaian, atau barang mewah dapat menurun ketika inflasi tinggi karena masyarakat memilih menyimpan uang untuk kebutuhan yang lebih penting. Akibatnya, sektor usaha tertentu mengalami penurunan pendapatan.

Pemerintah Indonesia biasanya melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Salah satu kebijakan yang sering dilakukan adalah operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah juga memberikan subsidi pada sektor tertentu seperti energi dan pupuk agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia melakukan pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilan harga di Indonesia.

Meskipun inflasi sering dianggap berdampak negatif, sebenarnya inflasi dalam tingkat yang rendah dan terkendali dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Inflasi ringan dapat mendorong peningkatan produksi karena perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar. Selain itu, inflasi yang stabil juga dapat meningkatkan semangat investasi dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi masalah utama bukanlah keberadaan inflasi itu sendiri, melainkan inflasi yang terlalu tinggi dan tidak terkendali.

Dalam konteks Indonesia, pengendalian inflasi menjadi tantangan yang cukup besar karena struktur ekonomi yang masih dipengaruhi oleh sektor pangan dan energi. Ketergantungan terhadap impor beberapa komoditas juga membuat Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat, peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan distribusi barang, serta penguatan sektor pertanian dan industri agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik.

Secara keseluruhan, inflasi memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dampak tersebut meliputi menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya produksi, bertambahnya pengangguran, melemahnya investasi, hingga meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan kesejahteraan

masyarakat dapat meningkat. Dengan pengelolaan ekonomi yang baik, inflasi dapat ditekan pada tingkat yang wajar sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.

1. Dampak Positif Inflasi

Inflasi ringan dan stabil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Inflasi yang moderat mendorong produsen meningkatkan produksi karena adanya harapan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, inflasi dapat meningkatkan investasi dan memperluas kesempatan kerja.

Inflasi yang rendah juga dapat mendorong masyarakat untuk membelanjakan uangnya daripada menyimpan dalam bentuk tunai. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Dampak Negatif Inflasi

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utama adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Inflasi juga dapat memperburuk distribusi pendapatan. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai dan pensiunan akan mengalami penurunan

kesejahteraan karena pendapatan mereka tidak meningkat secepat kenaikan harga.

Selain itu, inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian ekonomi sehingga investor enggan melakukan investasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan pengangguran meningkat. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat beralih menggunakan mata uang asing atau aset lain sebagai alat penyimpan nilai.

10.1.5 Kebijakan Pengendalian Inflasi

Pemerintah dan bank sentral memiliki berbagai instrumen untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi umumnya dilakukan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektor riil.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah.

Salah satu instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Ketika inflasi tinggi, bank sentral

dapat menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang beredar.

Selain itu, bank sentral dapat menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi konsumsi dan investasi. Suku bunga yang lebih tinggi mendorong masyarakat menabung sehingga permintaan agregat menurun.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak. Pengurangan pengeluaran pemerintah akan menurunkan permintaan agregat sehingga tekanan inflasi berkurang.

3. Kebijakan Nonmoneter

Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan nonmoneter seperti meningkatkan produksi barang kebutuhan pokok, memperbaiki distribusi barang, serta mengendalikan harga barang strategis. Kebijakan ini penting terutama ketika inflasi disebabkan oleh gangguan pasokan.

10.2 Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka mencakup penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi dan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Secara umum, pengangguran dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja. Pengangguran bukan hanya sekadar persoalan individu yang tidak bekerja, melainkan juga mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi sering kali menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun.

Dalam konteks ekonomi, pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih besar dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh penghasilan tetap sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan. Pengangguran juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Di

negara berkembang seperti Indonesia, masalah pengangguran menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, serta kualitas sumber daya manusia yang masih beragam.

Di Indonesia, pengangguran menjadi isu yang terus dibahas karena jumlah penduduk usia kerja setiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan persaingan kerja semakin ketat. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahlian mereka. Selain itu, perkembangan teknologi dan otomatisasi di berbagai sektor juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia pada jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, sebagian masyarakat harus menghadapi kenyataan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran di Indonesia tidak hanya terjadi pada masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga banyak dialami oleh lulusan perguruan tinggi. Fenomena ini sering disebut sebagai pengangguran terdidik. Banyak sarjana yang belum memperoleh pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, sebagian perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja yang cukup tinggi sehingga lulusan baru sering kali sulit bersaing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan

kerja, tetapi juga menyangkut kualitas pendidikan dan kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan dunia industri.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, pengangguran terbuka, yaitu keadaan ketika seseorang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ini sering terlihat di perkotaan, terutama pada kelompok usia muda yang baru lulus sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, pengangguran terselubung, yaitu kondisi ketika seseorang bekerja tetapi produktivitasnya sangat rendah atau pekerjaan yang dilakukan sebenarnya tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Contohnya dapat ditemukan di sektor pertanian tradisional di pedesaan, di mana terlalu banyak anggota keluarga bekerja di lahan yang sempit sehingga hasil kerja tidak optimal.

Ketiga, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu tertentu akibat perubahan musim atau kegiatan ekonomi tertentu. Di Indonesia, pengangguran musiman banyak dialami oleh petani dan nelayan. Pada musim panen, mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi setelah musim tersebut berakhir, sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Keempat, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi. Misalnya, penggunaan mesin modern di industri menyebabkan kebutuhan tenaga kerja manual menjadi berkurang. Tenaga

kerja yang tidak memiliki keterampilan baru akan sulit memperoleh pekerjaan kembali.

Masalah pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menyebabkan jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahun. Namun, pertumbuhan lapangan pekerjaan sering kali tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah pencari kerja. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya menganggur atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu.

Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga menjadi faktor penting. Sebagian tenaga kerja di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga sulit bersaing di dunia kerja modern. Di era globalisasi dan digitalisasi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi, komunikasi, dan keterampilan khusus. Ketika kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan industri, maka angka pengangguran cenderung meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja menjadi langkah penting dalam mengurangi pengangguran.

Faktor lain yang memengaruhi pengangguran adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar industri dan pusat ekonomi terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Akibatnya, banyak masyarakat dari daerah

melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan. Namun, jumlah lapangan kerja di kota tidak selalu cukup menampung para pendatang tersebut. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pengangguran di wilayah perkotaan sekaligus memunculkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, permukiman kumuh, dan kriminalitas.

Pengangguran juga dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Dari sisi ekonomi, pengangguran menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli ikut melemah. Ketika daya beli masyarakat menurun, kegiatan ekonomi juga menjadi lambat karena permintaan barang dan jasa berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pengangguran menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dari sisi sosial, pengangguran dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti meningkatnya angka kemiskinan, stres, konflik keluarga, hingga kriminalitas. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam waktu lama cenderung mengalami tekanan psikologis karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa kasus, pengangguran juga menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Salah satunya adalah dengan meningkatkan investasi dan pembangunan industri untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah juga mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi terus dikembangkan agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi juga membuka peluang kerja baru di bidang ekonomi kreatif dan digital. Banyak masyarakat Indonesia mulai bekerja sebagai pelaku usaha online, konten kreator, pekerja lepas digital, maupun pengembang teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman dapat menjadi peluang apabila masyarakat mampu meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan pengangguran di masa depan.

10.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristiknya.

1. Pengangguran Friksional

   Pengangguran friksional terjadi karena adanya waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan yang

sesuai dengan keterampilan dan preferensinya. Jenis pengangguran ini bersifat sementara dan umumnya terjadi dalam perekonomian yang dinamis. Sebagai contoh, lulusan perguruan tinggi yang baru mencari pekerjaan termasuk dalam pengangguran friksional. Pengangguran ini dianggap normal dalam perekonomian.

2. Pengangguran Struktural

   Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan struktur ekonomi dan teknologi yang menyebabkan keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, penggunaan mesin modern dalam industri dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Pengangguran struktural memerlukan pelatihan dan pendidikan ulang agar tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar kerja.

3. Pengangguran Siklis

   Pengangguran siklis terjadi akibat penurunan kegiatan ekonomi atau resesi. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Pengangguran jenis ini biasanya meningkat pada masa krisis ekonomi dan menurun ketika perekonomian kembali tumbuh.

4. Pengangguran Musiman

   Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau waktu tertentu. Pengangguran ini banyak terjadi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sebagai contoh, petani mungkin tidak memiliki pekerjaan

setelah musim panen selesai. Demikian pula pekerja di sektor wisata dapat mengalami pengangguran saat jumlah wisatawan menurun.

5. Setengah Pengangguran

   Setengah pengangguran terjadi ketika seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal atau bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Kondisi ini banyak ditemukan di negara berkembang.

10.2.2 Penyebab Pengangguran

Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Salah satu penyebab utama adalah pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja. Perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan pengangguran apabila tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menyebabkan banyak pencari kerja tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Krisis ekonomi dan penurunan investasi dapat mengurangi aktivitas produksi sehingga perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Faktor lainnya adalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi antarwilayah yang menyebabkan kesempatan kerja terkonsentrasi di daerah tertentu.

10.2.3 Dampak Pengangguran

Pengangguran memiliki dampak yang besar terhadap individu, masyarakat, dan perekonomian.

1. Dampak Ekonomi

   Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli melemah. Akibatnya, konsumsi masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Selain itu, pengangguran menyebabkan potensi produksi nasional tidak dimanfaatkan secara optimal. Negara kehilangan kesempatan menghasilkan barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh tenaga kerja yang menganggur.

2. Dampak Sosial

   Pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, konflik sosial, dan ketidakstabilan politik. Individu yang menganggur dalam waktu lama juga dapat mengalami tekanan psikologis dan menurunnya rasa percaya diri.

3. Dampak terhadap Pemerintah

   Tingginya tingkat pengangguran meningkatkan beban pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial dan program ketenagakerjaan. Selain itu, penerimaan pajak dapat menurun karena berkurangnya pendapatan masyarakat.

10.2.4 Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Inflasi dan pengangguran merupakan dua masalah ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat karena sama-sama memengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, persoalan inflasi dan pengangguran sering menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama terhadap harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan. Hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dilihat dari bagaimana perubahan harga barang dan jasa memengaruhi aktivitas ekonomi dan kondisi pasar tenaga kerja.

Inflasi adalah keadaan ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Dalam praktiknya, kedua masalah ini saling berkaitan karena perubahan dalam tingkat inflasi dapat memengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor ekonomi. Ketika inflasi meningkat, biaya hidup masyarakat menjadi lebih tinggi sehingga daya beli dapat menurun. Namun, dalam kondisi tertentu, inflasi juga dapat mendorong peningkatan produksi dan kesempatan kerja.

Hubungan antara inflasi dan pengangguran pertama kali dijelaskan melalui konsep Kurva Phillips. Konsep ini

menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Artinya, ketika tingkat inflasi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, ketika inflasi rendah, tingkat pengangguran bisa meningkat. Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa dalam perekonomian akan mendorong perusahaan meningkatkan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan produksi tersebut, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga angka pengangguran menurun.

Sebagai contoh, ketika kondisi ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik, masyarakat cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dan meningkatkan konsumsi. Permintaan terhadap barang dan jasa meningkat sehingga perusahaan memperbesar kapasitas produksinya. Dalam situasi ini, perusahaan akan membuka lapangan kerja baru dan merekrut lebih banyak pekerja. Akibatnya, tingkat pengangguran menurun. Akan tetapi, peningkatan permintaan tersebut juga dapat menyebabkan harga barang naik karena jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah barang yang tersedia. Kondisi inilah yang memicu inflasi.

Di sisi lain, ketika pemerintah berusaha menekan inflasi secara ketat, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar, aktivitas ekonomi dapat melambat. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, sementara perusahaan mengurangi

investasi dan produksi karena permintaan menurun. Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja juga berkurang sehingga pengangguran meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menurunkan inflasi terkadang dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran, terutama dalam jangka pendek.

Hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai kondisi ekonomi yang pernah terjadi. Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi, banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Perusahaan akhirnya mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya produksi. Pengangguran meningkat, sementara inflasi dapat tetap tinggi akibat kenaikan harga barang impor atau meningkatnya biaya produksi. Fenomena ini dikenal sebagai stagflasi, yaitu kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan tingginya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Dalam kehidupan masyarakat, inflasi yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bahan bakar, dan transportasi menjadi lebih mahal. Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika inflasi meningkat sementara pendapatan tetap, daya beli masyarakat menurun. Jika kondisi ini berlangsung lama, perusahaan dapat mengalami penurunan penjualan sehingga mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, inflasi yang

tidak terkendali pada akhirnya juga dapat meningkatkan pengangguran.

Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat memengaruhi inflasi. Ketika banyak masyarakat tidak memiliki pekerjaan, pendapatan masyarakat secara umum menurun. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menjadi rendah. Rendahnya permintaan menyebabkan perusahaan sulit menaikkan harga barang karena daya beli masyarakat lemah. Dalam kondisi seperti ini, tingkat inflasi cenderung rendah. Akan tetapi, walaupun inflasi rendah terlihat baik, tingginya pengangguran tetap menjadi masalah serius karena menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berjalan optimal.

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan berbagai kementerian terus berupaya menjaga keseimbangan antara inflasi dan pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tepat. Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar. Sementara itu, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta peningkatan investasi.

Selain itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia juga menjadi langkah penting dalam mengatasi pengangguran tanpa memicu inflasi berlebihan. Pendidikan dan pelatihan kerja dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja sehingga lebih mudah terserap di dunia industri. Ketika produktivitas

tenaga kerja meningkat, perusahaan dapat memproduksi barang lebih efisien sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa harus menaikkan harga terlalu tinggi. Dengan demikian, inflasi dapat dikendalikan sementara kesempatan kerja tetap meningkat.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, hubungan inflasi dan pengangguran menjadi semakin kompleks. Perubahan harga energi dunia, nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global dapat memengaruhi inflasi di Indonesia. Sementara itu, perkembangan teknologi digital dan otomatisasi industri dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa sektor tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang adaptif agar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

10.3 Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi merupakan kondisi ketika perekonomian berada dalam keadaan seimbang dan tidak mengalami gejolak yang besar. Stabilitas ekonomi ditandai oleh inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, serta stabilitas nilai tukar.

Stabilitas ekonomi sangat penting karena menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, masyarakat dapat merencanakan kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi dengan lebih

baik.Negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang baik umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan mampu menarik investasi asing.

10.3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Stabilitas Ekonomi

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.

1. Kebijakan Pemerintah

   Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja.

2. Stabilitas Politik

   Stabilitas politik memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha. Konflik politik dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan menghambat investasi.

3. Kondisi Ekonomi Global

   Perekonomian global memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Krisis ekonomi global, perubahan harga komoditas, dan kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi kondisi ekonomi domestik.

4. Stabilitas Sistem Keuangan

   Sistem keuangan yang sehat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Krisis perbankan dapat menyebabkan gangguan besar pada kegiatan ekonomi.

10.3.2 Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Ekonomi

Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan pengawasan sistem keuangan. Di Indonesia, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, Bank Indonesia juga berperan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar.

10.3.3 Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan sektor industri. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Dalam menghadapi krisis ekonomi, pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi.

10.4 Inflasi, Pengangguran, dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi di Indonesia sering dipengaruhi oleh harga pangan, energi, dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menerapkan kerangka inflation targeting untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran tertentu. Kebijakan ini dilakukan melalui pengaturan suku bunga dan koordinasi dengan pemerintah.

Tingkat pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan perkembangan sektor industri. Pemerintah terus mendorong pengembangan UMKM, investasi, dan pelatihan tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Pemerintah memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Inflasi, pengangguran, dan stabilitas ekonomi merupakan indikator utama dalam analisis makroekonomi. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan pengangguran menunjukkan kondisi ketika angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kedua indikator tersebut memiliki hubungan yang erat dan memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi yang

tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Sementara itu, pengangguran yang tinggi menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara inflasi dan pengangguran.

Stabilitas ekonomi menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi karena menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi dapat dicapai melalui koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

Dalam era globalisasi, tantangan menjaga stabilitas ekonomi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan agar perekonomian mampu menghadapi berbagai perubahan dan krisis global.

REFERENSI

Abel, Andrew B., Ben S. Bernanke, dan Dean Croushore. 2017. *Macroeconomics.* Boston: Pearson.

Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia.* Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. 2023. *Laporan Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Bank Indonesia.

Blanchard, Olivier. 2021. *Macroeconomics.* New York: Pearson.

Boediono. 2014. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.

Case, Karl E., Ray C. Fair, dan Sharon E. Oster. 2017. *Principles of Economics*. New York: Pearson.

Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, dan Richard Startz. 2018. *Macroeconomics.* New York: McGraw-Hill.

Friedman, Milton. 2008. *Inflation and Unemployment.* Chicago: University of Chicago Press.

Krugman, Paul, dan Robin Wells. 2018. *Macroeconomics.* New York: Worth Publishers.

Lipsey, Richard G. 2013. *An Introduction to Positive Economics.* Oxford: Oxford University Press.

Madura, Jeff. 2014. *Financial Markets and Institutions*. Mason: South-Western Cengage Learning.

Mankiw, N. Gregory. 2018. *Principles of Economics.* Boston: Cengage Learning.

Mishkin, Frederic S. 2019. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. New York: Pearson.

Mishra, Puri. 2015. *Modern Macroeconomics Theory and Policy*. New Delhi: Himalaya Publishing.

Nopirin. 2016. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.

Phelps, Edmund S. 2006. *Macroeconomics for a Modern Economy*. New York: Norton.

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 2010. *Economics.* New York: McGraw-Hill.

Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2017. *Pengantar Teori Makroekonomi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

BAB 11
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Caesar Muslim, S.E., M.Si.

11.1 Konsep Dasar Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen utama dalam kerangka kebijakan makroekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, kedua kebijakan ini dipandang sebagai alat intervensi yang strategis untuk mengelola fluktuasi siklus bisnis, mengendalikan inflasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mankiw, 2021).

Secara konseptual, kebijakan fiskal merujuk pada tindakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, terutama melalui instrumen pajak dan belanja pemerintah. Kebijakan ini dijalankan oleh otoritas fiskal, yaitu pemerintah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara itu, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan kondisi likuiditas dalam perekonomian, umumnya melalui pengaturan suku bunga dan instrumen keuangan lainnya (Mishkin, 2019).

Dalam konteks tujuan, baik kebijakan fiskal maupun moneter memiliki sasaran yang relatif sama dalam kerangka

makroekonomi. Tujuan tersebut meliputi: (1) Menjaga stabilitas harga (inflasi rendah dan terkendali), (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (3) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, serta (4) Menjaga keseimbangan eksternal seperti stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran (Blanchard & Johnson, 2017). Keempat tujuan ini sering disebut sebagai tujuan utama kebijakan makroekonomi dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan di berbagai negara.

Meskipun memiliki tujuan yang serupa, kebijakan fiskal dan moneter memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi pelaksana, instrumen, maupun mekanisme transmisi. Kebijakan fiskal bersifat lebih langsung *(direct impact)* karena pemerintah dapat secara langsung meningkatkan atau menurunkan pengeluaran serta mengubah tarif pajak untuk mempengaruhi permintaan agregat. Sebaliknya, kebijakan moneter cenderung bekerja secara tidak langsung (indirect impact), karena perubahan suku bunga atau jumlah uang beredar mempengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan ekspektasi pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar (Holm, M., 2020).

Dalam kerangka analisis makroekonomi, kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan pendekatan Keynesian, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menstabilkan perekonomian, terutama pada saat terjadi resesi. Dalam kondisi permintaan agregat yang lemah, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang aktivitas ekonomi (Majeed H, 2024).

Sebaliknya, kebijakan moneter lebih banyak berkembang dalam kerangka pemikiran Monetaris, yang menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga (Altinisik, E., 2024).

Perbedaan lainnya terletak pada fleksibilitas dan kecepatan implementasi. Kebijakan moneter umumnya dianggap lebih fleksibel karena dapat diubah dengan relatif cepat melalui keputusan bank sentral, misalnya perubahan suku bunga acuan. Sementara itu, kebijakan fiskal cenderung menghadapi keterbatasan administratif dan politik, seperti proses legislasi anggaran, yang menyebabkan adanya time lag dalam implementasi (Dornbusch et al., 2018). Hal ini menjadikan kebijakan moneter sering digunakan sebagai alat stabilisasi jangka pendek, sementara kebijakan fiskal lebih efektif dalam jangka menengah hingga panjang.

Meskipun demikian, dalam praktiknya kedua kebijakan ini tidak dapat dipisahkan secara tegas. Justru, efektivitas kebijakan makroekonomi sangat bergantung pada koordinasi antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter. Koordinasi ini dikenal sebagai policy mix, yaitu kombinasi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi secara optimal. Misalnya, dalam kondisi resesi, kebijakan fiskal ekspansif (peningkatan belanja pemerintah) dapat didukung oleh kebijakan moneter longgar (penurunan suku bunga) untuk memperkuat dampak stimulus ekonomi (Auerbach & Gorodnichenko, 2012).

Ketidaksinkronan antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter dapat menimbulkan distorsi. Sebagai contoh, jika pemerintah

menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja, namun bank sentral menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga, maka efek stimulatif dari kebijakan fiskal dapat tereduksi oleh penurunan investasi akibat tingginya biaya pinjaman. Fenomena ini sering disebut sebagai crowding out effect (Blanchard & Johnson, 2017). Selain itu, dalam konteks ekonomi modern, hubungan antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter juga semakin kompleks dengan adanya faktor ekspektasi dan kredibilitas kebijakan. Teori ekspektasi rasional menyatakan bahwa pelaku ekonomi akan merespons kebijakan tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga berdasarkan ekspektasi terhadap kebijakan di masa depan (Cole S, 2020). Oleh karena itu, konsistensi dan kredibilitas kebijakan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat efektif dalam mempengaruhi perilaku ekonomi.

Dalam perekonomian terbuka, interaksi antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti arus modal internasional dan pergerakan nilai tukar. Misalnya, kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dapat menyebabkan arus keluar modal (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar. Dalam situasi ini, kebijakan fiskal yang prudent dapat membantu menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi (Cole S, 2020).

Lebih lanjut, dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, Kebijakan Fiskal Dan Moneter memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi

yang rentan terhadap guncangan eksternal. Negara berkembang sering menghadapi keterbatasan fiskal, seperti basis pajak yang sempit dan ketergantungan pada pembiayaan utang, sehingga efektivitas kebijakan fiskal menjadi terbatas. Di sisi lain, kebijakan moneter juga menghadapi tantangan seperti transmisi yang tidak sempurna akibat struktur pasar keuangan yang belum berkembang secara optimal (Majeed H, 2024).

11.2 Landasan Teori Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemahaman terhadap Kebijakan Fiskal Dan Moneter tidak dapat dilepaskan dari landasan teoritis yang berkembang dalam ekonomi makro. Sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, terdapat berbagai aliran pemikiran yang memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana kebijakan ekonomi seharusnya dirancang dan diimplementasikan. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan peran pemerintah, efektivitas pasar, serta mekanisme penyesuaian dalam perekonomian. Oleh karena itu, pembahasan landasan teori menjadi penting untuk memberikan kerangka analitis dalam memahami dinamika kebijakan fiskal dan moneter.

11.2.1 Perspektif Keynesian

Salah satu tonggak utama dalam teori kebijakan makroekonomi adalah pemikiran John Maynard Keynes yang diperkenalkan melalui karyanya The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam perspektif

Keynesian, perekonomian tidak selalu berada pada kondisi keseimbangan penuh *(full employment),* sehingga intervensi pemerintah menjadi diperlukan untuk menstabilkan siklus ekonomi.

Menurut Keynes, penyebab utama fluktuasi ekonomi adalah ketidakstabilan permintaan agregat. Dalam kondisi resesi, sektor swasta cenderung mengurangi konsumsi dan investasi, sehingga menyebabkan penurunan *output* dan meningkatnya pengangguran. Dalam situasi ini, kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pemulihan ekonomi (Parui, 2023). Keynes juga menekankan bahwa kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam kondisi tertentu, seperti fenomena liquidity trap, di mana penurunan suku bunga tidak lagi efektif dalam mendorong investasi. Dalam kondisi ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter.

11.2.2 Perspektif Monetaris

Sebagai respon terhadap dominasi pemikiran Keynesian, muncul aliran Monetaris yang dipelopori oleh Milton Friedman. Dalam pandangan Monetaris, stabilitas ekonomi sangat bergantung pada pengendalian jumlah uang beredar. Friedman berargumen bahwa inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter, yang terjadi akibat pertumbuhan uang

beredar yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan *output* (Khan, 2025).

Monetaris berpendapat bahwa kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam mengelola perekonomian. Mereka juga mengkritik kebijakan fiskal karena seringkali menimbulkan efek crowding out, yaitu penurunan investasi swasta akibat meningkatnya suku bunga yang dipicu oleh pembiayaan defisit pemerintah. Selain itu, Monetaris menekankan pentingnya aturan dalam kebijakan moneter (monetary rule), seperti aturan pertumbuhan uang beredar yang konstan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kredibilitas kebijakan (Mishkin, 2019).

11.2.3 Perspektif Klasik dan Neoklasik

Pandangan klasik dan neoklasik memiliki keyakinan bahwa pasar pada dasarnya efisien dan mampu mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme harga. Dalam kerangka ini, intervensi pemerintah dianggap minimal diperlukan, karena perekonomian cenderung menuju keseimbangan jangka panjang secara alami (Blanchard & Johnson, 2017).

Salah satu konsep penting dalam perspektif ini adalah netralitas uang, yaitu pandangan bahwa perubahan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi variabel nominal seperti harga, tetapi tidak mempengaruhi variabel riil seperti *output* dan tenaga kerja dalam jangka panjang (Blanchard, O., 2022).

Oleh karena itu, kebijakan moneter dianggap hanya efektif dalam jangka pendek. Selain itu, dalam konteks kebijakan fiskal, teori neoklasik juga mengemukakan konsep Ricardian Equivalence, yang menyatakan bahwa pembiayaan defisit melalui utang tidak akan meningkatkan permintaan agregat, karena masyarakat akan meningkatkan tabungan untuk mengantisipasi pajak di masa depan. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi *output*.

11.2.4 Pendekatan New Keynesian

Perkembangan lebih lanjut dalam teori makroekonomi melahirkan pendekatan New Keynesian, yang mencoba menggabungkan elemen-elemen dari teori Keynesian dan neoklasik. Pendekatan ini mengakui pentingnya ekspektasi rasional dan mikrofundasi, tetapi tetap mempertahankan peran kebijakan stabilisasi dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. New Keynesian menekankan adanya rigiditas harga dan upah (price and wage stickiness), yang menyebabkan pasar tidak selalu dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dalam kondisi ini, kebijakan moneter dan fiskal tetap diperlukan untuk menstabilkan perekonomian.

Dalam kerangka ini, kebijakan moneter modern sering diformulasikan melalui aturan seperti Taylor Rule, yang mengaitkan suku bunga kebijakan dengan inflasi dan kesenjangan *output* (Mankiw, 2021). Pendekatan ini

menekankan pentingnya kredibilitas dan transparansi bank sentral dalam mengelola ekspektasi inflasi.

11.3 Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter

Instrumen dan mekanisme operasional merupakan aspek krusial dalam memahami bagaimana Kebijakan Fiskal Dan Moneter diimplementasikan dalam praktik. Jika pada bagian sebelumnya dibahas landasan teoritis, maka pada bagian ini fokus diarahkan pada alat kebijakan yang digunakan oleh otoritas fiskal dan moneter serta bagaimana alat tersebut bekerja dalam mempengaruhi variabel makroekonomi. Pemahaman terhadap instrumen ini sangat penting karena efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh desain, implementasi, dan konteks ekonomi di mana kebijakan tersebut dijalankan (Mishkin, 2019).

11.3.1 Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah melalui pengelolaan anggaran negara, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Secara umum, terdapat tiga instrumen utama dalam kebijakan fiskal, yaitu: pajak, belanja pemerintah, dan transfer pembayaran.

1. Pajak *(Taxation);* Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan instrumen penting dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengatur tingkat konsumsi dan investasi masyarakat. Penurunan pajak,

misalnya, akan meningkatkan pendapatan disposabel rumah tangga, sehingga mendorong konsumsi. Sebaliknya, peningkatan pajak dapat menekan permintaan agregat dan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi (Mankiw, 2021). Selain itu, pajak juga memiliki fungsi redistribusi pendapatan, terutama melalui sistem pajak progresif. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.

2. Belanja Pemerintah *(Government Expenditure);* Belanja pemerintah mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta belanja operasional. Peningkatan belanja pemerintah dapat secara langsung meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kondisi resesi (Blanchard & Johnson, 2017). Efek dari belanja pemerintah sering dijelaskan melalui konsep multiplier fiskal, yaitu besarnya dampak perubahan belanja pemerintah terhadap *output* nasional. Nilai multiplier ini bergantung pada berbagai faktor, seperti proporsi konsumsi, struktur ekonomi, dan kondisi siklus bisnis.
3. Transfer Pembayaran *(Transfer Payments);* Transfer pembayaran meliputi bantuan sosial, subsidi, dan program jaminan sosial. Instrumen ini tidak secara langsung meningkatkan *output*, tetapi berfungsi meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Dengan demikian, transfer dapat

meningkatkan konsumsi agregat dan mengurangi ketimpangan (Dornbusch, 2018).

11.3.2 Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam kondisi resesi atau perlambatan ekonomi. Sedangkan, Kebijakan Fiskal Kontraktif dilakukan dengan mengurangi belanja pemerintah atau meningkatkan pajak untuk menekan inflasi. Kebijakan ini digunakan ketika perekonomian mengalami overheating. Namun demikian, implementasi kebijakan fiskal seringkali menghadapi kendala seperti defisit anggaran dan pembiayaan utang. Pembiayaan defisit melalui utang publik dapat menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal jika tidak dikelola dengan baik (Deheri, 2022).

11.3.3 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Instrumen utama kebijakan moneter meliputi:

1. Suku Bunga Kebijakan *(Policy Interest Rate);* Suku bunga merupakan instrumen utama dalam kerangka kebijakan moneter modern. Perubahan suku bunga mempengaruhi

biaya pinjaman dan imbal hasil tabungan, yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi dan investasi. Penurunan suku bunga mendorong aktivitas ekonomi, sedangkan kenaikan suku bunga digunakan untuk menekan inflasi.

2. Operasi Pasar Terbuka *(Open Market Operations);* Instrumen ini dilakukan melalui pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral di pasar terbuka. Pembelian surat berharga meningkatkan jumlah uang beredar, sedangkan penjualan mengurangi likuiditas. Operasi ini merupakan alat yang fleksibel dan sering digunakan untuk mengelola likuiditas jangka pendek (Mishkin, 2019).
3. Giro Wajib Minimum *(Reserve Requirement);* Bank sentral dapat mengatur jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank komersial. Peningkatan rasio cadangan akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, sedangkan penurunan rasio akan meningkatkan likuiditas di sektor perbankan (Mankiw, 2021).

11.3.4 Kebijakan Moneter Ekspansif dan Kontraktif

Dalam kerangka operasional kebijakan moneter, bank sentral menggunakan instrumen yang tersedia untuk mengarahkan kondisi likuiditas dan aktivitas ekonomi melalui dua pendekatan utama, yaitu Kebijakan Moneter Ekspansif dan Kebijakan Moneter Kontraktif. Kedua pendekatan ini

mencerminkan respons kebijakan terhadap kondisi siklus bisnis dan tekanan makroekonomi yang dihadapi suatu negara.

Kebijakan Moneter Ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan biaya pinjaman. Kebijakan ini umumnya diterapkan dalam kondisi resesi atau perlambatan ekonomi, ketika permintaan agregat mengalami penurunan dan tingkat pengangguran meningkat. Dalam implementasinya, bank sentral dapat menurunkan suku bunga kebijakan, melakukan pembelian surat berharga melalui operasi pasar terbuka, serta menurunkan rasio cadangan wajib minimum untuk meningkatkan likuiditas di sektor perbankan. Penurunan suku bunga akan mendorong konsumsi dan investasi karena biaya pembiayaan menjadi lebih murah, sehingga pada akhirnya meningkatkan *output* nasional (Mishkin, 2019).

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan mencegah overheating dalam perekonomian. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat dan tekanan inflasi meningkat. Dalam konteks ini, bank sentral akan menaikkan suku bunga kebijakan, menjual surat berharga di pasar terbuka, serta meningkatkan rasio cadangan wajib minimum. Kenaikan suku bunga akan mengurangi konsumsi dan investasi karena meningkatnya biaya pinjaman, sehingga menurunkan permintaan agregat dan tekanan inflasi

(Mankiw, 2021). Namun demikian, efektivitas kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif sangat bergantung pada kondisi struktural perekonomian dan mekanisme transmisi kebijakan. Dalam beberapa kasus, kebijakan ekspansif tidak sepenuhnya efektif jika sektor perbankan enggan menyalurkan kredit atau jika pelaku ekonomi memiliki ekspektasi pesimistis terhadap kondisi ekonomi. Sebaliknya, kebijakan kontraktif yang terlalu agresif dapat menekan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan dan meningkatkan risiko resesi. Oleh karena itu, bank sentral perlu mempertimbangkan berbagai indikator makroekonomi secara komprehensif dalam menentukan arah kebijakan (Blanchard & Johnson, 2017).

11.4 Mekanisme Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemahaman mengenai Kebijakan Fiskal Dan Moneter tidak akan lengkap tanpa mengkaji bagaimana kebijakan tersebut ditransmisikan ke dalam perekonomian riil serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan makroekonomi. Mekanisme transmisi merujuk pada jalur atau proses di mana perubahan instrumen kebijakan mempengaruhi variabel antara (intermediate variables) dan pada akhirnya berdampak pada *output*, inflasi, serta tingkat pengangguran. Sementara itu, efektivitas kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai target yang diinginkan, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi

struktural ekonomi, ekspektasi pelaku ekonomi, serta kualitas institusi.

11.4.1 Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal bekerja langsung dalam mempengaruhi permintaan agregat. Namun demikian, mekanisme transmisinya tetap kompleks dan melibatkan berbagai saluran.

1. Multiplier Fiskal; Konsep utama dalam transmisi kebijakan fiskal adalah multiplier effect, yaitu efek berantai dari peningkatan belanja pemerintah terhadap *output* nasional. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, pendapatan masyarakat meningkat, yang kemudian mendorong konsumsi dan menciptakan efek lanjutan dalam perekonomian. Nilai multiplier fiskal bergantung pada berbagai faktor, seperti marginal propensity to consume (MPC), tingkat keterbukaan ekonomi, dan kondisi siklus bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa multiplier fiskal cenderung lebih besar dalam kondisi resesi dibandingkan ekspansi (Auerbach, 2012).
2. *Crowding Out Effect*; Salah satu keterbatasan kebijakan fiskal adalah potensi terjadinya crowding out, yaitu penurunan investasi swasta akibat peningkatan suku bunga yang dipicu oleh pembiayaan defisit pemerintah. Dalam kondisi ini, efek ekspansif kebijakan fiskal dapat berkurang atau bahkan menjadi tidak efektif (Blanchard & Johnson, 2017).

3. Ekspektasi dan *Ricardian Equivalence*; Teori Ricardian Equivalence menyatakan bahwa masyarakat akan mengantisipasi peningkatan pajak di masa depan akibat defisit saat ini, sehingga mereka meningkatkan tabungan dan mengurangi konsumsi. Jika teori ini berlaku, maka kebijakan fiskal menjadi tidak efektif dalam meningkatkan permintaan agregat (Ikiz, A. 2020).

11.4.2 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bekerja melalui beberapa jalur transmisi utama yang saling terkait. Literatur ekonomi mengidentifikasi setidaknya empat jalur utama, yaitu jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi.

1. Jalur Suku Bunga *(Interest Rate Channel);* Jalur ini merupakan mekanisme transmisi yang paling klasik dan banyak dibahas dalam teori makroekonomi. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga kebijakan, biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong investasi dan konsumsi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga akan menekan permintaan agregat. Dalam kerangka model IS-LM, penurunan suku bunga akan menggeser kurva IS ke kanan melalui peningkatan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan *output* keseimbangan. Namun, efektivitas jalur ini sangat bergantung pada sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga (Blanchard & Johnson, 2017).

2. Jalur Kredit *(Credit Channel);* Selain melalui suku bunga, kebijakan moneter juga mempengaruhi perekonomian melalui ketersediaan kredit. Jalur ini menekankan peran sistem perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Ketika bank sentral meningkatkan likuiditas, bank komersial memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan kredit, sehingga mendorong investasi dan konsumsi (Khan, 2025).
3. Jalur Nilai Tukar *(Exchange Rate Channel);* Dalam perekonomian terbuka, perubahan suku bunga domestik akan mempengaruhi arus modal internasional dan nilai tukar. Penurunan suku bunga cenderung menyebabkan depresiasi nilai tukar, yang dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, sehingga memperkuat permintaan agregat.
4. Jalur Ekspektasi *(Expectations Channel);* Dalam kerangka ekonomi modern, ekspektasi memainkan peran yang sangat penting. Kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi variabel ekonomi melalui perubahan aktual, tetapi juga melalui perubahan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kondisi masa depan (Khan, 2025).

11.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter tidak hanya ditentukan oleh instrumen yang digunakan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal dan struktural, antara lain:

a) Struktur Ekonomi; Negara dengan sektor keuangan yang berkembang cenderung memiliki transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif. Sebaliknya, di negara dengan pasar keuangan yang dangkal, transmisi kebijakan menjadi lebih lemah (Cole, 2020).
b) Kredibilitas dan Independensi Institusi; Kredibilitas bank sentral dan disiplin fiskal pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Institusi yang kredibel mampu mengelola ekspektasi masyarakat dengan lebih baik (Majeed, H. 2024)
c) Kondisi Siklus Ekonomi; Efektivitas kebijakan juga bergantung pada fase siklus bisnis. Kebijakan fiskal cenderung lebih efektif dalam kondisi resesi, sementara kebijakan moneter lebih efektif dalam kondisi normal.
d) Keterbukaan Ekonomi; Dalam ekonomi terbuka, kebijakan domestik dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti arus modal dan nilai tukar. Hal ini dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas kebijakan (Parui, P. 2023).

11.5 Isu Kontemporer Kebijakan Fiskal dan Moneter di Negara Berkembang

Perkembangan ekonomi global dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa Kebijakan Fiskal Dan Moneter tidak lagi dapat dipahami hanya dalam kerangka teoritis klasik, tetapi harus dianalisis dalam konteks dinamika kontemporer yang kompleks. Salah satu isu kontemporer yang

paling menonjol adalah pentingnya koordinasi antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter dalam menghadapi krisis ekonomi. Pengalaman krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa respons kebijakan yang terkoordinasi dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Dalam situasi krisis, kebijakan fiskal sering digunakan secara ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah, stimulus ekonomi, dan bantuan sosial. Di sisi lain, kebijakan moneter mendukung melalui pelonggaran likuiditas, penurunan suku bunga, dan kebijakan non-konvensional seperti *quantitative easing* (Romer, C. 2022). Koordinasi ini dikenal sebagai extraordinary policy mix, di mana batas antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter menjadi lebih fleksibel. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan risiko, seperti meningkatnya utang publik dan potensi tekanan inflasi di masa depan.

Negara berkembang menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan negara maju dalam implementasi kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan ruang fiskal (*fiscal space*). Basis pajak yang sempit dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah menyebabkan kemampuan pemerintah dalam melakukan ekspansi fiskal menjadi terbatas (Majeed, H. 2024). Selain itu, banyak negara berkembang menghadapi masalah ketergantungan pada utang, baik domestik maupun eksternal. Pembiayaan defisit melalui utang dapat meningkatkan risiko krisis fiskal jika

tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Romer, C. 2022).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter menunjukkan dinamika yang menarik, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mencakup bantuan sosial, subsidi, dan dukungan terhadap sektor usaha. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengambil langkah-langkah kebijakan yang akomodatif, seperti penurunan suku bunga dan pembelian surat utang pemerintah di pasar perdana. Kebijakan ini mencerminkan koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan jangka panjang, seperti peningkatan utang publik dan risiko inflasi. Oleh karena itu, strategi keluar (*exit strategy*) menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ekonomi.

REFERENSI

Altinisik, E., & Yucememis, B. (2024). The relationship between money supply and inflation: analysis with PANELVAR approach. *Pressacademia*.

Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Fiscal multipliers in recession and expansion. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(2), 1–27.

Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson.

Blanchard, O., Cherrier, B., Clerc, P., Laidler, D., Orphanides, A., & Trautwein, H. (2022). Monetary non-neutrality and stabilisation policies 50 years after Lucas's "expectations" paper: a roundtable discussion. *The European Journal of the History of Economic Thought, 29*, 1165 - 1189. https://doi.org/10.1080/09672567.2022.2137552.

Cole, S. (2020). Learning and the Effectiveness of Central Bank Forward Guidance. *Journal of Money, Credit and Banking*.

Deheri, A., & Nag, A. (2022). Assessing the Long-Run Sustainability of Public Debt and Fiscal Deficit in India. *Global Journal of Emerging Market Economies, 15*, 313 - 329. https://doi.org/10.1177/09749101221113881.

Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). Macroeconomics (13th ed.). McGraw-Hill.

Holm, M., Paul, P., & Tischbirek, A. (2020). The Transmission of Monetary Policy under the Microscope. *Journal of Political Economy, 129*, 2861 - 2904. https://doi.org/10.1086/715416.

Ikiz, A. (2020). Testing the Ricardian Equivalence Theorem: Time Series Evidence from Turkey. *Economies*.

https://doi.org/10.3390/economies8030069.

Khan, M., & Rashid, S. (2025). Monetary Facts or Monetarist Facts? A Re-Examination. *Journal of Central Banking Theory and Practice, 14*, 183 - 214. https://doi.org/10.2478/jcbtp-2025-0010.

Majeed, H., Abdulridha, M., & Kadhim, N. (2024). Fiscal Policy's Function in Reducing Economic Downturn. *Shanlax International Journal of Economics*.

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.

Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). Pearson.

Parui, P. (2023). Fiscal expansion, government debt and economic growth: a post-Keynesian perspective. Journal of Post Keynesian Economics, 47, 117 - 154. https://doi.org/10.1080/01603477.2023.2221444.

Romer, C. (2022). The Fiscal Policy Response to the Pandemic. *Brookings Papers on Economic Activity, 2021*, 110 - 89. https://doi.org/10.1353/eca.2021.0009.

BAB 12
EKONOMI INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI

Tarjono, S.E., M.M.

Perkembangan ekonomi global menunjukkan keterkaitan antarnegara yang semakin kuat melalui perdagangan internasional, investasi asing, mobilitas modal, dan kemajuan teknologi digital. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi dunia sehingga aktivitas ekonomi suatu negara semakin dipengaruhi kondisi internasional.

Dalam teori ekonomi internasional, perdagangan antarnegara terjadi karena perbedaan sumber daya, teknologi, dan kemampuan produksi. Melalui spesialisasi dan perdagangan, negara dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, persaingan industri, dan ketergantungan terhadap pasar global.

Bagi Indonesia, ekonomi internasional berperan penting melalui ekspor, investasi asing, dan kerja sama ekonomi global. Akan tetapi, struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas primer sehingga peningkatan nilai tambah dan daya saing industri menjadi tantangan utama.

Dalam perkembangan global saat ini, meningkatnya proteksionisme, konflik geopolitik, dan volatilitas pasar global

menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu berjalan secara stabil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ekonomi internasional menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi nasional yang adaptif dan berkelanjutan.

12.1 Ekonomi Internasional: Konsep dan Ruang Lingkup

Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antarnegara, meliputi perdagangan internasional, investasi asing, dan keuangan internasional. Dalam era globalisasi, hubungan ekonomi antarnegara menjadi semakin penting karena meningkatnya integrasi pasar dunia.

Menurut Paul Krugman dan Maurice Obstfeld (2018), ekonomi internasional mencakup perdagangan internasional dan keuangan internasional. Perdagangan internasional berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, sedangkan keuangan internasional mencakup arus modal, nilai tukar, dan sistem keuangan global.

Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, teknologi, dan kemampuan produksi antarnegara. Negara akan memproduksi barang yang lebih efisien untuk diperdagangkan dengan negara lain guna memperoleh keuntungan ekonomi.

Gambar 12.1 Alur Perdagangan Internasional

Dalam konteks Indonesia, ekonomi internasional memiliki peran penting melalui ekspor komoditas dan investasi asing. Namun, dominasi ekspor berbasis sumber daya alam menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.

Dengan demikian, ekonomi internasional menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadirkan tantangan bagi negara berkembang dalam menghadapi persaingan global.

12.2 Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional menjelaskan alasan negara melakukan perdagangan dan manfaat yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Menurut Salvatore (2019), konsep keunggulan absolut yang dikemukakan Adam Smith menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang diproduksi paling efisien. Menurut Salvatore (2019), teori keunggulan komparatif

Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut.

Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa perdagangan dipengaruhi oleh perbedaan faktor produksi antarnegara (Salvatore, 2019). Negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah. Dalam perkembangan modern, Krugman dan Obstfeld (2018) melalui New Trade Theory menekankan pentingnya skala ekonomi, diferensiasi produk, dan peran perusahaan multinasional dalam perdagangan global.

Tabel 12.1 Perbandingan Teori Perdagangan Internasional

Teori	**Tokoh**	**Inti Pemikiran**
Keunggulan Absolut	Adam Smith	Negara mengekspor barang yang diproduksi paling efisien
Keunggulan Komparatif	David Ricardo	Perdagangan didasarkan pada biaya peluang terendah
Heckscher-Ohlin	Heckscher & Ohlin	Perdagangan dipengaruhi faktor produksi
Teori Modern	Paul Krugman	Skala ekonomi dan diferensiasi produk

Dalam konteks Indonesia, perdagangan internasional masih didominasi keunggulan komparatif berbasis sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Oleh karena itu, peningkatan daya saing melalui industrialisasi,

teknologi, dan inovasi menjadi penting agar Indonesia mampu bersaing dalam ekonomi global.

12.3 Kebijakan Perdagangan Internasional: Perspektif Empiris

Kebijakan perdagangan internasional merupakan instrumen pemerintah dalam mengatur arus barang dan jasa lintas negara. Dalam ekonomi global, kebijakan perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik dan pembangunan nasional.

Instrumen perdagangan internasional terdiri atas tarif dan hambatan nontarif. Tarif merupakan pajak atas barang impor yang bertujuan melindungi industri domestik, sedangkan kuota digunakan untuk membatasi jumlah impor

. Selain itu, pemerintah juga menggunakan subsidi ekspor untuk meningkatkan daya saing produk domestik.

Tabel 12.2 Bentuk Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan	**Pengertian**	**Dampak Positif**	**Dampak Negatif**
Tarif	Pajak atas barang impor	Melindungi industri domestik	Harga barang meningkat

Kebijakan	Pengertian	Dampak Positif	Dampak Negatif
Kuota	Pembatasan jumlah impor	Menjaga pasar lokal	Mengurangi persaingan
Subsidi Ekspor	Bantuan pemerintah kepada eksportir	Meningkatkan ekspor	Membebani anggaran negara
Perdagangan Bebas	Pengurangan hambatan perdagangan	Meningkatkan efisiensi	Persaingan semakin ketat

Secara konseptual, kebijakan perdagangan berada di antara perdagangan bebas dan proteksionisme. Perspektif ekonomi neoklasik mendukung perdagangan bebas karena dinilai meningkatkan efisiensi global (Salvatore, 2019). Namun, dalam praktiknya, liberalisasi perdagangan sering menghadapi tantangan akibat ketidaksempurnaan pasar, dominasi perusahaan multinasional, dan ketimpangan distribusi manfaat globalisasi.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan perdagangan diarahkan untuk menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri domestik. Salah satu contohnya adalah kebijakan hilirisasi nikel yang bertujuan meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri melalui pembangunan industri pengolahan.

Kebijakan tersebut memicu sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) karena dianggap menghambat perdagangan bebas. Kasus ini menunjukkan adanya dilema antara kepentingan pembangunan nasional dan aturan perdagangan internasional.

Dalam era globalisasi, pendekatan perdagangan yang relevan bagi Indonesia adalah kebijakan yang pragmatis dan adaptif melalui kombinasi keterbukaan ekonomi dan perlindungan selektif terhadap sektor strategis.

12.3.1 Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi merupakan proses integrasi ekonomi antarnegara yang ditandai meningkatnya perdagangan internasional, investasi asing, dan integrasi pasar keuangan. Proses ini didorong kemajuan teknologi, liberalisasi ekonomi, dan perkembangan sistem keuangan global.

Menurut World Bank (2023), globalisasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar dan peningkatan efisiensi produksi. Negara yang mampu berintegrasi secara efektif dalam ekonomi global cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Globalisasi memiliki beberapa dimensi utama, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), dan integrasi pasar keuangan. Perdagangan internasional memperluas akses pasar dan memperkuat spesialisasi produksi, sedangkan FDI mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi.

Gambar 12.2 Dampak Globalisasi

Selain memberikan manfaat berupa efisiensi ekonomi, difusi teknologi, dan perluasan pasar, globalisasi juga menghadapi kritik karena meningkatkan ketimpangan ekonomi dan kerentanan terhadap krisis global. Joseph Stiglitz (2020) menilai bahwa manfaat globalisasi sering kali lebih besar dinikmati negara maju dan perusahaan multinasional.

Dalam konteks Indonesia, globalisasi membuka peluang perdagangan dan investasi, tetapi juga meningkatkan persaingan terhadap industri domestik. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi komoditas berbasis sumber daya alam sehingga transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi menjadi tantangan penting.

Oleh karena itu, strategi globalisasi yang relevan bagi Indonesia adalah penguatan daya saing industri, diversifikasi

ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan institusi ekonomi yang efektif.

12.3.2 Lembaga Internasional

Lembaga internasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global seiring meningkatnya interdependensi antarnegara akibat globalisasi. Sistem ekonomi internasional modern berkembang sejak Bretton Woods pasca-Perang Dunia II (IMF, 2023). Dalam perkembangannya, WTO hadir untuk mengatur perdagangan internasional berbasis aturan.

Secara umum, lembaga internasional berfungsi sebagai forum koordinasi kebijakan, penyedia bantuan pembiayaan, pembuat aturan internasional, dan penyelesaian sengketa antarnegara. WTO berperan menjaga keteraturan perdagangan global melalui aturan perdagangan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, IMF berfungsi menjaga stabilitas moneter internasional melalui bantuan pembiayaan bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran.

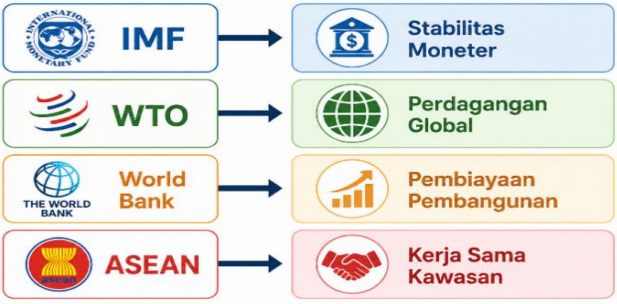

Gambar 12.3 Peran Lembaga Internasional

Dalam praktiknya, kebijakan lembaga internasional sering mendapat kritik karena dominasi negara maju dalam pengambilan keputusan. IMF misalnya kerap dikritik karena menerapkan kebijakan penyesuaian ekonomi yang terlalu menekankan austerity dan reformasi fiskal.

Peran IMF terlihat pada krisis Asia 1997–1998 ketika Indonesia menerima bantuan pembiayaan disertai reformasi sektor keuangan, pengurangan subsidi, dan restrukturisasi perbankan. Program tersebut membantu stabilisasi ekonomi dalam jangka menengah, tetapi juga meningkatkan tekanan sosial pada awal krisis melalui meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Di bidang perdagangan, WTO menghadapi tantangan ketika kepentingan nasional berbenturan dengan liberalisasi perdagangan. Salah satu contohnya adalah sengketa Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan hilirisasi nikel. Indonesia membatasi ekspor bahan mentah untuk meningkatkan nilai tambah domestik, sedangkan Uni Eropa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan WTO.

Dominasi negara maju dalam lembaga internasional mendorong tuntutan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif bagi negara berkembang. Selain lembaga global, organisasi regional seperti ASEAN juga berperan dalam integrasi ekonomi kawasan melalui kerja sama perdagangan dan investasi.

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam lembaga internasional memberikan manfaat berupa akses pembiayaan, perdagangan,

dan kerja sama ekonomi global. Namun, kondisi tersebut juga menuntut kemampuan negosiasi dan kebijakan yang adaptif agar kepentingan nasional tetap terjaga.

12.3.3 Neraca Pembayaran: Konsep dan Struktur

Menurut Salvatore (2019), neraca pembayaran (balance of payments) merupakan catatan seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dan dunia internasional dalam periode tertentu. Neraca pembayaran menjadi indikator penting untuk menilai posisi eksternal suatu negara serta dasar dalam penyusunan kebijakan moneter, fiskal, dan nilai tukar.

Secara umum, neraca pembayaran terdiri atas transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial, serta perubahan cadangan devisa. Transaksi berjalan mencakup perdagangan barang dan jasa, pendapatan primer, dan transfer seperti remitansi. Surplus transaksi berjalan menunjukkan kemampuan menghasilkan devisa, sedangkan defisit menunjukkan ketergantungan terhadap impor.

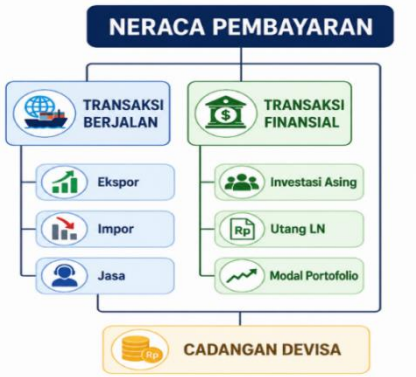

Gambar 12.4 Neraca Pembayaran

Transaksi modal dan finansial mencerminkan arus modal internasional seperti investasi asing langsung, investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri. Sementara itu, cadangan devisa menunjukkan kemampuan bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan ekonomi terhadap tekanan eksternal.

Dalam praktiknya, defisit transaksi berjalan sering dibiayai melalui investasi asing atau pinjaman luar negeri. Karena itu, defisit tidak selalu berdampak negatif selama didukung arus modal yang produktif dan berkelanjutan. Namun, ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi.

Neraca pembayaran dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi daya saing industri, kebijakan fiskal dan moneter, serta stabilitas politik. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi global, harga komoditas, dan suku bunga internasional.

Krisis Asia 1997–1998 menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat memicu krisis ekonomi. Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan dan ketergantungan tinggi terhadap utang luar negeri jangka pendek. Tekanan terhadap nilai tukar menyebabkan arus modal keluar secara besar-besaran dan mendorong terjadinya krisis ekonomi.

Pasca pandemi COVID-19, banyak negara berkembang menghadapi tekanan neraca pembayaran akibat gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas. Indonesia

sempat mengalami surplus perdagangan yang didorong kenaikan harga komoditas ekspor. Namun, ketergantungan terhadap komoditas menyebabkan perekonomian tetap rentan terhadap fluktuasi global.

Neraca pembayaran memiliki hubungan erat dengan nilai tukar. Defisit transaksi berjalan cenderung menekan nilai tukar domestik, sedangkan surplus dapat memperkuat mata uang nasional. Oleh karena itu, pengelolaan neraca pembayaran memerlukan kebijakan yang adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi eksternal.

12.3.4 Nilai Tukar dalam Ekonomi Global

Nilai tukar *(exchange rate)* merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Dalam ekonomi internasional, nilai tukar memengaruhi perdagangan internasional, arus investasi, inflasi, dan stabilitas makroekonomi.

Nilai tukar dapat dibedakan menjadi nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga mata uang di pasar valuta asing, sedangkan nilai tukar riil mencerminkan daya beli relatif antarnegara. Selain itu, dikenal pula nilai tukar efektif yang mengukur nilai mata uang terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama.

Dalam praktiknya, negara menerapkan beberapa rezim nilai tukar, yaitu fixed exchange rate, floating exchange rate, dan managed float. Sistem kurs tetap memberikan stabilitas tinggi, tetapi mengurangi fleksibilitas kebijakan moneter.

Sebaliknya, kurs mengambang lebih fleksibel namun rentan terhadap volatilitas. Indonesia menerapkan sistem managed float sebagai kompromi antara stabilitas dan fleksibilitas.

Secara teoritis, nilai tukar dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, arus modal internasional, dan kondisi ekonomi global (Krugman dan Obstfeld, 2018). Dalam era globalisasi, pergerakan kurs tidak hanya dipengaruhi fundamental ekonomi, tetapi juga sentimen investor dan dinamika pasar keuangan internasional.

Hubungan nilai tukar dengan neraca pembayaran sangat erat. Defisit transaksi berjalan cenderung menekan nilai tukar domestik, sedangkan surplus memperkuat mata uang nasional. Selain itu, arus modal internasional juga dapat memengaruhi volatilitas kurs.

Krisis Asia 1997–1998 menjadi contoh nyata dampak ketidakstabilan nilai tukar. Depresiasi tajam rupiah menyebabkan meningkatnya biaya impor dan beban utang luar negeri sehingga memperburuk krisis ekonomi nasional.

Gambar 12.5 Dampak Pelemahan Rupiah

Dalam perkembangan terkini, nilai tukar dipengaruhi kebijakan suku bunga global, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Karena itu, peran bank sentral menjadi penting dalam menjaga stabilitas kurs melalui pengelolaan cadangan devisa dan kebijakan moneter.

Nilai tukar juga berpengaruh terhadap daya saing ekonomi. Depresiasi dapat meningkatkan daya saing ekspor tetapi mendorong inflasi impor, sedangkan apresiasi dapat menurunkan biaya impor namun melemahkan sektor ekspor. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar lebih penting dibandingkan fluktuasi jangka pendek.

12.3.5 Dampak Globalisasi terhadap Indonesia

Globalisasi ekonomi telah memengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia melalui meningkatnya perdagangan internasional, investasi asing, dan integrasi pasar global. Globalisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan struktural bagi perekonomian nasional.

Keterbukaan ekonomi mendorong pertumbuhan melalui ekspor dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam menyebabkan

perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Globalisasi juga mendorong transfer teknologi dan investasi, tetapi sekaligus meningkatkan persaingan industri domestik (World Bank, 2023). Indonesia masih menghadapi tantangan premature deindustrialization, yaitu menurunnya kontribusi sektor manufaktur sebelum mencapai industrialisasi yang matang. Oleh karena itu, penguatan industri nasional dan peningkatan nilai tambah domestik menjadi penting.

Di sisi lain, globalisasi dapat memperbesar ketimpangan ekonomi karena manfaat keterbukaan ekonomi lebih mudah diakses kelompok yang memiliki modal, pendidikan, dan teknologi. Selain itu, keterbukaan ekonomi meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti krisis global, perubahan suku bunga internasional, dan fluktuasi harga komoditas.

Dalam era globalisasi, daya saing ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, produktivitas, inovasi, dan penguasaan teknologi. Karena itu, investasi pada pendidikan, penelitian, dan transformasi digital menjadi prioritas penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Kebijakan hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah domestik meskipun memicu sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di WTO. Selain itu, perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar global, tetapi

juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan teknologi dan dominasi perusahaan digital global.

Dengan demikian, Indonesia memerlukan strategi ekonomi yang adaptif melalui diversifikasi ekonomi, penguatan sektor manufaktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi ekonomi agar mampu bersaing secara berkelanjutan dalam ekonomi global.

12.4 Kesimpulan

Ekonomi internasional dan globalisasi menunjukkan bahwa keterkaitan ekonomi antarnegara semakin kuat melalui perdagangan internasional, investasi asing, arus modal, dan perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, efisiensi produksi, serta perluasan pasar global. Dalam perkembangannya, teori perdagangan internasional menjelaskan pentingnya spesialisasi dan keunggulan komparatif sebagai dasar terjadinya perdagangan antarnegara.

Bagi Indonesia, globalisasi memberikan manfaat melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan transfer teknologi. Namun, keterbukaan ekonomi juga menghadirkan tantangan berupa persaingan global, ketergantungan terhadap komoditas primer, ketimpangan ekonomi, serta kerentanan terhadap krisis internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan dan strategi pembangunan yang adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, peran lembaga internasional seperti IMF, WTO, dan World Bank menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan mendukung kerja sama antarnegara. Neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar juga menjadi indikator utama dalam menjaga ketahanan ekonomi suatu negara di tengah dinamika ekonomi internasional.

Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat daya saing melalui industrialisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta penguatan institusi ekonomi agar mampu memanfaatkan peluang globalisasi secara optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

ASEAN Secretariat. 2023. *ASEAN Economic Integration Report 2023*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Perdagangan Internasional Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

International Monetary Fund. 2023. *World Economic Outlook 2023*. Washington DC: International Monetary Fund.

Krugman, Paul dan Obstfeld, Maurice. 2018. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan. Edisi Kesepuluh.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salvatore, Dominick. 2019. *Ekonomi Internasional. Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.

Stiglitz, Joseph E. 2020. *Globalization and Its Discontents Revisited.* New York: W.W. Norton & Company.

World Bank. 2023. *Global Economic Prospects 2023.* Washington DC: World Bank.

World Trade Organization. 2023. *World Trade Report 2023.* Geneva: WTO.

BIODATA PENULIS

Dr. Zumi Saidah, S.P., M.Si.
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Karyanya berfokus pada ekonomi kelembagaan pertanian dengan melihat peran kelembagaan, struktur tata kelola, dan intervensi kebijakan memengaruhi pembangunan pertanian, kesejahteraan petani, dan transformasi pedesaan. Salah satu temuannya petani yang berlokasi lebih dekat dengan pusat pemerintahan cenderung memiliki keberlanjutan ekonomi yang lebih baik karena akses yang lebih mudah terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan kelembagaan. Temuan ini menyoroti bagaimana akses kelembagaan dan ketidaksetaraan spasial masih memainkan peran besar dalam membentuk hasil pertanian. Ia sangat tertarik pada bagaimana organisasi petani, akses ke pembiayaan, dan pengaturan

kelembagaan memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan di sektor pertanian. Ia aktif terlibat dalam penelitian, penulisan akademis, dan studi berbasis komunitas yang dengan komitmen untuk memperkuat lembaga pertanian dan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zumi.saidah@unpad.ac.id.

BIODATA PENULIS

Dr. Meisanti., S.P., M.P.
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penulis lahir di Ujung Pandang (Makassar) 20 Mei 1975. Penulis adalah pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Penulis menyelesaikan s3 pada jurusan ilmu-ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin, S2 di Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi Pertanian dan S1 di Universitas Halu Oleo jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Penulis memulai karir sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2002. Namun mengikuti kepindahan tugas suami maka Tahun 2018 penulis pindah ke Jakarta dan menjadi Dosen LLDikti III dan ditempatkan mengajar sebagai Dosen tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meisanti@umj.ac.id.

BIODATA PENULIS

Dr. Dian Anggraeni, S.P., M.P.
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penulis lahir di Ciamis tanggal 16 September 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unwim dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Pertanian Unpad, kemudian melanjutkan S3 Jurusan Ilmu Pertanian Unpad. Penulis menekuni bidang Ekonomi Pertanian.

Selama menjalani karier sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi penulis dalam menyediakan bahan ajar yang aplikatif dan kontekstual, khususnya dalam bidang ekonomi, agar dapat membantu mahasiswa maupun praktisi memahami konsep ekonomi teknik secara lebih sederhana dan mendalam. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dian.anggraeni@untirta.ac.id.

BIODATA PENULIS

Muh. Fachruddin, S.E., M.Acc.
Dosen Prodi Akuntansi Sektor Publik
Jurusan Manajemen Informatika
Politeknik Negeri Fakfak

Penulis lahir di Padang tanggal 4 Desember 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Fakfak, Kab. Fakfak, Prov. Papua Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dan melanjutkan S2 Akuntansi pada Universitas Gadjah Mada. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rudifachru@gmail.com atau muh_fachruddin@polinef.id .

BIODATA PENULIS

Yuni Kartika Simarmata, S.P., M.Si.
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Penulis lahir di Panei Tongah tanggal 08 Juni 1997. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pendidikan sarjana (S1) ditempuh di Universitas Bengkulu pada Program Studi Agribisnis, diselesaikan pada tahun 2018. Gelar magister (S2) diraih dari IPB University pada Program Studi Sains Agribisnis, lulus tahun 2023.

Sejak tahun 2025, penulis aktif mengampu berbagai mata kuliah di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, di antaranya Sistem Pertanian Berkelanjutan, Matematika Ekonomi, serta Mata Kuliah Lainnya. Dalam proses perkuliahan, penulis

menerapkan integrasi konsep hilirisasi dan pengembangan nilai tambah produk pertanian ke dalam materi ajar. Saat ini, Penulis aktif menekuni penelitian di bidang agribisnis hilirisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yunikartika@faperta.ukri.ac.id.

BIODATA PENULIS

Ika Purnamasari, S.Pi., M.P.
Dosen Program Studi Agrobisnis Perikanan
Fakultas Perikanan dan Peternakan
Universitas Islam Lamongan

Penulis yang akrap dipanggil Ika lahir di Mojokerto. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan pada tahun 2010-2014. Pendidikan pasca sarjana juga kembali diperoleh dari Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian dan lulus pada tahun 2018. Saat ini penulis sebagai dosen tetap dan aktif di Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan dengan fokus dan minat keilmuan Ekonomi Perikanan. Selain sebagai dosen aktif, penulis juga memiliki andil sebagai editor di Jurnal GROUPER (Jurnal Ilmiah Perikanan) hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikapurnamasari@unisla.ac.id.

BIODATA PENULIS

Dr. Iis Ismawati, S.Hut., M.Si.
Dosen prodi Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh-Sumatera Barat

Penulis lahir di Sumedang, Jawa barat pada 8 April 1976. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 di Jurusan Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor pada 1999, Pendidikan S2 di Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gadjah Mada pada 2008, dan Pendidikan S3 di Prodi Ilmu Pertanian Minat Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya pada 2018.

Sejak 2008, aktif mengajar di Prodi Agribisnis Jurusan Bisnis Pertanian dan pada tahun 2019 sebagai salah satu staf pengajar di Prodi Magister Ketahanan Pangan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Beberapa matakuliah yang diampu penulis di antaranya adalah Manajemen Produksi, Budaya dan Komitmen Mutu, Pendekatan Sistem Manajemen Mutu, Manajemen Agribisnis, Manajemen Sumberdaya

Manusia, Manajemen Usaha Pertanian Terpadu, Ekonomi Pertanian dan Manajemen Pemasaran Produk Pertanian (S2).

Beberapa buku yang pernah ditulisnya adalah Modul Praktek Ekonomi Mikro, Modul Praktek Manajemen Agribisnis, Modul Praktek Pendekatan Sistem Manajemen Mutu, Buku Pemodelan Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Padi: Estimasi Dan Simulasi Menggunakan Program Sas dan Buku Manajemen produksi dan Operasi Agribisnis di Era Digital.

BIODATA PENULIS

Marhusin, S.ST., M.A.B
Dosen Program Studi Bisnis Digital
Politeknik Hasnur Banjarmasin

Penulis lahir di Anjir Serapat Muara (Barito Kuala) tanggal 04 Maret 1993. Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 program studi Teknik Informatika Politeknik Hasnur Banjarmasin tahun 2015. Lulus Diploma 4 program studi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2018, dan lulus S2 pada program studi Magister Administrasi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023. Penulis merupakan Dosen Program Studi D4 Bisnis Digital Politeknik Hasnur. Kegiatan diluar kampus sebagai Wakil Ketua UPZ Bakti Bersama Hasnur Group – Yayasan Hasnur Centre di bawah naungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2025 Penulis mulai aktif menulis buku berkaitan dengan Bisnis, Ekonomi dan Manajemen pada kepakaran cabang ilmu Pemasaran, Inovasi

dan Teknologi. Penulis berharap dapat terus berkarya melalui tulisan sehingga bisa berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: marhusinhasnurgroup@gmail.com.

BIODATA PENULIS

Meily Andriani, S.P., M.Si.
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Penulis lahir di Jambi tanggal 31 Mei 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Agribisnis di Universitas Jambi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB University. Terdapat dua *Book Chapter* yang telah ditulis oleh penulis yang berjudul *Tataniaga Pertanian* (2020), dan *50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB University: Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (2025). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meilyandriani@faperta.ukri.ac.id.

BIODATA PENULIS

Dr. Wini Fetia Wardhiani, S.T., M.EP.
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Bale Bandung

Penulis lahir di Bandung tanggal 25 Desember 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bale Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Teknik Industri Univeritas Jenderal Achmad Yani dan melanjutkan S2 pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dan melanjutkan S3 pada Program Doktoral Ilmu Pertanian Universitas Padjadjaran.

Penulis sudah menekuni menulis sejak menjadi dosen di tahun 1999. Beberapa buku dan jurnal sudah dihasilkan, yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan tri dharma. Saat ini penulis menjabat sebagai Dekan di Fakultas Pertanian masa bakti 2025-2029. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: winifetia2526@gmail.com.

BIODATA PENULIS

Caesar Muslim, S.E., M.Si.
Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Halu Oleo

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Halu Oleo, serta Pendidikan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Muslim Indonesia. Saat tulisan ini dibuat, penulis sedang melanjutkan Pendidikan S3 pada Jurusan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Terhubung dengan penulis melalui:

- Linked In: caesar-muslim
- Google Scholar: bwVyhs8AAAAJ

BIODATA PENULIS

Tarjono, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Perdagangan Internasional
Fakultas Psikologi, Bisnis dan Teknologi
Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka

Penulis lahir di Cirebon tanggal 02 Mei 1984. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Perdagangan Internasional Fakultas Psikologi, Bisnis dan Teknologi Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada bidang Manajemen dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Manajemen. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Manajemen. Penulis menekuni bidang Menulis.

Sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis memiliki minat kajian pada bidang manajemen,

perdagangan internasional, ekonomi syariah, koperasi, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu, penulis juga aktif dalam pengembangan karya ilmiah, publikasi akademik, serta pengembangan bahan ajar guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika dunia ekonomi serta perdagangan modern. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: jonoarzan16@gmail.com/ tarjono_84@yahoo.co.id.